

**SKRIPSI**

**PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA: PERGULATAN POLITIK MENUJU  
PEMILU 1955 di SURABAYA (1950-1955)**



**Oleh:**

**Deni Haryanto**

**121114002**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2016**



SKRIPSI

PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA: PERGULATAN POLITIK MENUJU  
PEMILU 1955 di SURABAYA (1950-1955)



Oleh:

Deni Haryanto

121114002

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2016





**SKRIPSI**

**PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA: PERGULATAN POLITIK MENUJU  
PEMILU 1955 di SURABAYA (1950-1955)**



**Oleh:**

**Deni Haryanto  
121114002**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2016**



**PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA: PERGULATAN POLITIK  
MENUJU PEMILU 1955 DI SURABAYA (1950-1955)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Sejarah  
Fakultas Ilmu Budaya**



**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**



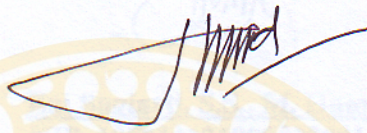
**Persetujuan Pembimbingan Skripsi**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan  
komisi penguji pada tanggal 7 September 2016

**SKRIPSI INI TELAH DISTEJUI  
TANGGAL 31 AGUSTUS 2016**

**Oleh**

**Pembimbing Skripsi**



**Drs. Muryadi, M.IP**  
**NIP. 196402181994031002**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Ilmu Sejarah**



**Gayung Kasuma, S.S., M.Hum.**  
**NIP. 197306112008011015**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2016**

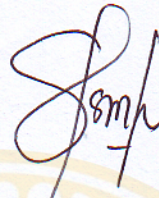


**Pengesahan Dewan Penguji Skripsi**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan  
komisi penguji pada tanggal 7 September 2016

**KOMISI PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua**



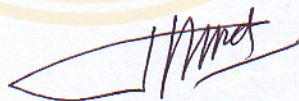
**Eni Sugiarti, S.S., M. Hum**  
**NIP. 197011131998022001**

**Anggota**



**Edy Budi Santoso., S.S., M.A**  
**NIP. 196810251998021001**

**Anggota**



**Drs. Murvadi, M.IP**  
**NIP. 196402181994031002**



**HALAMAN MOTTO**



**Cobaan ini datang dari Allah. Jika tidak memilih menanggung cobaan ini, kita tidak berhak disebut Ghazi. Kita akan sangat malu berdiri di hadapan Allah pada hari pengadilan kelak.**

**(Fatih Sultan Mehmet)**



**HALAMAN PERSEMBAHAN**



**Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

**Allah SWT, Orang Tuaku, Adikku dan semua orang-orang yang  
kusayangi dan kucintai**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan Puja dan Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kepada kami, hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA: Pergulatan Politik Menuju Pemilihan Umum 1955 di Kota Besar Surabaya”**

Penulisan ini dilaksanakan untuk mengetahui perjuangan dari Partai Syarikat Islam Indonesia sebelum dan selama pemilu yang diadakan untuk yang pertama kali bangsa Indonesia, seperti yang diketahui bahwa Partai Syarikat Islam Indonesia berasal dari organisasi Syarikat Islam atau Sarekat Islam.. Penulisan ini ditujukan untuk menggali lebih dalam bagaimana eksistensi *Ladajah Afdeeling* Partai Syarikat Islam Indonesia Kota Besar Surabaya dalam menghadapi Pemilihan Umum 1955.

Penulis sangat bersyukur kehadiran Allah SWT karena skripsi ini akhirnya selesai setelah mengalami perjuangan yang tidak mudah selama menyelesaikan skripsi ini. Tujuan dari penulisan ini adalah demi mendapatkan ridho Allah SWT, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selain itu tidak lupa ucapan syukur diberikan penulis kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya iman dan Islam kepada kita semua.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ayah dan Ibuku tercinta Riyanto dan Haryati yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis serta selalu memberikan dukungan baik moriil maupun materil kepada penulis. Terima kasih juga untuk adikku Septian Dwi Haryanto yang selalu memberikan dukungan agar skripsi ini segera selesai.

Terima kasih kepada Natasya Intan Pramanda yang menjadi *my best partner in crime* serta selalu menjadi sahabat yang baik dan pengertian baik dalam keadaan suka maupun duka, selain itu berkat dukungan semangat, motivasi serta kecerewetanya setiap hari membuat saya semangat dalam mengerjakan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh staff dan pengajar jurusan Ilmu Sejarah terutama Pak Muryadi selaku pembimbing skripsi dan dosen wali penulis, terima kasih banyak atas kesabarannya membimbing penulis selama ini, terima kasih juga kepada Pak Gayung Kesuma, Pak Arya W. Wirayuda, Bu Shinta Rahayu, Bu Eni Sugiarti, Pak Pradipto Niwandhono, Pak Ikhsan Rosyid, Pak Edy Budi Santoso, Mas Adrian Perkasa dan Pak Purnawan Basundoro yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyediaan sumber terutama buklet koran lama beliau. Selain itu ucapan terima kasih juga kepada Mbak Asti dan mas Yudi Wulung yang telah membantu proses administrasi dan peminjaman di perpustakaan Ilmu Sejarah UNAIR. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh staff Arsip Nasional Republik Indonesia, Staff Perpustakaan Nasional, Staff Perpustakaan Jawa Timur, Staff Badan Kearsipan Jagir, terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Djarot selaku pimpinan cabang Organisasi Syarikat Islam Indonesia ranting Surabaya beserta anggota-anggota Syarikat Islam yang lain serta seluruh pihak yang membantu penulis selama ini.

Terima kasih juga pada sahabatku di Crootzzz Family; Rizal, Fikri, Auliya, Khoirul dan Doni, serta kakak-kakak angkatan Ilmu Sejarah, Mas Nafis, Mas Ridho, Mas Wildan Taufiqur, Mbak Fifi, Mas Lingga, serta kepada kawan-kawan Ilmu Sejarah angkatan 2011 Khairil, Vian, Khasan, Yudi Wulung, Lela, Rengga, Kresna, Edo, Samid, Rio, Winny, Wiant, Maria, Ahmad Jaya, Azizah, Meytha, Putra, Ucup, Inggrit Antasari, Maulidhany, Dine, Dani Firman, dan teman-teman Ilmu Sejarah yang lain yang tidak saya sebutkan disini.

Sidoarjo, 5 Mei 2016

Penulis



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah karya tulis saya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Airlangga maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni hasil gagasan, penelitian, dan tulisan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Karya tulis ini bukan karya jiplakan, dan didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Surabaya,

Yang membuat pernyataan



**DENI HARYANTO**

**NIM. 121114002**

## ABSTRAKSI

Tulisan ini mengkaji mengenai perjuangan Partai Syarikat Islam Indonesia cabang Surabaya sebelum hingga menjelang diadakannya pemilu 1955, dan menjadi salah satu dari beberapa partai yang menggunakan Islam sebagai ideologi dasar. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode sejarah, yaitu melalui tahap penentuan topik, pengumpulan sumber data, verifikasi atau kritik sumber, yaitu tahap untuk memperoleh keabsahan sumber, tahap interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah disusun secara obyektif. Sumber yang penulis dapatkan adalah melalui wawancara, pengumpulan foto arsip yang sezaman, koran, majalah, jurnal, serta sumber pendukung berupa buku dan internet. Berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa bidang politik adalah bidang yang krusial dalam mempengaruhi massa, PSII menyadari hal tersebut dan memanfaatkannya dalam menjaring massa pada pemilu 1955, namun didalam perkembangannya kemudian, khususnya pada pemilu 1955 terjadi berbagai hal yang mempengaruhi PSII cabang Surabaya dalam eksistensinya sebagai salah satu kontestan Pemilu 1955 di Kota Besar Surabaya

**Kata Kunci:** *Pemilu 1955, Politik, PSII, Sarekat Islam, Surabaya*





## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PRASYARAT GELAR.....	iii
PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISTILAH.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Konseptual .....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17

## **BAB II SUHU POLITIK DI SURABAYA MENJELANG**

### **PEMILIHAN UMUM 1955**

A. Kondisi Perpolitikan Indonesia Sebelum Pemilihan Umum 1955...	22
B. Kabinet Sebelum Pemilu 1955.....	25
C. Kondisi Politik di Surabaya Sebelum Pemilihan Umum 1955.....	34
D. Sosialisasi Pemilihan Umum di Kota Besar Surabaya.....	42

## **BAB III PERGULATAN PARTAI SYARIKAT ISLAM**

### **INDONESIA SEBELUM PEMILU 1955 DI KOTA BESAR SURABAYA**

A. Sarekat Islam Sebagai Cikal Bakal Terbentuknya Partai Syarikat Islam Indonesia.....	49
B. Bergabungnya PSII kedalam MIAI.....	55
C. Partai Syarikat Islam Indonesia Pada Pemilihan Umum 1955 di Surabaya.....	58
1. Pemilihan DPRDS Surabaya, Langkah Awal PSII Menuju Pemilu 1955.....	58
2. Masa-masa Kampanye PSII Menjelang Pemilu 1955.....	63
3. Suasana Pemilihan Umum 1955 di Surabaya.....	70
D. Perolehan Suara dan dampaknya bagi PSII Pasca Pemilu di Surabaya.....	82

## **BAB IV KESIMPULAN**

Kesimpulan.....	96
-----------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	101
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b> .....	107
-----------------------	-----



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Perwakilan DPRDS Surabaya periode tahun 1950	57
Tabel 2.	Daftar calon sementara anggota DPR dari PSII Daerah Pemilihan Djawa Timur tahun 1955	76
Tabel 3.	Daftar calon sementara anggota Konstituante dari PSII Daerah Pemilihan Djawa Timur tahun 1955	78
Tabel 4.	Jumlah Perolehan Suara Partai dan Perseorangan untuk Pemilihan anggota Konstituante Kota Besar Surabaya tahun 1955	82
Tabel 5.	Jumlah Perolehan Suara Partai dan Perseorangan untuk Pemilihan anggota DPR Kota Besar Surabaya tahun 1955	83
Tabel 6.	Hasil Perolehan Suara DPR dan Konstituante Provinsi Jawa Timur tahun 1955	84
Tabel 7.	Perolehan Suara Partai Peserta Pemilihan Umum 1955 untuk seluruh wilayah Indonesia	87

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sosialisasi Pemilu di Kota Surabaya tahun 1954	42
Gambar 2	Gedung Balai Harta Peninggalan yang menjadi kantor Pemilu 1955 Provinsi Jawa Timur	45
Gambar 3	Poster Propaganda PSII yang ditempel ditembok sebuah bangunan yang tertulis N.V. Autohandel di Surabaya	63
Gambar 4	Poster Besar PSII terpampang jelas di suatu sudut jalan di Kota Surabaya	65
Gambar 5	Perwakilan Partai dan Organisasi yang menghadiri rapat di Lapangan Tambak Redjo Surabaya	67
Gambar 6	Rapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat menjelang Pemilu 1955	70
Gambar 7	Petugas Panitia Pemilihan Umum mendata masyarakat “kurang beruntung di kantor PPU di Surabaya	72
Gambar 8	Kesibukan yang terjadi di TPS Jl. Oro-oro Ombo Tambaksari Surabaya	73



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembaran Negara Republik Indonesia mengenai disahkannya peraturan Pemilu 1955.	106
Lampiran 2 Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai dan Organisasi Di Surabaya.	122
Lampiran 3 Apakah KONSTITUANTE itu?	113
Lampiran 4 Cara-cara Pemungutan Suara dalam Pemilu	114
Lampiran 5 Partai-partai Islam Supaja Bergabung Saja	115
Lampiran 6 Desas-desus ditundanya Pemilihan Umum	116
Lampiran 7 Menjalarnya Amerikanisme pada Kampanye Pemilu	117
Lampiran 8 Rakjat djangan djadi korban agitasi politik!	118
Lampiran 9 Kursus Rakjat Mencoblos Tanda Gambar	119
Lampiran 10 PSII Menghendaki adanya Penghapusan KMB	120
Lampiran 11 PSII punya Pendirian Sendiri	121

## DAFTAR ISTILAH


Ladjnah Tanfidziyyah	:Dewan Pelaksana Pusat yang bertugas mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepartaian.
Ladjnah Afdeeling	:Dewan Pelaksana Daerah atau juga disebut cabang kepartaian
Onderbouw	:Organisasi yang berada dibawah naungan partai
Darul Islam	: <i>Rumah Islam/</i> Kelompok yang dipimpin oleh Kartosuwiryo yang merupakan eks anggota PSII, kelompok ini merupakan kelompok yang menginginkan pendirian sebuah negara di dalam Negara pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia, karena kurang setuju dengan konsep yang dicetuskan oleh Soekarno mengenai Negara kesatuan
Bebas Aktif	:Politik yang secara aktif membebaskan Indonesia dari tekanan politik baik dari Blok Barat maupun Blok Timur
Kabinet Presidensial	:Sebuah sistem politik dimana presiden merangkap dua jabatan yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Parlementer	:Sebuah sistem pemerintahan dimana anggota parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan, dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya



- Konstituante : Lembaga Negara yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950
- Konferensi Asia Afrika : Konferensi tingkat internasional yang diadakan di Bandung pada tahun 1950 dimana melibatkan negara-negara Dunia Ketiga dan melahirkan sebuah pernyataan yaitu Dasasila Bandung



## DAFTAR SINGKATAN



BAPERKI	: Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BPMK	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
BTI	: Barisan Tani Indonesia
DI/TII	: Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRDS	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
FINEC	: Financieel Economie
GERWANI	: Gerakan Wanita Indonesia
GERTASI	: Gerakan Tani Sarekat Islam
GOBSI	: Gerakan Organisasi Buruh Sarekat Islam
G.P.I.I	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
I.N.P	: Indo Natinoal Partai
KBS	: Kota Besar Surabaya
KMKB	: Komando Militer Kota Besar



MASYUMI	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MURBA	: Musyawarah Rakyat Banyak
N.U	: Nahdlatul Ulama
P3RI	: Persatuan Purna Karyawan Republik Indonesia
PARINDRA	: Partai Indonesia Raya
PARKINDO	: Partai Kristen Indonesia
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERMAI	: Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia
PERTI	: Persatuan Tarbiyah Islam
PERWARI	: Persatuan Wanita Republik Indonesia
PERWINDO	: Persatuan Wanita Indonesia
PIR	: Persatuan Indonesia Raya
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPK	: Panitia Pemiihan Kota
PPP	: Panitia Pemilihan Provinsi

PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPU	: Panitia Pemilihan Umum
PRN	: Partai Rakyat Nasional
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
S.B.I.I	: Serikat Buruh Islam Indonesia
S.B.L.G.I	: Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia
SEMMI	: Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia
SEPMI	: Serikat Pelajar Muslim Indonesia
SI	: Sarekat Islam
SIAP	: Sarekat Islam Afdeeling Pandu
TPS	: Tempat Pemungutan Suara



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendirian partai politik pada masa penjajahan Belanda merupakan salah satu usaha dari kaum pergerakan nasional dalam merintis benih kebangsaan di Indonesia, yang didasarkan atas dasar perasaan sama-sama “dijajah” dimana Belanda dianggap sebagai musuh bersama. Sarekat Dagang Islam yang menjadi cikal bakal dari Partai Syarikat Islam Indonesia, pada saat itu dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto memperjuangkan apa yang dimaksud dengan kebebasan berpolitik dan membangkitkan kesadaran atas hak-hak kaum pribumi<sup>1</sup>, yaitu dengan cara melakukan penyadaran terhadap masyarakat terutama golongan muda di Surabaya.<sup>2</sup>

Pada masa penjajahan Belanda pergerakan partai politik masih bisa terciptanya keberadaannya, walaupun pada dasarnya masih terkungkung dalam pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, hal itu berbeda pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan organisasi-organisasi yang berbau politik dan nasionalisme dilarang keberadaannya. Hal itu dilakukan karena ditakutkan akan terjadi perlawanan terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia. Hanya organisasi-organisasi yang bernaifaskan agama yang boleh berdiri, dalam

---

<sup>1</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 259.

<sup>2</sup> P.N.H. Simanjuntak, Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 79.

hal ini agama Islam. Organisasi yang boleh berdiri pada masa penjajahan Jepang adalah Masyumi.<sup>3</sup> Masyumi adalah bentuk organisasi dari pengintegrasian dari berbagai golongan agama Islam agar mudah diawasi pergerakannya oleh pemerintah Jepang.

Setelah penjajahan Jepang berakhir, Indonesia menjadi negara yang merdeka dan Soekarno memberikan gagasan agar Indonesia memakai sistem satu partai pelopor. Hal tersebut bertujuan agar tidak membingungkan massa. Namun, Sjahrir membuat suatu konsep agar partai politik berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan mendisiplinkan masyarakat dalam menghadapi perbedaan pendapat.<sup>4</sup> Sehingga kesempatan rakyat untuk ikut dan berpartisipasi dalam mendirikan partai-partai politik semakin terbuka lebar.

Seiring perkembangan waktu, pada beberapa kalangan timbul suatu perasaan dalam membentuk suatu badan aparatur negara untuk mendobrak suasana politik Indonesia agar lebih demokratis. Dalam hal ini, Komite Nasional Indonesia Pusat perlahan-lahan dibagi tugasnya menjadi beberapa tahap. Tahap pertama, KNIP tidak hanya sebagai pembantu presiden, tetapi juga mempunyai wewenang legislatif. Tahap kedua, Badan Pekerja mengusulkan agar para menteri bertanggung jawab kepada KNIP yang telah berubah menjadi parlemen atas persetujuan KNIP. Sehingga, pada tanggal 14 November 1945 Sistem Presidensial berubah menjadi Sistem Parlemen. Tahap ketiga, dalam upaya untuk demokratisasi maka Badan Pekerja mengusulkan agar dibuka kesempatan untuk mendirikan

---

<sup>3</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013, hlm. 424.

<sup>4</sup> Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Djilid Pertama, (Jakarta: Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1964), hlm. 282-284.



partai-partai politik dan disetujui oleh pemerintah yang tertuang dalam maklumat 3 November 1945.<sup>5</sup>

Pasca adanya Maklumat tersebut, langsung disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Dalam waktu yang singkat, setidaknya sudah terbentuk 40 partai politik, diantaranya Partai Nasionalis Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Masjumi, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Republik Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Rakyat Indonesia, Partai Banteng Republik, Partai Komunis Indonesia, Partai Wanita Indonesia, Partai Kebangsaan Indonesia, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Sosialis Indonesia, dan masih banyak lagi.<sup>6</sup> Dalam peraturan tersebut juga adanya klasifikasi yang dijabarkan oleh Kementerian Penerangan pada tahun 1951. Dalam peraturannya partai politik harus menurut Dasar Ketuhanan, Dasar Marxisme, dan partai lain-lain. Partai politik yang diklasifikasikan ke dalam Dasar Ketuhanan adalah Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik.<sup>7</sup>

Pada masa kepemimpinan Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pada tahun 1955 dilaksanakan Pemilihan Umum untuk pertama kalinya untuk pemilihan anggota DPR dan anggota Konstituante. Pemilihan Umum merupakan wahana demokrasi yang krusial serta diharapkan dapat digunakan sebagai jembatan dalam menengahi pertikaian antar partai politik dan menjadi babak baru dalam usaha

---

<sup>5</sup> Budiarjo, op, cit., hlm. 425-427.

<sup>6</sup> M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 81-90.

<sup>7</sup> Ibid., hlm.65-66.

untuk membangun bangsa. Pemilihan umum 1955 diikuti oleh kurang lebih 100 tanda gambar. Dimana hasil yang didapatkan dimenangkan oleh 4 partai besar yang mendapat jumlah suara lebih dari 30 kursi dalam tingkat nasional. Partai yang mendapat suara yang besar adalah Partai Nasional Indonesia, dimana partai tersebut memperoleh 57 kursi, kemudian diikuti Masyumi yang memperoleh 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, dan Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai yang sempat dibekukan oleh pemerintah dimana PKI memperoleh jumlah 39 kursi, sedangkan di urutan kelima ada Partai Syarikat Islam Indonesia hanya mendapat jatah kursi sebanyak 8 kursi.<sup>8</sup>

Kota besar Surabaya sampai pada akhir bulan September 1950 menurut perhitungan resmi memiliki jumlah penduduk sebanyak 656.452 jiwa. Jumlah tersebut dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan Indonesia sebanyak 512.033 jiwa dan golongan non-Indonesia sebanyak 144.419 jiwa, luas kota besar Surabaya sekitar 92 kilometer persegi yang dibagi kedalam 6 kecamatan, yaitu : kecamatan Kranggan, Krembangan, Kupang, Ketabang, Kapesan, dan Nyamplungan<sup>9</sup>, dengan jumlah sebesar itu diharapkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu akan besar juga namun kondisi politik sebelum pemilihan umum pada saat itu masih carut marut karena beberapa kali terjadi pergantian kabinet selama kurun waktu 1950-1955 yang mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan kondisi perpolitikan di Indonesia, termasuk di Surabaya. Pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya, yang diwakili oleh

---

<sup>8</sup> Budiarjo, op,cit., hlm.432-434.

<sup>9</sup> Sjamsju Koesmen dan Pangestu B.W, Kota Besar Surabaya, (Surabaya: Djawatan Penerangan, 1957), hlm. 142-143

32 anggota perwakilan, Partai Syarikat Islam Indonesia menduduki 1 kursi bersama partai-partai lainnya, dan berbanding jauh dengan Masyumi yang berhasil menempati 6 kursi di DPRDS Kota Besar Surabaya. Partai Syarikat Islam Indonesia diwakili oleh Dachlan Kahar.<sup>10</sup>

Dalam Pemilihan Umum 1955 Surabaya juga turut berpartisipasi karena Surabaya merupakan salah satu barometer kota-kota lain di Jawa Timur.<sup>11</sup> Selama masa-masa sebelum Pemilu 1955 terjadi beberapa peristiwa diantaranya adalah adanya kampanye-kampanye yang dilakukan beberapa partai politik peserta Pemilu 1955 yang paling sering terjadi adalah penempelan tanda-tanda gambar yang bertujuan mengenalkan kepada masyarakat awam, namun apa yang terjadi adalah banyak terjadi perobekan atau pencopotan paksa tanda gambar tersebut, misalnya dengan apa yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia di Surabaya.<sup>12</sup>

Warga masyarakat banyak yang tidak setuju adanya tanda gambar PKI yang dipasang ditembok-tembok, karena beralasan bahwa warga tidak mau di PKI kan. Selain itu juga terjadi pencopotan gambar oleh simpatisan partai lain terhadap partai lawannya, yang mengakibatkan kondisi politik menjadi sedikit memanas. Selain itu juga di daerah-daerah seperti di Gresik juga demikian dimana tanda gambar PSII disobek dan kemudian dibuang oleh orang-orang tidak

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 144.

<sup>11</sup> “Djuga di daerah-daerah PNI, NU, Masjumi, dan PKI “Leading””, dalam Merdeka, edisi 1 Oktober 1955.

<sup>12</sup> Sri Margarana dan M. Nursam (ed), Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial (dalam artikel “Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulatan Partai Komunis Indonesia di Kota Surabaya 1955-1965 oleh Purnawan Basundoro), (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 272-273.



dikenal.<sup>13</sup> Selama masa-masa kampanye, suhu politik sedikit memanas karena akan berlangsungnya Pemilihan Umum pertama di Indonesia.

Hasil perolehan pemilihan umum di Surabaya terdiri dari lima partai besar sebagai pemenang.<sup>14</sup> Kelima partai tersebut diantaranya, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdatul Ulama (NU), Masjumi, dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).<sup>15</sup> Partai Syarikat Islam Indonesia menduduki peringkat ke 9 di Surabaya.<sup>16</sup> Hal tersebut menjadi sebuah bukti bahwa partai Partai Syarikat Islam Indonesia mempunyai kedudukan yang cukup diperhitungkan didalam kancah perpolitikan di Surabaya.<sup>17</sup>

Penulisan mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia sangat menarik untuk ditulis, karena Partai Syarikat Islam Indonesia mempunyai andil yang besar pada masa sebelum Pemilihan Umum 1955 di Surabaya.<sup>18</sup> Selain itu Partai Syarikat Islam Indonesia merupakan perkembangan dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang mempunyai tokoh-tokoh yang berpengaruh salah satunya adalah H.O.S Tjokroaminoto. Selain itu Surabaya menjadi salah satu basis kekuatan politik yang cukup kuat sehingga patut untuk diperhitungkan..

---

<sup>13</sup> “Gedjala-gedjala tak sehat”, dalam PDM, edisi 5 Mei 1955.

<sup>14</sup> “Perlombaan NU, PKI, PNI”, dalam Harian Umum, edisi 3 Oktober 1955.

<sup>15</sup> Purnawan Basundoro, Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya; Sejak Masa Kolonial sampai Masa Reformasi (1906-2012) (Solo: Elmatara Publishing, 2012), hlm. 56-57.

<sup>17</sup> “Di Djawa Timur NU 3.210.820; PKI 2.258.242; PNI 2.204.580; MASJUMI 1.087.209 Angka2 sementara”, dalam Haluan, edisi 7 Oktober 1955.

<sup>18</sup> “Ideologie Komunis dapat Dukungan Kuat pada Kalangan Tentara”, dalam Indonesia Berdjuang, edisi 1 Oktober 1955.

## B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka penulisan ini berupaya mengkaji eksistensi Partai Syarikat Islam Indonesia sebagai partai politik berbasis agama Islam dan pergulatannya dalam kancah perpolitikan pada pemilu 1955 di Surabaya. Hal yang akan dikaji tersebut terangkum dalam rumusan masalah di bawah ini.

Bagaimana langkah yang dilakukan oleh kader dan simpatisan PSII dalam menyambut persaingan politik pada Pemilu 1955 di Surabaya?

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penelitian ini dilakukan untuk beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai usaha-usaha yang dilakukan PSII pada saat sebelum dan sesudah pemilu 1955 dalam lingkup lokal maupun nasional secara umum.
2. Menjelaskan mengenai hasil yang kurang memuaskan mengenai dukungan terhadap PSII cabang Surabaya yang berdampak pada sedikitnya jumlah suara yang diperoleh PSII.

Manfaat dari kajian pergulatan dan sistem perpolitikan Partai Syarikat Islam Indonesia adalah memberi gambaran mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia secara umum dan khusus serta memberikan pemahaman terhadap perkembangan partai politik yang memiliki peran penting sebagai wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa, terutama dalam kontestasi politik di

Surabaya. Selain itu manfaat berupa pengetahuan secara langsung ataupun gambaran terhadap kondisi perpolitikan di Surabaya pada pemilu pertama tahun 1955. Dimulai dari proses membentuk wadah organisasi agar bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan pikiran dan orientasi mereka. Selain itu juga akan dipaparkan pergulatan dan manuver politik yang dilakukan oleh Partai Syarikat Islam Indonesia dalam usaha untuk memperoleh dukungan yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan partai didalam parlemen. Manfaat lain yang diperoleh yaitu untuk menambah koleksi penulisan sejarah dan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu sejarah, khususnya mengenai sejarah politik. Selain itu untuk menambah cakrawala pandang baru tentang partai-partai politik yang ada di Indonesia.

#### D. Ruang Lingkup

Sejarah dapat diartikan ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia pada masa lampau yang dimulai sejak adanya bukti tertulis.<sup>19</sup> Agar pembahasan mengenai suatu permasalahan dalam ilmu sejarah tidak keluar jalur maka harus diberi batasan-batasan agar bisa fokus. Batasan-batasan itu dikenal dengan sebutan ruang lingkup.

Ruang lingkup dalam ilmu sejarah terdiri dari dua macam, yaitu: ruang lingkup temporal dan spasial. Lingkup temporal dalam penulisan ini adalah tahun dari tahun 1950-1955. Tahun 1950 dipilih karena pada tahun tersebut adalah mulai aktifnya organisasi-organisasi kepartaian karena adanya dorongan untuk

---

<sup>19</sup> Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 76.



berpolitik, sedangkan batasannya adalah sampai dengan tahun 1955 karena pada tahun ini adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang pertama di Indonesia dan dianggap sebagai pemilihan umum yang paling “demokratis” di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari jumlah partai politik, yaitu lebih dari seratus partai yang turut menyemarakkan pemilu 1955. Selain itu juga Partai Syarikat Islam Indonesia turut serta dalam pemilihan umum 1955 dan berhasil menduduki peringkat 5 dalam tingkat nasional. Hal itu menjadi sebuah bukti bahwa pergerakan Partai Syarikat Islam Indonesia mempunyai legitimasi yang cukup kuat dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia.

Lingkup spasial dalam penulisan ini adalah kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan Ibukota provinsi Jawa Timur yang cukup diperhitungkan dalam hal jumlah suara pemilu. Surabaya juga menjadi basis kekuatan dari Partai Syarikat Islam Indonesia yang dibuktikan dengan pernah diadakannya beberapa Kongres Nasional PSII dan salah satu tokoh pemimpin dari Sarekat Islam yaitu H.O.S Tjokroaminoto, rumahnya ada di Surabaya. Sehingga, penulis melakukan penulisan ini untuk memperkaya literatur perkembangan wawasan sejarah dan dapat menjadi sebuah refleksi untuk ke depannya bagaimana mengurus dan mengembangkan partai politik yang bersifat progresif agar tetap bisa menjadi wadah untuk menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan pikiran dan orientasi mereka.

#### E. Tinjauan Pustaka

Penulis memilih beberapa buku yang dijadikan tinjauan pustaka. Meskipun sebenarnya penulis menyadari bahwa ada buku lain yang lebih tepat digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam pembahasan materi ini. Kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan yaitu buku yang pembahasannya terletak pada eksistensi sebuah partai politik dalam menggapai sebuah kekuasaan dan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Kajian yang bisa dijadikan rujukan awal dalam penulisan ini adalah skripsi karya Muhammad Muhibin salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut berjudul “Politik Hijrah”: Perjuangan Partai Sarekat Islam Indonesia Dalam Melawan Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1923-1940 M.<sup>20</sup> Dalam skripsi tersebut dipaparkan mengenai perubahan sikap politik Partai Syarikat Islam Indonesia yang semula bersikap kooperatif dengan Belanda, setelah diadakannya Kongres Nasional pada tahun 1923 partai tersebut menjadi non-kooperatif. Hal tersebut bertujuan karena adanya keinginan untuk melepaskan segala pengaruh dari kolonial. Namun, pada perkembangan selanjutnya strategi tersebut malah berbalik menjadi polemik dalam tubuh kepartaian. Dalam skripsi tersebut banyak memberikan informasi terutama yang berhubungan dengan kiprah Haji Agus Salim sebagai pelopor dari gerakan politik Hijrah pada PSII. Penggunaan skripsi tersebut sebagai kajian pustaka hanya sebagai rujukan awal dalam penulisan ini agar penulis bisa mengetahui gaya perpolitikan Partai Syarikat Islam Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

---

<sup>20</sup> Muhammad Muhibin, “Politik Hijrah” Perjuangan Partai Sarekat Islam Indonesia Dalam Melawan Pemerintah Belanda 1923-1940 M (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm. xi.

Selain itu, buku tersebut hanya membahas sedikit tentang Partai Syarikat Islam Indonesia yang dibahas secara umum dan tidak mendetail.

Skripsi karya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang bernama Endang Muryanti. Skripsi tersebut berjudul Sarekat Islam Semarang Tahun 1913-1920.<sup>21</sup> Skripsi tersebut menjelaskan mengenai perpecahan Sarekat Islam Semarang yang merupakan cabang dari Sarekat Islam Surakarta. Pada akhirnya SI Semarang berubah haluan politik karena adanya pengaruh ideologi komunis yang akhirnya mempengaruhi Semaun sebagai salah satu tokoh dari SI Semarang tersebut. Dalam hal ini hanya dijelaskan secara terbatas pada pengaruh SI merah tidak dijelaskan reaksi dari cabang SI lain yang ada di Indonesia. Hubungannya buku tersebut dengan skripsi yang ditulis sebagai kajian pustaka adalah menjelaskan gaya perpolitikan dalam tubuh Sarekat Islam. Nantinya akan diketahui bagaimana perkembangan gaya perpolitikan dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam, kemudian menjadi Partai Sarekat Islam, dan yang terakhir menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Adanya transformasi dan perubahan haluan dari organisasi dagang menjadi partai tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan, salah satunya adalah ingin turut campur dalam pemerintahan. Tapi dalam skripsi ini tidak menjelaskan secara rinci tentang Partai Syarikat Islam Indonesia di Surabaya yang terbingkai dalam sistem pemilihan umum 1955 dengan penjabaran yang rinci. Namun, penulis menawarkan penulisan tentang Partai Syarikat Islam Indonesia dalam pergulatannya pada pemilihan umum 1955 di Surabaya yang akan dibahas secara rinci dan mendetail.

---

<sup>21</sup> Endang Muryanti, Sarekat Islam Semarang Tahun 1913-1920, (Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009), hlm. 1.



Berikutnya adalah buku karya Nasihin yang berjudul Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945.<sup>22</sup> Buku tersebut menjelaskan mengenai transformasi SDI yang awalnya organisasi perdagangan bumiputera menjadi sebuah organisasi perpolitikan yang berpengaruh pada masa kolonial Belanda yang turut berpartisipasi dalam upaya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Didalam buku tersebut dijelaskan pula latar belakang terpecahnya SI menjadi dua golongan, yaitu SI Merah dan SI Putih. Selain itu, juga dijelaskan tentang perubahan dari organisasi politik menjadi partai politik yang secara langsung mengubah haluan politik partai. Dalam buku ini pembahasannya dari masa penjajahan Belanda hingga masa pendudukan Jepang. Buku ini hanya membahas kiprah Sarekat Islam dalam lingkup secara global yang ada di Indonesia. Sehingga, belum ditemukan sebuah penjelasan yang rinci tentang pergulatan Partai Sarekat Islam dalam kancah perpolitikan di Surabaya. Dimana Partai Syarikat Islam Indonesia merupakan kelanjutan dari Sarekat Islam pada masa pemilihan umum 1955 di Surabaya.

Kemudian buku yang berjudul Pemilihan Umum 1955 di Indonesia<sup>23</sup> karya dari Herbert Feith, buku ini menjelaskan mengenai salah satu peristiwa politik yang terjadi di Indonesia yaitu diadakannya Pemilu tahun 1955 yang merupakan tonggak awal demokrasi di Indonesia, dimana rakyat menjadi salah satu penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu dijelaskan pula mengenai gambaran-gambaran yang terjadi selama masa-masa sebelum pemilu dengan berbagai peristiwa yang melatar belakangnya. Buku ini hanya membahas kiprah

---

<sup>22</sup> Nasihin, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1942, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 5.

<sup>23</sup> Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. iv.

partai-partai peserta Pemilu secara keseluruhan sehingga sedikit ditemukan informasi mengenai partai-partai diluar 4 besar pemenang Pemilu 1955. Penulis menawarkan penulisan yang merinci mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia yang merupakan partai yang masuk dalam 5 besar dalam skala nasional dan 10 besar dalam skala lokal.

Kemudian buku yang ditulis oleh Valina Singka Subekti yang berjudul Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite<sup>24</sup> dimana dalam buku ini membahas mengenai dinamika Partai PSII pada masa Orde Baru, yaitu pada masa Pemilihan Umum yang kedua kali yang dilaksanakan pada tahun 1971. Didalam buku ini menjelaskan mengenai adanya pergantian pucuk kepemimpinan yang pada awalnya PSII selalu identik dengan keluarga Tjokroaminoto hingga terdapat slogan bahwa PSII itu adalah Tjokroaminoto dan Tjokroaminoto adalah PSII yang kemudian oleh kader-kader muda anggapan itu ditentang hingga terjadinya fusi politik PSII. Buku ini hanya membahas kiprah PSII pada masa Orde Baru dan sedikit menyinggung mengenai keikutsertaan PSII dalam Pemilu 1955, disini penulis menyajikan sebuah tulisan yang dapat melengkapi proses sejarah lokal khususnya keikutsertaan PSII dalam Pemilihan Umum di Surabaya pada tahun 1955.

Semua karya-karya di atas memberikan informasi bagi penulis untuk dapat memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai gambaran Partai Syarikat Islam Indonesia yang ditulis dalam penulisan ini. Melalui penulisan “Partai Syarikat Islam Indonesia: Pergulatan Politik Menuju Pemilu 1955 di Surabaya”,

---

<sup>24</sup> Valina Singka Subekti, Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. iv.

penulis berusaha untuk memberi jarak dan berusaha untuk seobjektif mungkin dalam memberikan gambaran mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia.

#### F. Kerangka Konseptual

Pembahasan mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia, merupakan sebuah fenomena setidaknya menggunakan konsep yang dijadikan acuan untuk menjelaskan peristiwa mengenai alur penulisan ini. Hal itu dilakukan untuk lebih memudahkan dalam proses penelitian sejarah agar dapat menghasilkan historiografi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas “Partai Syarikat Islam Indonesia: Pergulatan Politik Menuju Pemilu 1955 di Surabaya”. Melalui penulisan partai politik, akan ditemukan tujuan partai tersebut dalam bidangnya. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini penulis memakai beberapa konsep diantaranya adalah konsep mengenai partai politik, perilaku politik dan pemilihan umum..

Partai Politik merupakan suatu kelompok organisasi terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok atau organisasi tersebut untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program dan tujuannya. Dengan kata lain partai politik juga memakai sistem kekuasaan yang intinya ingin memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan yang biasanya dianggap sebagai perjuangan



(pergulatan) kekuasaan yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>25</sup> Hal itu juga terlihat dari pernyataan Arni Muhammad, yaitu bahwasanya organisasi merupakan suatu sistem yang mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum. Organisasi biasanya mempunyai pergerakan dalam ranah yang berbeda.<sup>26</sup>

Pada dasarnya partai politik adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu di dalam masyarakat. Oleh karena itu, partai politik mempunyai peranan yang penting dalam membentuk wadah yang bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang serupa. Dalam perkembangannya partai politik bukan hanya sebagai wadah untuk mengkonsolidasikan pemikiran-pemikiran yang serupa, tetapi juga digunakan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa. Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan kedalam tiga tipe, antara lain partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan, diantara ketiganya Partai Syarikat Islam Indonesia lebih dekat dengan tipe partai politik kepentingan. Partai politik kepentingan merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis dan agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.<sup>27</sup>

Konteks yang diambil dalam hal ini adalah keterlibatan PSII sebagai kendaraan politik pada pemilu 1955. Seperti yang kita ketahui dalam Pemilihan Umum 1955 partai-partai yang ikut berjumlah kurang lebih 100 partai maka

---

<sup>25</sup> Miriam Budiarjo, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994), hlm. 404.

<sup>26</sup> Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 24.

<sup>27</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 155-156.

sistem yang digunakan adalah sistem multi partai dimana sistem ini merupakan produk dari masyarakat majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Sehingga setiap partai akan memelihara keterikatan dengan asal-usul budayanya dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum, sehingga akan terjadi koalisi yang tujuannya adalah bersama-sama mencapai suara mayoritas di parlemen.<sup>28</sup>

Perilaku berpolitik juga mempengaruhi sebuah lembaga untuk mengambil sebuah keputusan politik yang nantinya akan menentukan arah dan kebijakan dari lembaga tersebut. Sebenarnya yang harus ditelaah adalah individunya bukan lembaganya, karena itu, dibalik setiap keputusan, individulah yang secara aktual berada dibalik layar mengendalikan jalannya lembaga tersebut.<sup>29</sup>

Pemilu 1955 merupakan gambaran umum mengenai awal terciptanya gagasan demokrasi Indonesia yang berasaskan Pancasila. Pemilu ini merupakan tonggak awal sejarah Indonesia dalam penentuan arah kebijakan kenegaraan yang mengikutsertakan masyarakat sebagai elemen utama penggerak demokrasi Indonesia. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Sebagai salah satu alat demokrasi pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik warga masyarakat dalam memperjuangkan aspirasinya, karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan pastinya akan

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 167-168

<sup>29</sup> Ibid .

mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, sehingga warga masyarakat berhak dalam menentukan keputusan politik.<sup>30</sup>

#### G. Metode Penelitian

Dalam sejarah terdapat suatu metode pendekatan dan teknik dalam penulisan sejarah. Demi menghasilkan historiografis yang bisa dibuktikan kebenarannya, penulis melakukan kajian secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode historis. Penulis menggunakan metode penulisan sejarah seperti yang diutarakan oleh Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahapan, yaitu pemilihan topik, mengumpulkan sumber data, verifikasi, interpretasi dan sintesis, serta penulisan.<sup>31</sup>

Pertama, pemilihan topik yang menentukan subjek yang akan diteliti dan permasalahan yang akan dijawab. Pemilihan tokoh akan mempengaruhi sumber-sumber yang dicari.

Kedua, dilakukan pengumpulan sumber, baik berupa sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis. Sumber tertulis diperoleh dari penelitian pustaka yang meliputi arsip-arsip yang berhubungan dengan berbagai masalah yang sedang diteliti. Sumber-sumber tersebut diperoleh antara lain dari arsip yang ada di Badan Arsip Kota Surabaya, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Stikosa Almamater Wartawan Surabaya (AWS), Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Timur, Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga Surabaya, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya,

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 180.

<sup>31</sup> Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentang, 1996), hlm. 91.



Perpustakaan Bappeda Jawa Timur, dan Perpustakaan Kota Surabaya. Didalam pengumpulan sumber-sumber tertulis, penulis memperoleh berbagai data diantaranya Lembaran Negara dan arsip-arsip yang berupa foto persiapan serta kampanye sebelum partai-partai politik tersebut bertarung pada pemilu 1955 sumber ini diperoleh dari Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Timur, kemudian sumber-sumber koran lama diperoleh dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Stikosa Almamater Wartawan Surabaya (AWS) serta koleksi dari Dr. Purnawan Basundoro S.S, M. Hum. Sedangkan sumber tidak tertulis berupa wawancara dengan orang-orang yang menjadi saksi sejaman yang mengalami dan turut terlibat langsung dalam Pemilihan Umum 1955. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap pengamat politik dan warga sipil yang mengetahui seluk beluk dan eksistensi Partai Syarikat Islam Indonesia. Hal itu dilakukan karena minimnya data yang diperoleh mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia khususnya wilayah Kota Besar Surabaya. Dalam pengumpulan data tersebut penulis mengalami kesulitan terutama dalam pengumpulan arsip-arsip, serta buku-buku yang membahas Partai Syarikat Islam Indonesia. Hal itu dikarenakan banyak arsip yang sudah hilang. Sedangkan dalam mencari arsip yang ada dalam instansi tertentu penulis mengalami kesulitan dalam hal ijin untuk mencari data, karena butuh proses terlebih dahulu dalam hal perijinan yang membuat penulis harus menunggu, selain itu buku-buku yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi mengenai eksistensi Partai Syarikat Islam Indonesia masih sangat jarang dan hanya membahas Sarekat Islam bukan Partai Syarikat Islam Indonesia secara khusus.

Ketiga, proses verifikasi atau kritik terhadap sumber. Pada tahap ini sumber-sumber diseleksi agar dapat digunakan dalam penelitian ini. Kritik sumber dilakukan dengan cara melakukan cross check terhadap sumber-sumber yang diperoleh dan menganalisisnya. Kritik sumber dibagi menjadi dua kritik yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik intern dilakukan penulis untuk menguji apakah pernyataan dapat dipercaya kebenarannya dari keterangan informan mengenai Partai Syarikat Islam Indonesia ataupun keterangan sumber lain yang menjelaskan seluk beluk Partai Syarikat Islam Indonesia. Kritik ekstern dilakukan penulis untuk memilah-milah sumber yang didapat dengan cara membandingkan sumber yang satu dengan yang lain, perbedaan dan persamaan yang ada karena penulis banyak menggunakan data-data berupa tulisan-tulisan yang ada di surat kabar dan metode wawancara. Sehingga, pada akhirnya dapat menjadi data yang mendekati objektivitas sejarah.

Keempat, proses interpretasi atau pengelompokan sumber-sumber yang telah diperoleh dan menganalisisnya. Pada tahap ini penulis mengambil unsur-unsur data yang dapat dipercaya kemudian akan di analisis. Sehingga terdapat pemahaman terhadap fakta sejarah berupa kajian pergulatan Partai Syarikat Islam Indonesia dalam Pemilihan Umum 1955 di Surabaya.

Tahap yang terakhir adalah historiografi atau penulisan, yaitu menyajikan hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan secara kronologis dan sistematis. Penulis tidak hanya mendeskripsikan namun juga berusaha menjelaskan sebab-akibatnya. Sehingga didapatkan jawaban-jawaban mengapa peristiwa itu terjadi dan pengaruh dari peristiwa tersebut.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Partai Syarikat Islam Indonesia: Pergulatan Politik Menuju Pemilu 1955 di Surabaya”, penulisan sejarah ini akan mengkaji beberapa hal yang terkait:

Bab I merupakan bab yang pertama dari penelitian ini meliputi hal-hal yang bersifat metodologis, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas gambaran umum mengenai situasi dan kondisi perpolitikan nasional dan lokal khususnya Kota Besar Surabaya menjelang Pemilihan Umum 1955, kemudian. Selain itu pada bab II ini memperlihatkan kondisi rakyat Surabaya dalam menyikapi sosialisasi pemilu yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Umum pada pemilu lokal di Surabaya.

Bab III membahas sejarah pembentukan Partai Syarikat Islam Indonesia, dimulai dari pembentukan partai, serta asas dan ideologinya. Kemudian berlanjut pada bagaimana eksistensi Partai Syarikat Islam Indonesia dalam rangka pemilu lokal DPRDS Kota Besar Surabaya, serta bagaimana perjuangan PSII menuju pemilihan Parlemen dan Konstituante yang berlanjut pada hasil yang diperoleh PSII dalam pemilu nasional di Kota Besar Surabaya.

Bab IV berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian.



## BAB II

## KONDISI POLITIK MENJELANG PEMILU 1955 DI SURABAYA

## A. Kondisi Perpolitikan Indonesia Sebelum Pemilihan Umum 1955

Pada permulaan tahun 1950 sampai dengan 1955 kondisi negara Indonesia dipenuhi dengan berbagai permasalahan khususnya masalah politik, dan sosial, yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi perpolitikan nasional pada masa-masa itu. Wacana mengenai penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan.

Dalam hal ini terdapat desas-desus mengenai kapan waktu yang tepat untuk mengadakan pemilu, karena masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia pasca bergulirnya Agresi Militer Belanda.

Selain karena adanya dampak baik sosial, politik maupun ekonomi dari Agresi Militer Belanda terdapat juga pertentangan yang dipicu oleh anggota parlemen lama dari sejumlah partai yang tidak setuju dengan adanya pemilu tersebut, karena menurut mereka pelaksanaan pemilu ditengah ketidak stabilan politik akan berdampak pada masyarakat luas.<sup>1</sup>

Selain itu terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang didalangi oleh

---

<sup>1</sup> Setelah Revolusi Fisik, pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbaiki tercukupinya kebutuhan rakyat yang mendasar, karena disebabkan lambannya proses pemulihan ekonomi pasca Agresi Militer Belanda serta perluasan kepentingan program-program pemerintah. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya hidup yang secara langsung berpengaruh besar terhadap kehidupan rakyat dimana inflasi terus berlanjut dengan masih belum stabilnya perekonomian pasca perang. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 358-359.

sejumlah perwira Angkatan Darat menjadi salah satu dari sekian banyak gelombang penolakan yang dilakukan oleh pihak aparat terhadap parlemen lama sebelum pemilihan agar segera mempercepat diadakannya pemilihan umum.<sup>2</sup>

Tujuan diadakannya pemilihan umum dalam rangka memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante, dari berbagai partai-partai yang terdaftar pada saat itu. Karena seluruh peluang dari partai-partai peserta adalah sama, sehingga banyak menarik minat tidak hanya partai-partai yang sudah ada sebelumnya, namun juga wakil-wakil perseorangan yang juga mendaftarkan diri pada pemilu yang akan datang tersebut.

Dalam pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 ini, pemilih diberikan tanggung jawab penuh dalam penentuan hak suara individu. Tanggung jawab pemilu berada dibawah pengawasan Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri, namun untuk penyelenggaraan tanggung jawab pemilu berada ditangan Panitia Pemilihan Indonesia yang tersebar diseluruh daerah pemilihan di Indonesia.<sup>3</sup>

Kelahiran partai-partai politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem Demokrasi Liberal Parlementer serta adanya Maklumat Politik Pemerintah, pada tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh wakil Presiden Mohammad Hatta yang berbunyi:

---

<sup>2</sup> Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999). hlm, 4

<sup>3</sup> Ibid., hlm, 6

Berhubung dengan usul Badan Pekeraja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itu hendaknja memperkuat perjuangannya mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa :

- a. Pemerintah menjukai timbulnya partai-partai politik karena adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat
- b. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.<sup>4</sup>

Kemudian Pemerintah menindak lanjuti dengan mengubah sistem pemerintahan yang semula menggunakan sistem Presidensiil kemudian berubah menjadi Demokrasi Parlementer, dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang menyebutkan.

“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang sangat ketat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi, yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab adalah didalam tangan menteri”.<sup>5</sup>

Dengan adanya pernyataan dan keputusan ini pemerintah Indonesia dinilai serius terhadap pembaharuan sistem politik di Indonesia kearah yang lebih demokratis.

Wakil-wakil partai politik pada masa itu menyambut dengan antusias

---

<sup>4</sup> Fatkhurrohman, Pembubaran Partai Politik di Indonesia: Tinjauan Historis Normatif Pembubaran PARPOL Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi, (Malang: SETARA Press, 2010), hlm. 89-90.

<sup>5</sup> Ibid

mengenai keputusan tersebut yang secara resmi memberikan peluang kepada partai-partai yang ada sebelumnya untuk berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasi politik serta ambisi masing-masing partai dalam memperebutkan suara mayoritas di pemerintahan, dengan syarat apabila partainya dapat menduduki kursi mayoritas pada masing-masing daerah pemilihan. lebih dari 40 partai dan perseorangan yang mengikuti pemilihan umum 1955 antara lain PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, PKI, PSII, dll

#### B. Kabinet-Kabinet sebelum Pemilu 1955

Kabinet pertama setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat adalah Kabinet yang dijalankan oleh Muhammad Natsir, kabinet ini dibentuk pada tanggal 21 Agustus 1950, Natsir sendiri adalah salah satu tokoh Masyumi<sup>6</sup> yang berhasil menduduki jabatan formatur kabinet atas pilihan Presiden Soekarno. Setelah adanya penunjukan tersebut, maka Natsir berusaha membentuk sebuah jajaran kabinet yang mencerminkan sifat nasional, dimana Natsir ingin semua partai pada masa itu untuk bekerjasama dalam kabinet yang disusunnya.

Namun ada beberapa permasalahan pada pembentukannya karena adanya keinginan dari PNI untuk diberikan jumlah kursi yang sama seperti yang diberikan Masyumi dengan jumlah kursi di parlemen berjumlah 18 kursi, dibagi rata antara Masyumi dan PNI masing-masing 4 kursi dan 10 kursi sisanya untuk

---

<sup>6</sup> Masyumi dipilih Presiden Soekarno karena jumlah suara dari Masyumi sendiri mayoritas di dalam parlemen, mengungguli jumlah suara partai lain.



partai-partai yang lain. Langkah ini diambil karena PNI merasa diperlakukan tidak adil. PSII sendiri memberikan pendapat bahwa PSII bersedia bekerjasama dalam menyusun program kabinet, maupun duduk dalam kabinet itu sendiri.<sup>7</sup>

Akhirnya setelah diadakan perubahan-perubahan yang mendasar pada formatur kabinet Natsir, pada tanggal 6 September 1950, Natsir menyampaikan daftar menteri yang akan duduk di dalam kabinetnya kepada Presiden Soekarno dan kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno dalam bentuk Keputusan Presiden Ri No. 9 Tahun 1950, dimana PSII yang sebelumnya mendukung kabinet tersebut mendapatkan jatah kursi di kementerian, dimana Harsono Tjokroaminoto menduduki jabatan Menteri Negara. Didalam kabinet Natsir ini sendiri, PNI dan PKI tidak diberi jatah kursi, ini merupakan sebuah tindakan yang sangat berani dari Natsir.<sup>8</sup>

Kabinet yang dibentuk Natsir dibubarkan karena hilangnya dukungan dari partai-partai kecil yang selama ini mendukungnya, selain itu beberapa masalah juga terjadi diantaranya adalah adanya pemberontakan yang terjadi di Kalimantan Selatan yang gerakannya berafiliasi dengan gerakan Darul Islam Kartosuwiryo, selain itu juga adanya permasalahan Irian Barat yang menjadi sengketa antara pemerintah Republik Indonesia, dengan Kerajaan Belanda, sehingga dengan adanya masalah ini sedikit menyita perhatian, perundingan perdamaian untuk

---

<sup>7</sup> P.N.H. Simanjuntak, Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 108-109.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 110-111.

menyelesaikan masalah ini pun berlanjut dengan diadakannya perundingan pada tanggal 4 September 1950 namun hasil akhirnya adalah kebuntuan.<sup>9</sup> Karena pemerintah Kerajaan Belanda tidak mau menyerahkan sejenkal pun tanah Irian kepada pemerintah Indonesia, kemudian pada tanggal 22 Desember 1950 Natsir mengajukan perundingan dengan tawaran yang lebih menggiurkan kepada Kerajaan Belanda, namun usul ini tetap ditolak oleh Belanda dengan berbagai alasan, yang akhirnya menurunkan pamor dari Natsir dan kabinetnya sendiri.<sup>10</sup>

Namun ada kemajuan yang diperoleh oleh Kabinet Natsir diantaranya diterimanya Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 60, yang diwakili oleh Mr. Mohammad Roem. Selain itu masalah Interim kabinet juga berpengaruh pada proses jatuhnya kabinet Natsir, diantaranya pengunduran diri dari Harsono Tjokroaminoto dari PSII karena tidak setuju dengan program yang dijalankan kabinet Natsir, selain itu adanya isu Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 mengenai pembentukan DPRD di Jawa dan Sumatera, dan menggantinya dengan Undang-undang yang lebih demokratis. Sehingga diajukanlah mosi untuk kabinet Natsir dengan sebutan Mosi Hadikusumo yang melahirkan suara diantaranya 76 suara<sup>11</sup> setuju dan 48 suara<sup>12</sup> menolak.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Sartono Kartodirdjo, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 85.

<sup>10</sup> Bibit Suprpto, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 131.

<sup>11</sup> Diantaranya yang setuju adalah PNI, PKI, Buruh Tani, PSII, PIR, Parindra, SKI, Parkindo, dan beberapa organisasi yang berhaluan kiri.

Kemudian setelah kabinet Natsir jatuh digantikan dengan kabinet Sukiman, dimana presiden Soekarno menunjuk wakil PNI untuk menduduki kabinet, dimana Mr. Sartono ditunjuk sebagai formatur kabinet setelah mendengar pendapat dari beberapa perwakilan partai besar, seperti pada masa kabinet Natsir. Namun langkah ini mendapat hambatan karena antara PNI dengan Masyumi ternyata berbeda pendapat dan sangat sulit untuk disatukan, karena masalah ini Sartono kesulitan dalam mengatur kabinet ini sehingga mandatnya kembali dikembalikan ke Presiden Soekarno.<sup>14</sup>

Akhirnya ada titik terang dimana Sukiman berhasil mengajukan usulnya dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu Masyumi dan PNI.<sup>15</sup> Wakil-wakil yang diikutsertakan dalam kabinet Sukiman antara lain berasal dari partai-partai yang terdiri dari Masyumi, PNI, Parkindo, PIR, Katolik, Buruh, Parindra, dan beberapa menteri yang berasal dari kabinet Natsir yaitu, M.A Pellaupessy, Djuanda, R.P. Suroso, Wachid Hasjim, dan Leimena.

Kabinet ini dibubarkan karena adanya masalah mengenai Mutual Security Act (MSA) dan diajukan interpelelasi oleh Mr. Djody Gondokusumo mengenai masalah tersebut. Pada zaman pemerintahan Kabinet Sukiman partai-partailah

---

<sup>12</sup> Perwakilan yang menolak diantaranya adalah Masyumi, Katolik, Partai Rakyat Nasional, Demokrat dan beberapa perwakilan non partai.

<sup>13</sup> Simanjuntak, op, cit, hlm. 113-115

<sup>14</sup> Simanjuntak, op, cit, hlm. 116.

<sup>15</sup> Salah satunya dengan syarat Natsir tidak menjadi Perdana Menteri pada kabinet Sukiman.

yang memegang pemerintahan diantaranya dari penyusunan program, pembagian portofolio, komposisi anggotanya serta pelaksanaan dan pemecahan masalah. Ini ironis karena sebenarnya presiden sebagai unsur konstitusi yang harusnya sedikit banyak mempengaruhi jalannya pemerintahan, namun arah kebijaksanaannya masih dipengaruhi oleh kekuatan antar partai yang berlomba dalam berebut kekuasaan dalam pemerintahan.<sup>16</sup>

Pada masa Sukiman terjadi juga peristiwa pemberontakan yang terjadi oleh Darul Islam yang berada di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Selain itu karena adanya tindakan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo mengenai Mutual Security Act, dimana Soebardjo menyampaikan nota kepada Duta Besar Amerika Serikat mengenai persetujuan dari pemerintah Indonesia terhadap hal-hal yang ditawarkan oleh Amerika Serikat<sup>17</sup>, tindakan ini merupakan sebuah blunder yang dilakukan kabinet Sukiman karena kesalah pahaman antara Ahmad Soebardjo dengan Kabinet Sukiman.<sup>18</sup> Oleh karena tindakannya ini maka Menteri Soebardjo mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Februari 1952, menyusul dua hari kemudian Kabinet Sukiman mengajukan pengunduran diri kepada Presiden

---

<sup>16</sup> Wilopo, *Zaman Pemerintahan Parta i-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*, (Jakarta: Yayasan Idayu, cetakan ke II, 1978, hlm. 24-25.

<sup>17</sup> Dengan adanya tindakan ini, menyalahi politik luar negeri Indonesia yang “Bebas Aktif” dimana tidak akan memihak salah satu Blok, dengan adanya nota tersebut maka secara tidak langsung Indonesia menyatakan dukungannya pada salah satu Blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat.

<sup>18</sup> Simanjuntak, *Op cit*, hlm. 123.



Soekarno, dan sejak saat itu pula Kabinet Sukiman bubar.

Setelah bubarnya Kabinet Sukiman yang dianggap demisioner, kemudian ditunjuk Kabinet baru yang dipimpin oleh wakil dari PNI yaitu Mr. Wilopo, awal mula terbentuknya kabinet ini karena adanya usaha dari wakil-wakil partai untuk membentuk kembali sebuah kabinet baru yang akan menangani pemerintahan. Setelah Presiden Soekarno mendengarkan pendapat dari para utusan partai-partai, maka Soekarno menunjuk Prawoto Mangkusasmito dan Sidik Djojokusarto yang keduanya berasal dari Masyumi serta PNI, mereka berdua berhasil menyusun program kerja kabinet namun mereka tidak berhasil dalam penyusunan anggota kabinet karena adanya perbedaan pandangan dari keduanya, kemudian mandat tersebut kembali di amanatkan kepada Presiden Soekarno, setelah mendapat mandat dari perwakilan sebelumnya, Soekarno kemudian segera membentuk formateur baru dibawah pimpinan Wilopo dari PNI.

Akhirnya Soekarno mengumumkan sebuah bentuk Kabinet baru pada tanggal 1 April 1952 yang diwakili oleh beberapa partai antara lain Masyumi, PNI, PSI, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, dan PSII<sup>19</sup> serta, beberapa menteri yang sebelumnya merupakan bekas dari Kabinet Sukiman diantaranya Arnold Mononutu, Suwanto, Djuanda, Iskandar Tedjasukmana, Leimena, dan R.P. Suroso.

Program yang dicanangkan oleh Wilopo adalah program yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan politik salah satunya adalah rencana untuk

---

<sup>19</sup> PSII diwakili oleh Anwar Tjokroaminoto yang menjabat sebagai Menteri Sosial.

mengadakan pemilihan umum untuk Konstituante, selain itu program lain yang berbasis kemakmuran rakyat juga dicanangkan dengan peningkatan produksi nasional<sup>20</sup>, pendidikan dan pengajaran, serta program yang berkaitan dengan urusan luar negeri yang bertujuan memantapkan posisi Indonesia dalam rangka menjalankan politik “Bebas Aktif”.<sup>21</sup>

Pada kabinet Wilopo, masalah politik yang terjadi yaitu dengan timbulnya beberapa permasalahan diantaranya adalah Tragedi Tanjung Morawa yang mengakibatkan jatuhnya korban rakyat sipil. Selain itu juga terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yang diakibatkan karena adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan maupun pucuk pimpinan Angkatan Darat yang berujung pada penangkapan anggota parlemen dan terjadinya demonstrasi yang dilakukan di beberapa kota di Indonesia.<sup>22</sup> namun pada masa kabinet Wilopo disahkan undang-undang yang mengatur tentang regulasi pemilihan umum yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 1953.<sup>23</sup>

Kabinet pengganti Wilopo adalah kabinet yang diketuai oleh Ali Sastroamidjojo yang kemudian disebut dengan Kabinet Ali jilid I. Didalam rapatnya dimana Presiden Soekarno ikut serta, partai-partai saling menyatakan

---

<sup>20</sup> Salah satunya adalah dengan menaikkan derajat kaum buruh yang tertindas, demi memantapkan usaha produksi nasional.

<sup>21</sup> Simanjuntak, Op, cit, hlm. 128-129.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 134.

<sup>23</sup> Rumidan Rabi'ah, Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

pendapatnya antara lain Masyumi yang menginginkan adanya Kabinet Presidensial yang diketuai Hatta, namun ditolak PNI, PNI sendiri menyatakan pendapat sebaiknya dibentuk sebuah kabinet yang ditangani oleh ahli namun tetap bertanggung jawab kepada parlemen. Dari berabagai partai yang mengikuti masing-masing menyatakan pendapatnya yang akhirnya malah membuat suasana menjadi semakin kacau<sup>24</sup>.

Setelah terjadi banyak pertentangan, maka pada tanggal 30 Juli 1953, kabinet baru disahkan oleh Presiden Soekarno yang diwakili oleh PNI, PIR, NU, PSII<sup>25</sup>, SKI, PRN, Partai Buruh, BTI, Parindra dan beberapa menteri dari kabinet Wilopo. Dalam pembentukan kabinet ini Masyumi tidak dilibatkan dan tidak mendapat jatah kursi di kabinet.

Program yang dicanangkan oleh Kabinet ini bermacam-macam diantaranya meliputi kemandirian dalam negeri, kemakmuran negara yang termasuk didalamnya adalah kemakmuran rakyat, organisasi negara, peraturan perundang-undangan, masalah Irian Barat, politik luar negeri serta diadakannya pemilihan umum yang dinanti-nantikan oleh rakyat yang berhasil pada kabinet Ali

---

<sup>24</sup> Ini dikarenakan adanya pengalaman oleh kabinet sebelumnya yang masih banyak meninggalkan masalah mendasar salah satunya adalah Peristiwa Tanjung Morawa.

<sup>25</sup> Didalam kabinet ini, PSII diwakili oleh Abikusno Tjokrosujoso, dan Sudibjo yang masing masing memegang Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Negara. Namun terjadi perombakan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I dimana sebelumnya Sudibjo yang merupakan wakil PSII diganti Wongsonegoro untuk jabatan Menteri Negara, kemudian Wongsonegoro mengundurkan diri dan terjadi kekosongan pada posisi wakil PM I dan Menteri Negara bercabang menjadi Menteri Negara Urusan Agraria dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Negara. Kemudian Dr. Lie Kiat Teng diangkat sebagai Menteri Kesehatan dari wakil PSII menggantikan F.L Tobing yang sebelumnya menjabat jabatan yang sama.

Sastroamidjojo jilid I ini.

Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh karena adanya pertentangan dari partai-partai oposisi yang merongrong kewibawaan kabinet tersebut, selain itu masalah dalam negeri yang semakin kacau dengan adanya gerakan Darul Islam di Aceh pimpinan Daud Beureuh, selain itu prestasi yang ditorehkan adalah adanya langkah penyelesaian dalam permasalahan Irian Barat, serta dihapuskannya Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 10 Agustus 1954, selain itu adanya peran aktif Indonesia di dunia internasional dalam meredakan gejolak Perang Dingin dengan memprakarsai KAA<sup>26</sup>. Masalah yang terjadi di dalam kabinet sebenarnya cukup kompleks, karena adanya ketidaksetujuan beberapa partai terhadap beberapa menteri yang terlalu mementingkan golongannya sendiri, salah satunya adalah yang terjadi pada Menteri Perekonomian Iskaq Tjokroadisurjo<sup>27</sup>.

Selain itu isu lain yang dipermasalahkan oleh partai oposisi adalah tentang diselenggarakannya pemilihan umum yang pada kabinet sebelumnya sudah dirancang dan direncanakan, Kabinet Ali Sastroamidjojo memberikan tenggat waktu selama 18 bulan, namun oleh partai-partai oposisi waktu 16 bulan dirasa terlalu lama, mereka berpikir bahwa waktu yang lama tersebut bisa saja

---

<sup>26</sup> KAA merupakan suatu upaya yang dilaksanakan Indonesia beserta India, Pakistan, Birma, Srilanka, dan beberapa negara lain dalam mencegah perang antara Blok Barat dengan Blok Timur yang pada saat itu mengancam keutuhan seluruh dunia internasional, karena adanya perebutan ruang ideologi antara Amerika Serikat dengan sekutunya melawan Uni Soviet dengan sekutunya setelah kemenangan mereka bersama dalam mengalahkan Jerman Nazi. Konferensi Asia-Afrika ini dilaksanakan pada tanggal 18-24 April 1955 yang diikuti sekitar 29 negara Asia dan Afrika.

<sup>27</sup> Masalah ini terjadi karena adanya semboyan dari Iskaq yaitu “dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional” yang menurut partai-partai oposisi merupakan sebuah langkah yang hanya menguntungkan orang-orang PNI.



dimanfaatkan oleh partai-partai pemerintah semisal PNI, PIR, dan NU untuk memenangkan kursi pemerintahan kembali, akhirnya semua dapat diselesaikan, karena tanggal pemilihan umum sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 29 September dan 15 Desember 1955. Selain dari partai oposisi, ternyata di dalam kabinet sendiri ada friksi yang terjadi diantaranya adanya kecaman NU dan PSII yang menginginkan digantinya menteri-menteri diantaranya menteri perekonomian, keuangan dan dalam negeri. Setelah terjadinya berbagai kecaman dari dalam dan dari luar, pada tanggal 24 Juli 1955, Kabinet Ali dinyatakan demisioner.

### C. Kondisi Politik Surabaya Sebelum Pemilu 1955

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, yang juga menyandang sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur yang kompleks baik secara kultural, sosial maupun politik sehingga, tidak salah apabila Surabaya menjadi basis suara yang menguntungkan bagi partai-partai yang berhasil memperoleh mayoritas suara dari masyarakat Surabaya pada pemilu 1955. Selain karena kultur budaya masyarakat Surabaya yang heterogen dan cenderung ke arah masyarakat urban,<sup>28</sup> dapat memberikan dampak positif dalam perkembangan unsur-unsur politik..

Pada awal tahun 1950 sebagian besar masyarakat Surabaya masih belum

---

<sup>28</sup> Howard Dick, *Surabaya City of Work: A Socio Economic History 1900-2000*, (Athens: Ohio University Press, 2002), hlm. 60-61.

akrab dengan adanya permasalahan politik, dikarenakan masyarakat masih berfokus pada masalah social dan ekonomi semenjak berakhirnya perjuangan revolusi, selain itu karena pada masa-masa tersebut, usaha mengenai penyelenggaraan pemilihan umum masih sekedar wacana bagi kabinet Muhammad Natsir.

Setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, terdapat pemilhan umum dimana dilaksanakan untuk memilih anggota pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang dilaksanakan di beberapa kota-kota Indonesia, salah satunya adalah di Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Surabaya dibentuk pada tanggal 4 Desember 1950, dan pada tanggal 7 Desember 1950 wakil-wakil rakyat yang duduk dalam perwakilan diresmikan. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara ini dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1950, yang berisi tentang diperlukannya pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahannya untuk seluruh daerah di Indonesia. Didalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa, tidak hanya wakil-wakil partai saja yang duduk dalam kursi DPRDS namun terdapat juga anggota perseorangan yang diikutsertakan dalam pemilihan DPRDS ini.<sup>29</sup>

Anggota DPRDS Provinsi Jawa Timur pada saat itu berasal dari beberapa

---

<sup>29</sup> Diantaranya adalah berbagai perwakilan dari beberapa organisasi buruh, petani, pemuda, wanita, dan sosial yang mewakili DPRDS pada periode tahun 1950-an.

perwakilan kabupaten atau kota diantaranya Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, dan Jombang. Surabaya sendiri karena merupakan ibukota provinsi, mendapat jatah sebanyak 35 orang bersama dengan Mojokerto yang mendapat jumlah yang sama.<sup>30</sup>

Kota Besar Surabaya sampai pada akhir bulan September tahun 1950 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 656.452 jiwa<sup>31</sup> yang dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan bumiputera dan golongan non bumiputera, yang tersebar di 6 kecamatan yaitu, kecamatan Krembangan, Kranggan, Kupang, Ketabang, Kapasan serta Nyamplungan, dari jumlah ini dalam pemilihan tersebut, dari satu suara diwakili oleh 10.000 suara.

Oleh karena itu jika dipandang dari sudut politis keunggulan jumlah satu suara dalam pemilihan sangat berharga sehingga jika dalam suatu perwakilan partai didalam pemerintahan suara yang ada tidak mencukupi atau kurang dari jumlah minimal suara, maka langkah yang ditempuh partai atau organisasi tersebut akan cenderung pasif. Seperti yang diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu gelanggang politik demi menempuh cita-cita kekuasaan dan nama besar partai didalam mendapatkan keunggulan dalam parlemen. Maka dari itu partai-partai yang berkompetisi akan berlomba mendapatkan suara terbanyak.

---

<sup>30</sup> Sjamsu Koesmen dan Pangestu B.W, Buku Petunjuk Kota Besar Surabaya, Surabaya: Djawatan Penerangan, 1957, hlm. 148.

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 149.

Dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Besar Surabaya ada beberapa hal yang menjadi kendala, diantaranya ada 7 partai atau organisasi yang masih belum mempunyai wakil. Dengan adanya permasalahan tersebut maka pemerintah dengan menunjukkan itikad baik memberikan tambahan 7 kursi pada partai-partai tersebut agar dapat bersama-sama duduk dalam kursi pemerintahan sehingga jumlah kursi dalam Dewan Perwakilan Daerah Sementara bertambah menjadi 32 kursi di dewan.

Dalam pemilihan ini beberapa partai yang ikut diantaranya adalah PNI, Parindra, Murba, PSI, Masyumi, Partai Banteng, Partai Rakyat, I.N.P., Parkindo, Partai Katholik, serta Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). PSII sendiri diwakili oleh Dachlan Kahar. Suara yang diperoleh PSII tidak cukup banyak karena PSII sendiri hanya memperoleh satu suara dalam pemilu lokal tahun 1950 di Surabaya.

Dengan adanya rencana mengenai akan diadakannya pemilihan umum oleh kabinet pada masa itu yaitu pada masa kabinet Ali Sastroamidjodo, rencana untuk memulai kampanye pun dilaksanakan, karena pada kabinet Ali ini rencana untuk melaksanakan pemilu sudah disetujui oleh pemerintah, sehingga tidak salah apabila pada tahun-tahun ini suasana semakin ramai dengan adanya rencana pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 1955.

Surabaya sebagai salah satu kota penyelenggara pemilu menyambutnya, karena masyarakat Surabaya yang telah terdaftar dapat terlibat secara langsung dalam pemilihan yang bersifat demokratis, karena pemilihan umum 1955



merupakan pemilihan nasional yang pertama kali yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Langkah-langkah yang ditempuh partai-partai politik pada masa itu adalah dengan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dimana tujuan dari masing-masing partai adalah mendapatkan kursi mayoritas di parlemen. Sehingga banyak dari partai-partai tersebut melakukan cara-cara agar partai-partai saingannya tidak memperoleh simpatisan.<sup>32</sup>

Semenjak adanya berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkup sosial maupun politik secara nasional, khususnya setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, masyarakat Indonesia perlahan-lahan mulai tertarik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia perpolitikan.. Masyarakat berbondong-bondong ikut larut secara langsung dalam organisasi-organisasi onderbouw partai maupun aktif langsung dengan partai-partai yang pada saat itu ada, dengan semangat masyarakat dalam menyambut pemilihan umum maka merekapun dapat merasakan atmosfer persaingan antar partai politik yang ada, tak ketinggalan juga masyarakat desa pun tertarik untuk ikut aktif berpolitik dalam organisasi yang didirikan oleh partai politik.<sup>33</sup>

Ketika dewan-dewan legislatif pada tingkat propinsi dan kabupaten

---

<sup>32</sup> Widjanarko Puspoyo, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009*, (Jakarta: Adicitra Intermedia, 2012), hlm. 43.

<sup>33</sup> Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977, Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1981) hlm. 70.

dibentuk di berbagai wilayah Jawa dan Sumatra sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39/1950, cabang-cabang partai atau afdeling partai yang ada di daerah dijadikan dasar perwakilan partai, karena dengan adanya cabang partai maka akan mempermudah tugas-tugas partai dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan partai dalam penyampaian ke masyarakat. Karena pertarungan partai yang ada telah sampai di daerah-daerah yang lingkupnya lebih kecil, dan berpengaruh pada pemilihan dan pengangkatan kepala daerah di daerah tersebut.<sup>34</sup>

Metode yang digunakan partai-partai peserta pemilu pada saat itu beragam, hal ini dilakukan demi menarik simpati warga masyarakat Surabaya, metode yang umum digunakan adalah mendatangkan pimpinan-pimpinan partai dan organisasi, mengadakan rapat dan pertemuan yang melibatkan kawula muda, ceramah umum di lapangan, pemutaran film, perayaan ulang tahun partai, perayaan hari besar agama serta pertunjukan teater rakyat seperti ludruk dan wayang yang menjadi kesenian yang digandrungi masyarakat Surabaya pada saat itu.<sup>35</sup> PSII sendiri pada masa itu menggunakan metode yang lebih bersifat keagamaan dengan memanfaatkan ideologi Islam sebagai penarik simpati massa pada saat itu.

Dengan maksud untuk memperoleh dukungan suara yang besar maka partai-partai politik sibuk memperluas pengaruh pada kelompok-kelompok sosial

---

<sup>34</sup> Herbert Feith, *Pemilihan Umum di 1955 Di Indonesia*, (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm 12

<sup>35</sup> Rendy Radyatma, *Skripsi Pertarungan Kampanye PKI, Nahdlatul Ulama, Dan Masyumi Menjelang Pemilu 1955 Di Surabaya*, (Surabaya; Universitas Airlangga, 2014), hlm. 34.

yang kuat, sehingga persaingan-persaingan yang terjadi pada saat itu paling banyak terjadi di kota-kota besar, kota karesidenan dan kota kabupaten<sup>36</sup> tidak terkecuali yang terjadi di Surabaya.

Pemasangan tanda gambar sebagai salah satu sarana para kader untuk mengenalkan partainya menjelang pemilihan umum, pemasangan tanda-tanda gambar berukuran besar di sudut-sudut jalan protokol di Surabaya<sup>37</sup> serta lembaran pamflet-pamflet yang ditempel di transportasi umum, jalan-jalan kota serta desa, bangunan-bangunan umum maupun pemerintahan, serta iklan-iklan yang terdapat pada surat kabar, kalender, maupun bioskop.<sup>38</sup>

Dalam mencapai ambisi kekuasaannya antar anggota partai memberikan dukungan yang seluas-luasnya demi eksistensi partainya pada Pemilihan Umum yang akan datang, salah satunya adalah persaingan yang dilakukan oleh PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI dengan slogan-slogan mereka yang persuasif maupun yang intimidatif diantaranya adalah yang diutarakan oleh PKI dimana mereka menyuarakan slogan yang berbunyi PNI partai priyayi, Masyumi dan NU partai santri, tetapi PKI adalah partai rakyat.<sup>39</sup> Hal ini berkaitan langsung dengan PSII yang notabene merupakan partai yang berbasis Islam, persaingan

---

<sup>36</sup> op.cit , hlm 11

<sup>37</sup> Kumpulan Foto Koleksi Djapen, Jalan Raya Penuh Dengan Tanda Gambar Peserta Pemilu Surabaya , nomor IA-55, 204

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 22.

<sup>39</sup> Ibid, hlm 22.

diantara merekapun merupakan hal yang biasa pada masa-masa sebelum pemilihan umum.

PKI adalah salah satu partai yang agresif dalam berkampanye, salah satunya dengan menggerakkan beberapa elemen dalam partai diantaranya diantaranya dari Komite Seksi (CS) di tingkat Kota Besar, Komite Sub Seksi (CSS) dan Komite Ranting (CR) serta dari lingkungan pabrik<sup>40</sup> selain melalui pertemuan-pertemuan dengan anggota partai, PKI juga melakukan pemasangan tanda gambar partai di kampung-kampung yang kadang menimbulkan gesekan-gesekan dengan warga masyarakat atau dengan partai lain khususnya Masyumi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di kelurahan Kebondalem dimana warga masyarakat disana tidak mau di PKI-kan.<sup>41</sup>

Selain itu, banyak hal dilakukan oleh partai-partai peserta pemilu demi mendapatkan simpati massa pada saat kampanye diantaranya adalah dengan melihat pranata-pranata sosial yang berlaku di masyarakat, antara lain dengan mendirikan organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi sosial yang tidak bisa dijalankan masyarakat khususnya pada masyarakat pedesaan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Sri Margana dan M. Nursam (ed), Kota-kota di Jawa : Identitas Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial dalam artikel Memerahkan Kota Pahlawan : Pergulatan Partai Komunis Indonesia di Kota Surabaya 1955-1965 oleh Purnawan Basundoro (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 272.

<sup>41</sup> Ibid, hlm 272-273.

<sup>42</sup> Ibid, hlm 54.



#### D. Sosialisasi dan Persiapan Pemilu di Surabaya

Demi mencapai terselenggaranya pemilu dengan lancar, maka diadakanlah sosialisasi pemilu yang bertempat di beberapa gedung-gedung pemerintahan Kota Besar Surabaya, sosialisasi ini diadakan demi tercapainya kelancaran dalam proses pemilu, dalam hal ini masyarakat Surabaya antusias dengan sosialisasi yang diadakan oleh Panitia Penyelenggara Pemilu Kota Besar Surabaya.

Dalam satu kesempatan pembicara membicarakan hal-hal yang akan terjadi selama pemilu dan tata cara dalam memilih calon-calon anggota parlemen dan konstituante, masyarakat menyambutnya dengan antusias terlihat dengan ramainya gedung tersebut oleh elemen masyarakat Surabaya, sosialisasi mengenai Pemilihan Umum 1955 ini terlihat pada foto koleksi Arsip Jawa Timur tertanggal 16 Januari 1954.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Koleksi Foto Djawatan Penerangan : 1A 54.33 dan 1A 54.34 dalam buku Pemilu 1955 di Jawa timur: Dalam Kumpulan Foto (Surabaya: Badan Arsip Provinsi Jawa Timur, 2003) hlm. 15.

Gambar 2.1  
Sosialisasi Pemilihan Umum di Kota Surabaya tahun 1954



Seorang pembicara dalam sosialisasi pemilu secara serentak, 16 - 1 - 1954. (Koleksi Djapen : 1A.54.33)



Suasana sebuah gedung ketika diadakan sosialisasi serentak pemilu, 16 - 1 - 1954. (Koleksi Djapen : 1A. 54. 34)

Sumber: Arsip Djawatan Penerangan (1A.54, 33 & 34)

Selain itu pemerintah dalam kapasitasnya sebagai panitia penyelenggara pemilu melakukan peraturan pemungutan suara yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei 1954 yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih P3. Jangka waktu dalam

pendaftaran pemilih adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. 1 Mei – 15 September 1954,

Dimulai pendaftaran pemilih dimana petugas pendaftar mendatangi rumah-rumah pemilih.

2. 1 Oktober – 1 November 1954

Daftar-daftar pemilih sementara diumumkan, pemilih-pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada kantor P3.

3. 15 November – 22 September 1954

Sesudah pengesahan daftar pemilih, pemilih-pemilih yang belum tertajat diberi kesempatan mendaftarkan dalam daftar tambahan.

Dengan dilaksanakannya persiapan dalam menghadapi pemilihan umum yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 29 September 1955 maka pemerintah provinsi Jawa Timur yang berkantor di Kota Besar Surabaya, akan melaksanakan pendistribusian kotak suara dan sosialisasi pemilihan umum yang tersebar di seluruh provinsi, tak terkecuali di tempat-tempat terpencil seperti di Madura dan pulau-pulau sekitarnya.

Maka dari itu Achmad Sjaichu selaku anggota Panitia Pemilihan Jawa Timur sesuai dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur akan mendapatkan tiga puluh empat buah mobil dan satu buah kapal bermotor yang akan digunakan sebagai transportasi yang akan digunakan oleh panitia PPU

---

<sup>44</sup> Sjamsu Koesmen, op, cit, hlm.190.

selama berlangsungnya pemilihan umum yang akan dilaksanakan dua kali tersebut.<sup>45</sup>

Petugas-petugas yang dipilih selain dari panitia juga ada dari wakil-wakil partai yang ditunjuk oleh partai untuk membantu terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis. Namun nyatanya ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kader partai tersebut.

Penunjukan panitia pemilihan umum telah dibentuk, yaitu dengan menunjuk beberapa anggota yang berasal dari partai-partai besar, yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri, dimana Walikota Kota Besar Surabaya ditunjuk sebagai Ketua, kemudian R. Poeger (PNI-Wakil Ketua), R. Moh. Selamat Poespodiwirjo (Masyumi-Anggota), H. Abdullah Faqih (Nahdlatul Ulama-Anggota), Soenarjo Umar Siddiq (PRI-Anggota), Doeladi Adikusumo (PSI-Anggota) serta Moh. Sarkawi Prasetya (PKI-Anggota). Instruksi ini berdasarkan pasal 22 Undang-Undang No.7 tahun 1953 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>46</sup>

Selain itu petugas akan disebar ke seluruh provinsi untuk melancarkan terselenggaranya pemilihan umum, fasilitas yang disediakan oleh panitia pemilihan umum selain mobil dan kapal boot adalah sepeda onthel yang digunakan untuk perhubungan jarak dekat. Jumlah yang disediakan oleh panitia

---

<sup>45</sup> “Djawa Timur akan dapat 34 mobil dan 1 motor-boot untuk tugas pemilihan umum”, dalam Terompet Masjarakat, edisi 10 Djanuari 1955.

<sup>46</sup> Surabaya Post, “Panitia Pemilihan S’baja telah terbentuk, Dari Partai-partai besar tapi sebagai perseorangan”, edisi 26 November 1953.



lebih kurang 3000 unit.<sup>47</sup>

Gedung yang akan digunakan sebagai kantor pemilu berada di Balai Harta Peninggalan Kota Besar Surabaya Dewan Perwalian Surabaya yang membawahi beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur.<sup>48</sup>

Gambar 2.2  
Gedung Balai Harta Peninggalan yang menjadi Kantor Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya tahun 1954



Kantor Pemilu 1955 Jawa Timur di Balai Harta Peninggalan Dewan Perwalian Surabaya (Koleksi Djapen : 55)

Sumber: Arsip Djawatan Penerangan

Antusiasme masyarakat Surabaya dalam menyambut waktu pendaftaran pemilih dirasa masih kurang, dikarenakan para panitia pemilihan umum banyak

---

<sup>47</sup> Ibid, "Djawa Timur akan dapat....

<sup>48</sup> Koleksi Foto, Op,cit, hlm. 3.

yang kecewa dengan sambutan masyarakat di daerah perkotaan.

Salah satu contohnya adalah petugas-petugas banyak mendapati beberapa rumah yang kosong dan sengaja ditinggalkan oleh para penghuninya. Namun petugas PPU tidak kehilangan akal, mereka akan meninggalkan pesan berupa surat pemberitahuan kepada pemilik rumah, agar segera datang ke kantor Panitia Pendaftaran Pemilih untuk didaftarkan namun setelah beberapa hari ditunggu, hanya sedikit dari mereka yang datang ke kantor PPU tersebut untuk didaftarkan sebagai pemilih.<sup>49</sup>

Berbeda dengan antusiasme warga perkampungan di Surabaya yang menyambut positif akan kedatangan para petugas pendaftaran. Petugas tidak kesulitan dalam mendatangi satu persatu rumah warga dikarenakan antusiasme warga perkampungan di Surabaya yang tinggi, dibandingkan dengan warga perkotaan Surabaya.

Selain dikarenakan tingginya antusiasme warga perkampungan, faktor lain yang mendukung adalah kemudahan akses ke lokasi sosialisasi karena letaknya berdekatan ladang-ladang dan sawah milik warga perkampungan, sehingga petugas dapat dengan mudah mendata dan mendaftarkan warga perkampungan untuk mendapatkan hak suara mereka dalam pemilihan umum 1955. Berbeda dengan warga perkotaan yang cenderung larut dalam kesibukan pekerjaan sehingga petugas cenderung menemui kendala dalam pendataan dan

---

<sup>49</sup> Sjamsu Koesmen *ibid*, hlm. 190.

pendaftaran.<sup>50</sup>

Warga kampung-kampung di Surabaya merasa dengan kedatangan petugas menyampaikan segala keluhan-kesah yang berkaitan dengan apa yang mereka hadapi selama ini, terutama mengenai permasalahan sosial dan ekonomi yang berada di kampungnya.<sup>51</sup> berbeda dengan sebagian besar masyarakat perkotaan yang cenderung acuh terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia politik. Jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap berdasarkan catatan Panitia Pemilihan dan Pendaftaran Kota Besar Surabaya sebanyak 367.791 pemilih.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 190.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bey Arifin, pada tanggal 25 Januari 2016 di Kantor Cabang Sarekat Islam Surabaya.Jl. Padmosusastro No 23 Surabaya

<sup>52</sup> Sjamsu Koesmen, Ibid, hlm. 191.

### BAB III

#### PERGULATAN PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA PADA PEMILU 1955 DI KOTA BE SAR SURABAYA

##### A. Awal Mula Pembentukan PSII

Partai Syarikat Islam Indonesia merupakan pengembangan dari organisasi Sarekat Islam yang sudah berdiri sejak tahun 1905, dan menjadi salah satu partai dari beberapa partai yang menjadikan Islam sebagai basis ideologi pada pemilu 1955, selain Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PERTI.

Dalam perkembangannya Sarekat Islam merupakan salah satu pelopor dari berbagai gerakan kebangsaan di Indonesia, bersama dengan Budi Utomo. Sarekat Islam sendiri mengambil Islam sebagai basis ideologi, berbeda dengan Budi Utomo yang bersifat kedaerahan. Sarekat Islam bersifat transprimordial, multietnik, serta ideologis, dimana sebagai gerakan masif Islamis, Sarekat Islam berperan dalam menentang segala bentuk penjajahan dan perlakuan tidak adil oleh bangsa-bangsa asing.<sup>1</sup>

Dengan semakin banyaknya anggota yang bergabung kedalam Sarekat Islam, dan arah gerakan politik semakin jelas dalam membela hak-hak kaum pribumi maka pada tahun 1930, Sarekat Islam melebur menjadi sebuah gerakan politik yang kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia.

---

<sup>1</sup> Valina Singka Subekti, Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elite, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 1.



Pada masa-masa awal pembentukannya banyak tokoh yang berasal dari Partai Syarikat Islam Indonesia, diantaranya adalah Haji Agus Salim, Abdul Muis, Arudji Kartawinata, Mohammad Roem, Abu Hanifah, Anwar Tjokroaminoto, dan Harsono Tjokroaminoto<sup>2</sup> mereka semua adalah negarawan terkemuka dan menjadi tokoh kebangsaan Indonesia.

Berdirinya Sarekat Islam tidak bisa dilepaskan dengan adanya Sarekat Dagang Islam yang merupakan organisasi dagang yang menaungi pengusaha batik Jawa dalam persaingan dagang dengan pengusaha Cina<sup>3</sup>, yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di Surakarta Jawa Tengah.<sup>4</sup> Kemudian pada tahun 1909 berdiri juga cabang Sarekat Dagang Islam di Batavia dan Buitenzorg (Bogor) oleh R.M. Tirtoadhisuryo. Selang tiga tahun kemudian H.O.S. Tjokroaminoto yang dibantu oleh Hasan Ali Sur'ati mendirikan cabang yang sama di Kota Surabaya. Pada masa kepemimpinan dari Tjokroaminoto lah

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 2.

<sup>3</sup> Pedagang-pedagang Cina mengambil banyak keuntungan dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, terutama komoditi kain Batik yang dijual juga oleh para pedagang-pedagang dari Jawa, pada saat itu pedagang Cina memegang peranan sebagai pemilik sekaligus penjual kain Batik, sedangkan pedagang Jawa tidak dapat menjual sendiri bahkan mau tidak mau harus membeli ke pedagang Cina, hal inilah yang menimbulkan gesekan dengan pedagang-pedagang Jawa.

<sup>4</sup> Banyak versi yang meragukan akan hari kelahiran dari Sarekat Islam, menurut beberapa versi kelahiran Sarekat Islam adalah sesudah berdirinya organisasi Budi Utomo, namun seperti yang dikutip dari pernyataan Haji Samanhudi sendiri selaku founding father dari Syarikat Dagang Islam adalah tanggal 16 Oktober 1905 berikut adalah kutipan dari Haji Samanhudi sendiri; "Dengan Ikhlas untuk kemurnian sejarah pergerakan Indonesia dengan ini saya terang kan bahwa SDI lahir pada tanggal 16 Oktober 1905 di rumah saya di kampung Sondakan, Solo dengan delapan orang teman, yaitu: Saudara Sumowardoyo, Wiryotirto, Suwandi, Suropranoto, Jarmani, Harjosumarto, Sukir, dan Martodikoro". M.A. Gani, Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 1984), hlm. 10.

Sarekat Islam dapat berkembang pesat dan menjadi organisasi yang berpengaruh dan mempunyai jumlah keanggotaan massa hingga mencapai ratusan ribu orang.<sup>5</sup>

Namun ada pendapat lain yang beranggapan bahwa Tjokroaminoto merupakan salah satu tokoh yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya organisasi Sarekat Islam, yaitu karena selain peran dari Tjokroaminoto, Sarekat Islam merupakan sebuah gerakan modern Islam yang memindahkan peran dan karisma ulama dan kyai yang biasanya memiliki banyak pengikut dari kalangan perdesaan berubah menuju ke arah perkotaan akibat adanya organisasi Sarekat Islam, karena pendapat umum mengatakan bahwa Tjokroaminoto dianggap sebagai Ratu Adil yang sangat memegang peranan dalam menggerakkan pertumbuhan jumlah anggota Sarekat Islam pada masa itu.<sup>6</sup>

Cabang Sarekat Islam Surabaya mendirikan sebuah gerakan Jawa Dwipa dimana menentang penyebutan-penyebutan feodal seperti penyebutan Raden, Raden Mas, Bendoro dan lain-lain, hal ini dilakukan karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dengan terlalu mengistimewakan manusia.<sup>7</sup>

Perubahan nama Sarekat Islam menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia melalui beberapa tahap diantaranya dengan diselenggarakannya kongres Natico (National Indische Congress) yang diadakan di Surabaya pada tahun 1921<sup>8</sup> yang

---

<sup>5</sup> Dony Fahamsyah Setia Budi, *Dinamika Sarekat Islam Surabaya (1912-1921)*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Ilmu Budaya, 2012), hlm. 24.

<sup>6</sup> Mohammad Iskandar dkk, *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Putra Prima, 2000), hlm. 48.

<sup>7</sup> M. Masyhur Amin, *Syarikat Islam: Obor Kebangkitan Nasional 1905-1942*. Yogyakarta: Al Amin Press, 1996, hlm. 41.

<sup>8</sup> Kongres Natico atau National Indische Congress dilaksanakan dalam enam tahap, pada tahap pertama yang dilangsungkan pada tanggal 17-24 Juni 1916 berhasil mengumpulkan

merubah haluan organisasi menjadi sebuah partai dan merubah namanya menjadi Partai Syarikat Islam Hindia Timur,<sup>9</sup> dalam hal ini pemakaian dan penggunaan kata nasional dalam pertemuan resmi organisasi, mencerminkan adanya upaya dari para pemimpin Sarekat Islam untuk menyebarkan dan menegakkan cita-cita sebagai suatu bangsa yang bersatu selain itu adanya upaya dari para pemimpin Sarekat Islam agar orang-orang pribumi dapat secara aktif ikut berpolitik.

Kemudian setelah diadakannya Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian dua tahun setelahnya yaitu pada tahun 1930 Partai Syarikat Islam Hindia Timur berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, dengan penggantian nama menjadi Indonesia yang sebelumnya menggunakan nama Hindia Timur, menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa garis ideologi perjuangan Partai Syarikat Islam berasaskan kebangsaan Indonesia.

Seperti yang diketahui Sarekat Islam merupakan organisasi tertua yang mampu bertahan melalui empat masa, yaitu masa kolonial, masa Orde Lama, masa Orde Baru, kemudian masa awal reformasi.<sup>10</sup> Dimana pada masa awal reformasi Partai Syarikat Islam Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu; Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 dimana

---

perwakilan Sarekat Islam lokal sebanyak 80 perwakilan cabang yang mewakili sebanyak 380.000 anggota, dari kongres pertama ini memutuskan bahwa Tjokroaminoto bertindak sebagai ketua, dan Abdul Muis bertindak sebagai wakil ketua.

<sup>9</sup> Pemakaian nama Hindia Timur ini dipakai karena belum adanya kesepakatan mengenai kata Indonesia sebagai sebuah bangsa oleh organisasi-organisasi pada masa itu, pemakaian kata Indonesia secara resmi digunakan setelah adanya Kongres Pemuda dan dilaksanakannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang memakai kata Indonesia sebagai sebuah kesatuan tanah air, bahasa, bangsa.

<sup>10</sup> op.cit, hlm. 33.

keduanya mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999 pasca jatuhnya rezim Orde Baru.<sup>11</sup>

Ideologi yang digunakan oleh Partai Syarikat Islam Indonesia adalah ideologi yang berasaskan Islam dimana dalam hal ini partai mengedepankan prinsip-prinsip dasar keislaman sebagai dasar ideologi dan tujuan partai. Islam digunakan oleh para elite-elite<sup>12</sup> partai sebagai jalan dalam menjaring massa yang sebanyak-banyaknya, seperti yang diketahui bahwa Islam adalah agama mayoritas di Indonesia sampai sekarang. Maka dari itu Partai Syarikat Islam Indonesia memanfaatkan jumlah mayoritas penduduk Indonesia sebagai sebuah langkah yang menguntungkan dalam menarik simpati massa.

Dalam hal ini Partai Syarikat Islam Indonesia mempunyai dua pokok pikiran utama yang tertuang dalam Program Asas dan Program Tandhim.<sup>13</sup>

Program Asas berisi mengenai pokok-pokok pikiran mengenai ideologi perjuangan yang harus dipegang teguh oleh aktivis Partai Syarikat Islam Indonesia dalam, dalam melakukan gerakan-gerakan organisasi. Diantaranya berisi:

---

<sup>11</sup> Ini dibuktikan dengan adanya keikutsertaan Partai Syarikat Islam Indonesia pada Pemilu 1998, dimana terjadi dualisme partai antara PSII 1905 yang dipimpin oleh Drs. H. Ohan Sudjana dan PSII pimpinan dari Taufiq R. Tjokroaminoto, bahkan sampai saat ini masih terdapat organisasi yang mengatasnamakan Sarekat Islam yang merupakan kelanjutan organisasi Sarekat Islam yang terdahulu, namun dengan jumlah massa yang tidak begitu besar. [www.seasite.niu.edu](http://www.seasite.niu.edu) diakses pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 19.57.

<sup>12</sup> Definisi dari kata elite menurut Mills (Johnson; 1994) adalah mereka yang menduduki posisi atas dalam institusi ekonomi, militer dan politik, membentuk kurang lebih elite kekuasaan yang terintegrasi dan terpadu yang keputusan-keputusan pentingnya menentukan struktur dasar dan arah masyarakat. (Jurdi: 2004) Fajlurrahman Jurdi, Aib Politik Islam: Perselingkuhan Binal Partai- partai Islam Memenuhi Hasrat Kekuasaan, (Yogyakarta: antonyLib-Indonesia, 2009), hlm. 41.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Djarot pada tanggal 25 Januari 2016 di Kantor Cabang Sarekat Islam Surabaya, Jl. Padmosusastro no 23 Surabaya.



Persatuan umat Islam, Kemerdekaan umat, Sifat negara dan pemerintahan, Penghidupan ekonomi, Keadaan derajat manusia di dalam pergaulan hidup bersama dan di dalam hukum, Kemerdekaan sejati masing-masing butir mempunyai pengertian tersendiri;

Butir pertama dijelaskan bahwa cita-cita dari Partai Syarikat Islam Indonesia adalah menginginkan adanya persatuan di kalangan umat Islam dengan jalan mendirikan sebuah partai yang menyatu-padukan umat Islam Indonesia dalam satu wadah yang dapat menyalurkan aspirasi dan cita-cita segenap masyarakat Islam Indonesia.

Butir kedua menjelaskan demi mencapai sebuah tujuan, maka umat Islam harus dapat membebaskan diri dari belenggu penjajahan dengan jalan mencapai sebuah kemerdekaan dan kemandirian bangsa.

Butir ketiga menjelaskan bahwa negara Indonesia merdeka yang berdemokrasi adalah negara yang mengutamakan kepentingan rakyat dan dijalankan dengan asas musyawarah melalui majelis perwakilan rakyat.

Butir keempat mengenai harus dihilangkannya sistem kapitalisme yang berujung pada kesengsaraan rakyat, maka dari itu SI akan berjuang dalam melawan kapitalisme.

Butir kelima menegaskan bahwa derajat manusia adalah sama, baik di lingkungan pergaulan maupun hukum.

Butir keenam menegaskan bahwa SI akan berjuang dengan segenap tenaga dalam menegakkan kemerdekaan rakyat Indonesia yang sejati yang mencakup persamaan dan persaudaraan antar manusia.<sup>14</sup>

Selain itu terdapat juga program Tandhim atau program jangka panjang yang menekankan upaya Partai Syarikat Islam Indonesia dalam rangka mencapai cita-cita kemasyarakatan seperti yang sudah tertuang dalam program Azas. Dalam program Azas terdapat landasan trilogi yaitu "Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepanda i-pandainya siasah" yang dicetuskan oleh Tjokroaminoto sebagai landasan organisasi. Dalam program Tandhim juga

---

<sup>14</sup> Dikutip dari Valina Singka Subekti, op cit, hlm. 34.

mencakup masalah kebijakan pokok PSII diantaranya mencakup bidang agama, politik, kehidupan rakyat, pergaulan hidup bersama, pengajaran serta pendidikan. Diantara keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi.<sup>15</sup>

Landasan ideologis ini menjadi panutan bagi kader-kader PSII dalam mencerminkan kehidupan pada masa itu yang penuh gejolak dan menunjukan bahwa PSII merupakan sebuah organisasi yang anti kolonial dan berjuang demi tegaknya ideologi Islam di Indonesia. landasan ini tetap digunakan sampai pada masa Indonesia merdeka, dimana dicerminkan pada setiap kader-kader Partai Syarikat Islam di masa-masa mendatang.

#### B. Bergabungnya PSII kedalam MIAI

Semenjak Belanda jatuh ke tangan tentara Jerman pada bulan Mei 1940 maka kedudukan Belanda di tanah jajahan menjadi semakin rapuh karena tidak adanya kestabilan politik di Hindia Belanda, secara tidak langsung terjadi kekosongan kekuasaan pada pemerintahan Hindia Belanda, selain itu berdampak pada pecahnya perang Asia Timur Raya yang dimulai oleh Jepang yang menimbulkan akibat buruk bagi bangsa Indonesia ke depannya selain itu dengan adanya pendudukan Jepang memudahkan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Tentara Jepang berhasil datang ke Surabaya pada tanggal 3 Februari 1942, atas tindakan tentara Jepang itu maka Jenderal Ter Poorten mengibarkan bendera putih tanda menyerahnya Belanda pada kekuasaan Jepang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 35

<sup>16</sup> Barlan Setiadijaya, 10 November 45: Gelora Kepahlawanan Indonesia, (Jakarta: Yayasan Dwiwarna, 1991), hlm. 73.

Dengan masuknya Jepang, maka dimulailah pendudukan Jepang atas Indonesia yang berlangsung selama tiga setengah tahun (1942-1945) dalam masa-masa pendudukan Jepang, organisasi-organisasi yang sebelumnya dibentuk banyak dilarang karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dalam pemerintahan pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Organisasi-organisasi yang dibekukan juga termasuk yang berkaitan dengan organisasi keagamaan khususnya organisasi Islam yang ada pada saat itu termasuk PSII.

Setelah beberapa bulan menguasai Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang merasa perlu merangkul bangsa Indonesia demi kepentingan Jepang sendiri yaitu dengan cara menarik simpati rakyat Indonesia, salah satunya yaitu dengan dibentuknya organisasi yang menaungi masyarakat Islam Indonesia<sup>17</sup> yaitu dengan dibentuknya Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, setelah sebelumnya tergabung dalam Majelis Islam A'la Indonesia.<sup>18</sup>

MIAI sendiri merupakan gabungan dari beberapa organisasi Islam yang ada di Indonesia, kecuali NU dan Muhammadiyah.<sup>19</sup> diantaranya adalah PSII yang ikut bergabung dengan MIAI. daripada dibekukan oleh pemerintahan Jepang, maka pihak PSII sepakat untuk menuruti apa yang Jepang inginkan yaitu menggabungkan diri dengan Masyumi sebagai langkah antisipasi dalam

---

<sup>17</sup> Motif utama yang dilakukan Jepang dalam propagandanya terhadap bangsa Indonesia adalah karena Jepang menyadari bahwa gerak maju pasukannya tidak dapat diimbangi apabila hanya mengandalkan orang Jepang saja, maka demi mencapai tujuannya dibentuklah organisasi kemiliteran yang sifatnya semi-militer salah satunya yang terkenal adalah Heiho.

<sup>18</sup> B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hlm. 13.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 14.

menghadapi langkah ini diambil karena hanya dengan jalan ini pemerintahan pendudukan dapat mengontrol organisasi-organisasi Islam yang sewaktu-waktu bisa saja menyusahkan Jepang sendiri.<sup>20</sup>

Selain itu dengan berpindahnya organisasi-organisasi Islam pada masa itu memang sesuai kondisi, dimana para pimpinan partai dapat memfokuskan diri pada usaha-usaha untuk segera mempercepat proses kemerdekaan. Kondisi ini diambil setelah mengetahui arah peperangan yang terjadi, di sisi lain terdapat janji kemerdekaan dari Jepang<sup>21</sup> yang semakin memberikan semangat bagi pemimpin-pemimpin untuk menyatukan suara demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Setelah Jepang terusir dari Indonesia, maka mulai timbullah perpecahan diantara anggota Masyumi, salah satunya adalah sikap PSII yang menginginkan keluar dari Masyumi. PSII sendiri ingin melanjutkan kiprah politiknya dibawah tokoh-tokohnya yaitu Wondoamiseno dan Arudji Kartawinata yang merupakan tokoh progressif dari PSII. Usul ini diterima oleh keseluruhan kader-kader dan PSII di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Surabaya. PSII sendiri keluar dari Masyumi pada bulan Juli 1947.<sup>22</sup> Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dikalangan elite partai, dimana di satu sisi PSII sebagai sebuah organisasi statusnya tidak dapat dibubarkan ataupun dilebur kedalam suatu organisasi, selain itu dari beberapa pucuk pimpinan Masyumi yang sebelumnya merupakan anggota PSII menginginkan PSII menjadi organisasi aktif yang independen terlepas dari

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bey Arifin, pada tanggal 25 Januari 2016 di Kantor Cabang organisasi Syarikat Islam Surabaya, di Jalan Padmosusastro no 23, Surabaya.

<sup>21</sup> B.J Boland, op.cit, hlm 18.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 48.



Masyumi, dan berlanjut kemudian pada tahun-tahun berikutnya, dimana PSII mengikuti pemilihan umum lokal yang berlangsung di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Kota Besar Surabaya.

### C. PSII pada Pemilu 1955 di Kota Surabaya

#### 1. Pemilihan DPRDS Kota Surabaya Langkah Awal PSII Menuju Pemilu 1955

Sebelum diadakannya pemilihan umum yang pertama di Indonesia yang diadakan pada bulan September dan Desember 1955, di berbagai wilayah di Indonesia telah diadakan pemilu lokal, begitu juga di Surabaya. Berbagai aktivitas politik dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di Kota Besar Surabaya pada masa itu demi mendapatkan popularitas. Berbagai cara dilakukan demi perolehan kursi pada pemilihan DPRDS yang akan berlangsung. Berikut ini adalah daftar nama bakal calon dewan beserta partai yang mengusung pada pemilihan anggota DPRDS Kota Besar Surabaya.

Tab el 3.1 Perwakilan D.P.R.D.S Kota Besar Surabaya Periode Tahun 1950

Nama	Par tai/ Organisasi
Dr, Abdul Manap	PNI
R. Widjajadi	PNI
Radjamin Nasution	Parindra
R.P.A. Makmur	PSI
Ibrahim Jahja	PSI
R, Sanoesi	PIR
Mr. Sjarief Hidajat	Masyumi
R. Soeprapto	Masyumi
Saleh Ibrahim	Masyumi
A.S. Machfoed	Masyumi

Maschaf Manan	Masyumi
M. Soegiman	Murba
Machmoed	Partai Banteng
Anwar Zain	Masyumi
J.R. Pesik	Partai Rakjat
J. Th. Kouthoofd	INP
M. Soegeng	Parkindo
Soeprapto Josowidagdo	Partai Katholiek
Dachlan Kahar	PSII
Djojodihardjo	S.B.I.I
Mr. Dr. R. Soeripto	S.S.K.K.
R.K.H. Soedigdo	S.B.L.G.I.
Soewarimbo	Petani
S.H. Basalamah	Pan. Politiek Warga Negara Tr. Arab
Moh. Saleh Hadi	G.P.I.I
S.D. Prajitno	Pemuda Demokrat
H.A. Fatah Jasin	Pemuda Anshor
Achmad Sjaichu	NU
Abdullah Wasi'an	Muhammadiyah
H. Abdul Hadi	Muhammadiyah
Nj. Poeger	Perwari
R.A. Siti Fadloen C	Muslimaat.

Sumber: Sjamsju Koesmen dan Pangestu B.W, Buku Petunjuk Kota Besar Surabaya, Surabaya; Djawatan Penerangan, 1957, hlm.144.

Dari Jumlah total 24 partai dan organisasi yang mengikuti proses pemilihan anggota DPRDS Kota Besar Surabaya, PSII hanya menyertakan satu wakilnya saja yaitu Dachlan Kahar, dari jumlah semuanya itu yang paling dominan mendapatkan kursi di DPRDS Kota Besar Surabaya adalah wakil dari Masyumi yang menyumbang lebih dari lima suara, disusul dengan PNI , PSI dan Muhammadiyah yang hanya mendapatkan masing-masing dua suara dalam pemilihan tingkat daerah tersebut sedangkan partai dan organisasi lainnya hanya mendapatkan suara masing-masing satu suara, diantaranya adalah Parkindo, Partai

Khatoliek, Partai Sosialis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Dilihat dari tabel yang sudah dijabarkan diatas posisi Partai Syarikat Islam Indonesia di dalam kancah perpolitikan lokal Surabaya mendapatkan jumlah suara yang sangat kecil karena dari jumlah 24 partai yang mengikuti proses pemilihan DPRDS Kota Besar Surabaya PSII hanya mendapatkan jumlah satu kursi saja dibandingkan partai-partai yang lainnya.

Seperti yang diketahui, bahwa Partai Syarikat Islam Indonesia merupakan pengembangan dari organisasi Sarekat Islam yang dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto dan merupakan salah satu tokoh besar Sarekat Islam yang berkhariaisma, berwibawa dan sangat disegani oleh berbagai kalangan masyarakat sampai akhir hayatnya pada tahun 1934.<sup>23</sup>

Selain karena kewibawaannya, Tjokroaminoto juga dikenal cakap dalam berorganisasi dan pandai dalam berpidato, dimana di setiap tempat yang dikunjungi Tjokroaminoto, pasti banyak masyarakat yang tertarik mendengarkan orasinya sehingga membuat masyarakat mengukultuskan Tjokroaminoto sebagai pemimpin sejati bukan oleh anggota dan kader-kader Partai Syarikat Islam Indonesia, namun juga oleh masyarakat luas khususnya kaum bumiputera.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942)*, (Jakarta: LP3ES, 1979), hlm. 121.

<sup>24</sup> Muncul anggapan di masyarakat luas bahwa Tjokroaminoto merupakan titisan dari Ratu Adil. Disini yang dimaksud dengan Ratu Adil adalah seorang tokoh yang mampu membawa kemakmuran dan melepas kesengsaraan yang membelit masyarakat pada masa itu. Tjokroaminoto tidak hanya dihormati rakyat, namun juga disegani oleh pemerintah Belanda sampai muncul ungkapan “Raja Jawa yang tidak dimahkotai”. Selain itu Tjokroaminoto juga mendapatkan julukan Gatotkoco Sarekat Islam oleh karena keberaniannya terhadap pemerintah kolonial. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942)*, (Jakarta: LP3ES, 1979), hlm. 121.

Sehingga muncul anggapan bahwa Tjokroaminoto adalah PSII dan PSII adalah Tjokroaminoto.<sup>25</sup> Anggapan tersebut tidak salah karena memang Tjokroaminoto merupakan tokoh nasional yang sangat disegani baik di dalam maupun di luar partai.

Karena adanya kultus terhadap Tjokroaminoto baik oleh anggota dan kader PSII maka ada beberapa hal yang menguntungkan namun juga merugikan. Hal yang menguntungkan adalah, dengan adanya tokoh yang berkarisma maka organisasi yang dia pimpin akan mendapatkan kemajuan yang luar biasa dengan banyaknya kader yang akan bergabung. Namun ada juga dampak negatif, yaitu apabila tokoh tersebut sudah tiada maka akan berdampak luas apabila tidak segera ditemukan pengganti yang sepadan.

Setelah wafatnya Tjokroaminoto, Partai Syarikat Islam Indonesia seolah kehilangan kharisma, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kemunduran Partai Syarikat Islam Indonesia yang juga dihadapi oleh Partai Syarikat Islam Indonesia Ladjnah Afdeeling Surabaya yang dibuktikan pada tabel yang sudah ditunjukkan diatas. Suara yang diperoleh Partai Syarikat Islam Indonesia sangat jauh dari perkiraan dengan hanya mendapatkan jumlah suara yang sedikit pada pemilihan DPRDS Kota Besar Surabaya.

Berdasarkan teori mengenai kepertaian seperti yang disebutkan oleh Lapalombara dan Weiner,<sup>26</sup> suatu partai politik tidak hanya menitik beratkan pada

---

<sup>25</sup> Party Allah Mesti Menang, dalam artikel PSII Boekan Party Manoesia, Oplah Soeara PSII, (Batavia; Ladjnah Tanfidziyyah PSII, 1937), hlm. 29. Lihat juga, Valina Singka Subekti, op.cit, hlm. 36.

<sup>26</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 146.



kharisma seorang tokoh saja sebagai langkah mencari simpati dan dukungan massa, tetapi juga perlu adanya kesinambungan dalam kegiatan berorganisasi. Seperti halnya yang dialami oleh Partai Syarikat Islam Indonesia, sehingga proses mencari dukungan dan hasil perolehan suara tidak sebanding dengan harapan yang diinginkan oleh kalangan partai, ini juga yang terjadi pada pemilihan dewan Kota Besar Surabaya, dimana suara Partai Syarikat Islam Indonesia kurang diapresiasi.<sup>27</sup>

Masalah yang dihadapi oleh PSII adalah lemahnya sistem kaderisasi yang merupakan langkah dalam meregenerasi anggota-anggota yang sudah uzur. Langkah ini dilakukan demi mendapatkan kader-kader yang berkompeten dan berkualitas yang kelak akan meneruskan tonggak perjuangan politik PSII. Hal ini mulai dipermasalahan semenjak Indonesia merdeka, dikarenakan sistem pengkaderan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, petinggi-petinggi partai pada saat itu tidak hanya mengurus partai saja namun mereka kebanyakan berfokus kepada permasalahan bangsa yang tiada habisnya hingga membuat proses pengkaderan tidak berjalan dengan lancar.. Pada masa indonesia merdeka, PSII hanya melakukan 2 kali sistem kaderisasi nasional yang dilakukan sebelum pemilihan umum yaitu sekitar tahun 1950 an.<sup>28</sup>

Mohammad Hatta selaku wakil presiden pun menyinggung langkanya manusia Indonesia yang berkompeten pasca kemerdekaan. Menurut Hatta ini

---

<sup>27</sup> Seperti yang diketahui, Sarekat Islam merupakan partai yang berkembang dan dibesarkan oleh adanya peran dari Tjokroaminoto yang merupakan tokoh yang dihormati dan disegani yang juga berasal dari Surabaya seharusnya dapat mendongkrak suara Partai Syarikat Islam Indonesia afdeeling Surabaya yang notabene adalah daerah asal dari Tjokroaminoto sendiri.

<sup>28</sup> Valina, op.cit, hlm. 49.

disebabkan karena adanya sistem kolonial yang kurang memberi kesempatan kepada rakyat untuk meraih pendidikan tinggi yang berkualitas.

Hasil yang berbeda dialami oleh partai Islam lain khususnya Masyumi yang berhasil memperoleh dukungan suara terbanyak pada pemilihan DPRDS Kota Besar Surabaya 1950 dengan memperoleh 6 kursi dan mengalahkan partai-partai lain dengan keunggulan jumlah suara yang sangat mendominasi pemilihan DPRDS Kota Besar Surabaya tersebut.

## 2. Kampanye PSII Menjelang Pemilu 1955

Beberapa bulan sebelum berlangsungnya pemilihan umum di Kota Besar Surabaya, terjadi beberapa hal diantaranya adanya laporan perusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap tanda gambar partai peserta pemilu, yang dipasang di berbagai tempat diantaranya di depan rumah orang-orang, pagar, tembok toko maupun di pohon-pohon dan pinggiran jalan. Hal yang menjadi masalah adalah karena beberapa petugas partai yang fanatik ditugaskan memasang tanda gambar, dengan seenaknya memasang tanda gambar di rumah orang-orang yang sebenarnya bukan pendukung dari partai tersebut, sehingga menimbulkan perselisihan dengan pemilik rumah atau toko yang dipasangi tanda gambar tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh harian Terompet Masyarakat yang terbit pada bulan Mei 1955, warga masyarakat Surabaya mengharapkan keterlibatan dari aparat negara untuk menangani permasalahan ini, sehingga tidak mengganggu jalannya pemilu yang akan diadakan pada bulan September dan

Desember. Setelah ditunggu-tunggu belum ada tanggapan dari pihak berwenang dalam menangani masalah tersebut, demi mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat memperkeruh suasana menjelang pemilihan umum 1955 di Kota Besar Surabaya.<sup>29</sup>

Tindakan pengrusakan ini disebabkan karena adanya persaingan antara kekuatan-kekuatan politik besar yang bersaing di menjelang berlangsungnya pemilihan umum yang akan datang, persaingan ini menyulut pihak-pihak pendukung partai untuk menyebarkan propaganda ke masyarakat Surabaya saat itu. Tindakan ini sangat mengkhawatirkan, karena akan berdampak pada kondisi perpolitikan di Surabaya.

Gambar 3.1

Poster Propaganda P SII yang tertempel di tembok pagar bangunan yang tertulis N.V. Autohandel di Surabaya tahun 1955



Sumber: Arsip Djawatan Penerangan IA. 55. 291

<sup>29</sup> "Polisi diharapkan bertindak, Banjak tanda gambar jg. Dirusak", Terompet Masyarakat Kamis 12 Mei 1955

Setelah adanya laporan-laporan mengenai pengrusakan tanda gambar yang terjadi, maka pada malam hari tanggal 12 Mei 1955 diadakan pertemuan perwakilan partai di Surabaya yang berasal dari beberapa kecamatan yaitu dari wilayah Ampel, Kampung Baru, Njamplungan, Ujung, dan Semampir. Pertemuan ini dilakukan selain untuk membahas mengenai masalah-masalah yang mungkin akan datang, juga membahas mengenai berbagai tindakan anarkis yang dilakukan oleh simpatisan maupun kader-kader partai yang dimaksud. Pertemuan tersebut diadakan di kantor BPMK yang terletak di Jl. K.M. Mansyur. Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 250 orang termasuk perwakilan partai-partai, diantaranya PNI, PSII, Masjumi, PKI, Partai Katolik, Partai Rakyat Indonesia, dari organisasi diwakili oleh GPII, Pemuda Rakjat, Muhammadiyah, BTI, Basis RKKS, Pemuda Demokrat, Perwindo, Wanita Demokrat, dan Gerwani, dari pemerintahan diwakili oleh Kepala Daerah KBS, KMKB, Polisi, Djawatan Penerangan, beserta anggota-anggota PPK, PPS, PPP, dll.<sup>30</sup>

Dalam pertemuan ini pokok-pokok yang dibahas adalah beberapa kasus yang terjadi selama diadakannya kampanye di Surabaya, yang seharusnya kemungkinan tersebut dapat dihindari bila para anggota partai dapat tertib dalam berkampanye dan mematuhi aturan yang berlaku.

---

<sup>30</sup> "Pengrusak tanda gambar akan diambil tindakan hukum", Terompet Masyarakat, Sabtu 14 Mei 1955.



Gambar 3.2 Poster Besar P SII terpampang jelas di suatu sudut jalan di Kota Surabaya tahun 1955



Sumber: Arsip Djawatan Penerangan IA. 55. 204

Organisasi dan partai yang mengikuti rapat tersebut menyetujui dan akan mendukung sepenuhnya hasil rapat tersebut. Demi mencegah kejadian serupa terulang kembali, pemasangan tanda gambar di setiap bangunan harus meminta izin terlebih dahulu dari pemilik rumah, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pengrusak tanda gambar akan diambil tindakan hukum', Terompet Masyarakat, Sabtu 14 Mei 1955., ibid.

Perwakilan dari PSII menyetujui putusan dari hasil pertemuan tersebut, karena dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang serupa terhadap tanda gambar partainya.<sup>32</sup> dan ini dilakukan agar Hal ini meresahkan karena tindakan ini mengintimidasi siapapun juga, baik masyarakat maupun petugas partai.

Hal ini ditekankan oleh pemerintah KBS bahwa pemasangan tanda gambar diharapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sampai mengganggu kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Walikota Surabaya menegaskan pemasangan atribut kampanye harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada jangan sampai kejadian dicabutnya tanda gambar terulang lagi.<sup>33</sup>

Langkah-langkah PSII dalam menjaring dukungan massa selain menggunakan tanda gambar adalah dengan mengikuti rapat akbar dalam menyambut pemilihan umum 1955, berbagai elemen partai juga mengikuti rapat sekaligus kampanye tersebut, partai dan organisasi yang tergabung dalam kepanitiaan tersebut antara PKI, PSII, NU, PNI, Partai Rakjat Indonesia, PRN, Parindra, Partai Buruh, PERMAI, PIR, dan Partai Indonesia Nasional.

---

<sup>32</sup> Gesekan yang terjadi antara Islam dan Komunis sudah dimulai dari awal masa-masa kampanye di Surabaya. Pertentangan antara PKI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama terjadi dengan adanya peristiwa yang terjadi di beberapa daerah di Surabaya antara masa-masa kampanye di Surabaya. Purnawan Basundoro, *Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulatan Partai Komunis Indonesia di Kota Surabaya (1955-1965)*, (Yogyakarta; Penerbit Ombak, 2010), hlm. 273.

<sup>33</sup> “Delegasi PKI menemui Walikota”, *Terompet Masyarakat*, Sabtu 14 Mei 1955.

Gambar 3.3

Perwakilan Partai dan Organisasi yang menghadiri rapat raksasa di stadion Tambak Redjo Surabaya tahun 1955



Sumber: Arsip Djawatan Penerangan VI. 54. 08. 657.462-463

Dalam rapat raksasa tersebut yang menjadi pimpinan tersebut adalah Dahlan Kahar yang ditunjuk sebagai pimpinan rapat. Rapat ini membahas mengenai sikap partai-partai di Indonesia mengenai permasalahan Irian Barat, agar pemerintah Indonesia dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut. masing-masing perwakilan mendapatkan kesempatan untuk berbicara mengenai masalah Irian Barat. Dalam kesempatannya Dahlan Kahar selaku wakil dari PSII menyampaikan

aspirasinya agar seluruh elemen masyarakat bersatu untuk melawan elemen-elemen asing yang merongrong kedaulatan Indonesia.<sup>34</sup>

Dalam rapat raksasa yang berlangsung di Lapangan Tambak Redjo tersebut disampaikan juga aspirasi kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan pernyataan terhadap Belanda sebagai agresor. Selain itu, dalam rapat tersebut Dahlan Kahar selaku perwakilan dari PSII mendesak pemerintah untuk membatalkan FINEC (Financieel Economie) secara unilateral dan protokol pembatalan Uni Indonesia-Belanda. Dan sebagai tuntutan terakhir rapat raksasa tersebut, para perwakilan partai mendukung sepenuhnya Kongres Rakyat Seluruh Indonesia demi memperkuat persatuan nasional.<sup>35</sup>

Pada rapat ini juga dihadiri oleh beberapa perwakilan partai-partai peserta yang mewakili beberapa golongan ideologi antara lain Islam (PSII), Nasionalis (PNI), dan Komunis (PKI) dalam rapat raksasa tersebut dibahas mengenai desakan perwakilan-perwakilan sejumlah partai-partai tersebut kepada pemerintah dalam menyikapi permasalahan dengan Belanda yang tak kunjung selesai terutama dibebaskannya wilayah Irian Barat, serta membahas mengenai rencana pemilu yang akan datang. Dalam rapat tersebut partai-partai yang bersangkutan menunjukkan konsistensi dengan tidak mengendurkan semangat dalam membebaskan Irian Barat dan mereka menyatakan dengan suara bulat bahwa secepatnya permasalahan Irian Barat segera diselesaikan baik dengan jalan diplomatik maupun dengan jalan militer.

---

<sup>34</sup> “Islam, Komunis, Nasionalis, Bersama-sama adakan rapat menentang pendjajahan”, Terompet Masyarakat, Senen 28 Februari 1955.

<sup>35</sup> “Islam Komunis, Nasionalis, Bersama-sama..... ibid



### 3. Suasana Pemilu 1955 di Kota Besar Surabaya

Pemilihan umum 1955 merupakan pemilu nasional yang pertama kalinya bagi bangsa Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan September dan bulan Desember tahun 1955 dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, hal ini sebenarnya sudah direncanakan beberapa tahun sebelumnya, namun karena ada beberapa hal dan berbagai peristiwa yang terjadi membuat rencana tersebut beberapa kali tertunda pada kabinet-kabinet sebelumnya yang berulang kali berganti kepemimpinan sampai akhirnya benar-benar diselenggarakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.

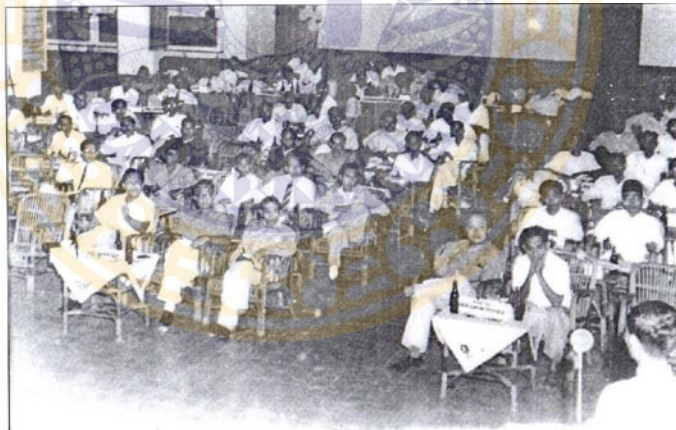
Seperti yang terjadi di kota-kota besar lain semisal di Jakarta, suasana pemilihan umum yang terjadi di Kota Besar Surabaya relatif lebih aman, walaupun di beberapa tempat dilaporkan terjadi tindakan yang membuat suasana menjadi panas, namun pada pelaksanaan pemilihan umum di Kota Besar Surabaya jauh dari hal-hal yang bersifat negatif, dikarenakan sebagian besar masyarakat Kota Besar Surabaya menyambut antusias dengan dilaksanakannya pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak yaitu pada bulan September dan bulan Desember tahun 1955.

Di beberapa tempat di wilayah Surabaya, sudah mulai dilakukan berbagai persiapan dalam menyambut diadakannya pemilihan umum, diantaranya mulai diadakan sosialisasi pemilu serentak di salah satu gedung di Surabaya seperti pada gambar. Seperti yang terlihat bahwa panitia telah mempersiapkan segala hal yang diperlukan dengan mengadakan rapat-rapat yang berlangsung menjelang diadakannya pemilihan umum tersebut.

Rapat yang dilangsungkan membahas mengenai apa-apa saja yang diperlukan pada saat berlangsungnya pemilihan umum, serta bagaimana mensosialisasikan tata cara dalam memilih wakil rakyat yang nantinya terpilih. Rapat dan sosialisasi mengenai dilangsungkannya pemilihan umum ini dilangsungkan beberapa tahun sebelumnya yaitu pada tanggal 16 Januari 1954, dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, dalam rapat dan sosialisasi tersebut masyarakat tampak antusias dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemimpin rapat tersebut.

Gambar 3.4

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat menjelang diadakannya Pemilu 1955 tahun 1955



Sumber: Arsip Djawatan Penerangan IA. 54.36

Panitia pemilihan umum mempersiapkan segalanya sebaik-baiknya dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi serupa guna mensukseskan kelancaran pemilihan umum nantinya. Sehingga seluruh elemen masyarakat yang menghadiri

akan memahami tata cara yang harus dilakukan pada saat peserta pemilih berada di dalam bilik suara mulai dari awal hingga akhir.

Petugas panitia pemilihan mulai mempersiapkan pendataan bagi masyarakat yang akan mengikuti proses pemilihan umum jauh-jauh hari. Seperti yang di beberapa tempat di Surabaya. Masyarakat yang akan mengikuti pemilihan umum diwajibkan mengikuti aturan dan segala persyaratan yang ada, terutama mengenai batasan usia peserta pemilih, dimana setiap calon peserta pemilih harus berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah.<sup>36</sup>

Pada pemilu yang pertama ini terdapat hal yang menarik, dimana warga masyarakat yang “kurang beruntung” mendapatkan keistimewaan yaitu dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pemilihan umum ini, yang dimaksud kurang beruntung ini adalah warga masyarakat yang mengalami masalah mental dan kejiwaan, hal ini dilakukan karena pemerintah secara serius ingin melibatkan seluruh elemen masyarakat Surabaya dalam rangka pemilihan umum yang diadakan Kota Besar Surabaya.

Kemungkinan hal yang terjadi tidak hanya terbatas di Kota Besar Surabaya saja, namun juga di kota lain peristiwa ini juga terjadi. Ini membuktikan komitmen dari yang menunjukkan kesungguhan dalam bertugas dan demi terlaksananya pemilihan umum yang menyeluruh dan dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali masyarakat “kurang beruntung tersebut.

---

<sup>36</sup> Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm.1.

Gambar 3.5

Petugas Panitia Pemilihan Umum mendata masyarakat yang “kurang beruntung” di kantor PPU Surabaya tahun 1954



Sumber: Arsip Djawatan Penerangan IA. 54. 111

Seperti yang terlihat pada foto yang ada diatas, para petugas mendata warga masyarakat yang kurang beruntung satu persatu, terlihat juga ekspresi salah satu dari petugas yang bersangkutan terlihat kewalahan dalam mendata mendaftarkan proses administrasi dari orang-orang yang kurang beruntung tersebut, namun tugas apapun yang mereka jalankan harus sesuai dengan semangat dalam menyambut pemilihan umum selain karena memang ingin menyemarakkan pemilu yang pertama kali juga dikarenakan warga masyarakat “kurang beruntung” tersebut mendapatkan hak yang setara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Konstituante yang terdaftar pada pemilihan umum Kota Besar Surabaya.



Gambar 3.6

Kesibukan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara di jalan Oro-oro Ombo Tambaksari, Surabaya tahun 1955



Sumber: Arsip Djawatan Penerangan IA. 55. 250

Warga masyarakat Surabaya sangat antusias dengan dilangsungkannya pemilu yang diadakan di Surabaya, salah satunya di lingkungan TPS Oro-oro Ombo, dimana di TPS ini tengah terjadi kesibukan diantara para petugas PPU dan warga Surabaya di Tambaksari dimana mereka sedang memilih para calon anggota DPR. Selain itu terdapat hal yang menarik di TPS Oro-oro Ombo yang berada di kecamatan Tambaksari, dimana terdapat beberapa pemilih yang sedang sakit dibopong oleh petugas pemilihan dari awal hingga akhir. Ini membuktikan bahwa pemilihan umum menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap calon pemilih.

Kepadatan juga terjadi di TPS yang berada di jalan Nias, kecamatan Gubeng, di TPS ini antrian warga masyarakat calon pemilih sangat padat dan berjubel sampai berdesakan satu sama lain tetapi tetap tertib dan teratur, sehingga tidak menyulitkan petugas dalam mendata calon pemilih yang akan masuk dan keluar dari bilik suara.

Hal ini disebabkan karena persiapan yang dilakukan sangat diperhitungkan oleh masing-masing petugas panitia pemilihan, dimana di setiap tempat pemilihan dipasang poster-poster pemilihan yang menjelaskan mengenai tahap-tahap pemungutan suara dari awal sampai akhir. Selain itu poster mengenai tata cara pemilihan umum yang ditempel di sudut-sudut kota menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Surabaya dimana menjelaskan mengenai dasar-dasar pemilihan umum yang diantaranya adalah;

- Umum: Semua warga Negara laki-laki atau wanita yang memiliki hak pilih, dengan pembatasan yang tidak dapat dihindarkan (umur) dan halangan-halangan lain. Maksudnya disini adalah semua warga masyarakat yang sudah dewasa minimal berumur 17 tahun atau sudah menikah.<sup>37</sup>
- Langsung: Pemilih memilih langsung anggota DPR dan Konstituante, disini pemilih diberi hak untuk memilih calon yang akan dipilih sesuai nuraninya secara langsung yaitu dengan tata cara yang sudah dijelaskan oleh panitia pemilihan umum dari masing-masing wilayah.
- Rahasia ; Pemilih memilih anggota DPR dan Konstituante secara bebas dan rahasia, pemilih diberi hak untuk memilih anggota partai dengan sebebas-bebasnya, namun pemilih juga diwajibkan untuk merahasiakan pencoblosan suara yang dia pilih kepada orang lain.

---

<sup>37</sup> Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 12.

- Perwakilan Berimbang: Tiap-tiap golongan/partai sedapat-dapatnya memperoleh jumlah kursi yang seimbang dengan suara yang diperolehnya, calon perseorangan diberi kesempatan. Disini dijelaskan bahwa tiap-tiap partai atau organisasi mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak suara di parlemen, tanpa ada pembatasan suara antar partai yang akan mengikuti pemilu 1955.
- Daftar: Pencalonan dikemukakan dalam daftar, daftar kumpulan diutamakan
- Satu Korps: Semua pemilih didalam dan diluar negeri<sup>38</sup> merupakan satu korps. Semua warga negara Indonesia dapat memenuhi hak suaranya baik itu didalam negeri maupun diluar negeri sehingga tidak akan ada kekhawatiran bagi warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri.<sup>39</sup>
- 16 Daerah Pemilihan<sup>40</sup>; wilayah Indonesia terbagi kedalam 16 daerah pemilihan. Dalam pemilu 1955 ini daerah pemilihan terbagi kedalam 16 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Meskipun terdapat calon pemilih yang berada di luar negeri, usianya minimal 18 tahun dan berstatus sebagai warga Negara Indonesia maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan surat suara, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 7 tahun 1953. Lihat: Drs. C.S.T. Kansil S.H, Inti Pengetahuan Pemilihan Umum, (Jakarta; Pradnja Paramita, 1970), hlm. 51.

<sup>39</sup> Hal ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, dimana tugasnya yaitu melakukan pendataan dan pengumpulan administrasi masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, kemudian meneruskan kepada Kementrian Luar Negeri dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Umum. Lihat: Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Inti Pengetahuan Pemilihan Umum, (Jakarta; Pradnja Paramita, 1970), hlm. 55.

<sup>40</sup> Daerah pemilihan tersebut diantaranya; Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan

Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia pada saat itu mempersiapkan segalanya dengan sedemikian rupa dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, penyampaian yang sederhana namun dengan pernyataan yang jelas ke masyarakat agar tersampaikan secara jelas ke masyarakat demi terlaksananya pemilihan umum yang lancar.

Berikut ini merupakan daftar calon anggota yang mewakili Partai Syarikat Islam pada pemilihan tingkat provinsi:

Tab el 3.2 Calon Sementara Anggota DPR dari Part ai Syarikat Islam Indonesia Daerah Pemilihan Djawa Timur t ahun 1955

Nama Anggota	Asal
Arudji Kartawinata	Jakarta
Darmowidjojo Sanoe	Probolinggo
Soedibjo	Jakarta
Harun Usman Ali	Surabaya
Moh. Ali Dr. Lie Kiat Teng	Jakarta
Boerhan Mansur	Surabaya
Harsono Tjokroaminoto	Jakarta
Hadji Dachlan Kahar	Surabaya
Anwar Tjokroaminoto	Jakarta

---

Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Selatan-Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Irian Barat. Ibid, hlm. 55.

<sup>41</sup> Koleksi Arsip Djawatan Penerangan (1A.54.47)



Djihadijah Pa Abd, Choliq Sholeh	Jember
Kiai Tb. H. Achmad Chotib	Serang
Ircham Jusuf	Malang
Abdoelah Aidid	Jakarta
Mohammad Tajib	Jember
Bahanan Hadji Said	Probolinggo

Sumber: Terompet Masyarakat. "Tjalon Sementara anggota DPR daerah pemilihan Djawa Timur", Kamis 5 Mei 1955

Pada pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat wilayah Djawa Timur yang diwakili oleh 15 orang dari berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya adalah Arudji Kartawinata yang merupakan salah satu petinggi Partai Syarikat Islam Indonesia mencalonkan diri dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari beberapa orang yang ikut dalam pemilihan, terlihat dalam tabel diatas, beberapa wakil dari Surabaya diantaranya adalah Harun Usman Ali, Boerhan Mansur dan Hadji Dachlan Kahar<sup>42</sup> yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai anggota dewan pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya periode 1950, selain itu juga terdapat Anwar Tjokroaminoto yang menjabat sebagai Presiden dari Partai Syarikat Islam Indonesia, juga ikut

<sup>42</sup> Dachlan Kahar merupakan salah satu pengurus teras dari PSII Surabaya yang merupakan tokoh sentral dalam perjuangan PSII Surabaya pada periode 1950 an hingga Pemilu 1955 (Wawancara dengan Bey Arifin pada tanggal 9 September 2016 di Kantor Cabang PSII Surabaya)

mencalonkan diri pada pemilihan tersebut. Berikut ini adalah daftar calon anggota Konstituante PSII daerah pemilihan Jawa Timur;

Tabel 3.3 Daftar Calon Sementara Anggota Konstituante Partai Syarikat Islam Indonesia Daerah Pemilihan Djawa Timur tahun 1955

Nama	Asal
Anwar Tjokroaminoto	Jakarta
Hadji Nawawi Usman	Surabaya
Harsono Tjokroaminoto	Jakarta
H. Masjuk Askandar	Probolinggo
.Moh.Sjafii Wirakusumah	Bandung
Boerhan Mansur	Surabaya
K. Hadji Sapari	Jakarta
Raden Danial Adimenggolo	Jember
Abdoellah Aidid	Jakarta
A.H. Wondoamiseno	Surabaya
Atmari	Jember
Sandjadirdja M, Gogo Rafiudin	Serang
Soerjono Reksodipoetro	Surabaya
Arudji Kartawinata	Jakarta

Gadio Atmosantosa	Surabaya
Imam Supardjan	Banjarnegara
Saleh Alie Midekal	Surabaya
A.S. Mattjik Bin A. Kadir	Palembang
Hadji Abdulrachman	Surabaya
Sjahboeddin Latif	Jakarta
Usman Ali Harun	Surabaya
Moh. Alf Dr. Lie Kiat Teng	Jakarta
K. G. Saleh Biu	Pamekasan
Suhardjo	Temanggung
Hadji Abdussakur	Surabaya
Kadari R. Soetedjo	Jakarta
Damanhuri Djamil	Bukittinggi
Djihadijah Pa Abd Choliq Soleh	Jember
Hanafie Pak Untung Hanafie Hadji Achmad	Banyuwangi
Rahman W.A.	Jakarta

Sumber: Terompet Masjarakat, Daftar Tjalon Sementara anggau ta Konstituante, Untuk Daerah Pemilihan Djawa Timur, Rabu 1 Juni 1955

Dari tabel diatas merupakan bakal calon anggota yang akan menduduki majelis Konstituante yang ditentukan oleh panitia pemilihan dengan jumlah sebanyak 30 perwakilan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang mewakili Partai Syarikat Islam dalam menghadapi pemilihan umum yang kedua kalinya pada bulan Desember 1955.

Diantara wakil-wakil tersebut terdapat nama-nama yang sebelumnya mewakili Partai Syarikat Islam Indonesia pada pemilihan sebelumnya, ini dilakukan demi mendongkrak suara di masing-masing daerah pemilihan. diantaranya adalah Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, Boerhan Mansur, dan Ahmad Husain Wondoamiseno.

Sebelum diadakannya pemungutan suara pada Majelis Konstituante, ada harapan dari beberapa organisasi Islam salah satunya adalah dari organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang saat itu berafiliasi dengan Masyumi. Dalam pernyataanya yang ditujukan kepada partai-partai Islam yang saat itu mengikuti pemilihan umum agar saling menyatukan dukungan dalam pemilihan umum selanjutnya, hal ini demi menghindari perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, dikarenakan perbedaan pendapat serta ambisi dalam berpolitik dapat memperkeruh hubungan antar partai-partai Islam. Seruan HMI ini ditujukan kepada anggota pengurus besar partai-partai Islam pada saat itu diantaranya PSII, NU, Masyumi serta PERTI.<sup>43</sup>

Pernyataan HMI juga didukung oleh pernyataan dari Aminudin Junus selaku anggota PERTI, berharap agar partai-partai Islam yang mengikuti pemilihan

---

<sup>43</sup> “Seruan HMI kepada partai-partai Islam”, Indonesia Raya, Selasa 22 November 1955.



umum walaupun berbeda azas dalam berpolitik, namun jangan sampai melupakan tujuan utama dari dibentuknya partai-partai Islam yaitu menjunjung tinggi Ukhuwah Islamiyah serta bersatu agar terjadi perimbangan jumlah suara diantara partai-partai didalam kabinet Konstituante yang akan datang.<sup>44</sup>

Harapan terbesar dari organisasi-organisasi Islam adalah agar partai yang berideologi agama khususnya Islam yang menjadi partai peserta pemilihan umum dapat menyatukan suara dan saling mendukung satu sama lain, apabila hal ini tidak diindahkan kemungkinan yang akan terjadi adalah terpecah-pecahnya persatuan umat Islam Indonesia yang dalam hal ini menghadapi adanya persaingan politik yang tidak hanya antar partai-partai Islam namun dengan partai-partai yang berideologi selain Islam, meskipun diantara mereka terdapat perbedaan pandangan dalam menyikapi secara bijak persaingan antar partai yang sedang terjadi. Karena seperti yang diketahui dari kasus-kasus yang sebelumnya dimana terjadi tindakan anarkis oleh simpatisan dari partai-partai peserta pemilu semakin menambah citra negatif kedalam lingkungan masyarakat, selain itu hal tersebut menjadikan suasana mencekam dan tidak kondusif.

Dalam hal ini PSII menyikapi dengan hati-hati pernyataan yang dilontarkan oleh kedua organisasi tersebut, PSII mengakui bahwa dengan bekerja sama maka akan tercapai sebuah persatuan antar partai-partai Islam khususnya dengan kedua partai Islam yang berhasil memperoleh suara mayoritas pada dua pemilihan tersebut dalam hal ini Masyumi serta Nahdlatul Ulama, seperti yang disampaikan oleh PSII cabang Surabaya. PSII cabang Surabaya sendiri perlu membenahi

---

<sup>44</sup> “Kabinet jang. sebaik2nja terdiri dari Masjumi, NU, PSII, dan PERTI”, Haluan, Rabu 26 Oktober 1955

beberapa langkah yang sebelumnya gagal dilaksanakan pada pemilu 1955, sehingga diperlukan adanya perubahan taktik dan propaganda pada pemilu yang selanjutnya.

#### D. Hasil Suara dan dampaknya bagi PSII pasca Pemilu 1955.

Pemilihan Umum 1955 secara nasional pada akhirnya terlaksana dengan lancar walaupun beberapa hal sempat terjadi sebelum berlangsungnya pemilihan umum, misalnya yang terjadi di kampung Pakis namun pemilihan umum tetap berjalan dengan semestinya di Surabaya maupun di kota-kota lain di Indonesia. Kelancaran dalam proses pemilihan di TPS-TPS di kota Surabaya.

Jumlah pemilih yang terdaftar di Kota Surabaya mencapai 367.791 orang,<sup>45</sup> sebanyak 60% yang terdaftar adalah perempuan, sedangkan yang berhak memilih persentasenya sekitar 75% hal ini sangat menggembirakan karena dengan ini dapat dikatakan bahwa antusiasme golongan perempuan dalam pemilihan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Namun hal yang sangat disayangkan adalah adanya laporan bahwa kaum intelektual kurang berminat pada pemilihan umum yang sedang berlangsung ini.<sup>46</sup>

Di Surabaya sendiri, terdapat sekitar 616 TPS yang tersebar di kecamatan-kecamatan maupun desa-desa.<sup>47</sup> Banyaknya jumlah TPS tersebut sedikit

---

<sup>45</sup> “Djuga didaerah-dae rah PNI, NU, dan Masjumi leading”, Merdeka, 1 Oktober 1955.

<sup>46</sup> “ Di beberapa tempat kota Bandar Surabaya, PKI leading”, dalam artikel ‘Di Surabaya Banyak Wanita Memilih’, Perdamaian, 1 Oktober 1955.

<sup>47</sup> “Hasil Pemungutan Suara di 14 Lingkungan K.B. S’Baja”, Harian Umum 1 Oktober 1955

merepotkan panitia pemungutan suara Kota Surabaya, dengan adanya hal tersebut membuat mereka bekerja ekstra keras hingga mereka rela semalaman menyelesaikan pekerjaan yang sedikit banyak merepotkan mereka itu. Namun pengorbanan tersebut mereka lakukan dengan ikhlas demi lancarnya proses penghitungan suara yang sedang berlangsung. Berikut ini merupakan hasil suara yang diperoleh partai-partai dan perseorangan pada pemilihan Konstituante tanggal 29 September 1955:

Tab el 3.4 Jumlah Perolehan Suara Partai dan Perseorangan untuk pemilihan anggota Konstituante di Kota Besar Surabaya tahun 1955

No	Partai	Jumlah
1	PKI	124.475
2	Nahdlatul Ulama	60.876
3	PNI	50.868
4	Masjumi	16.420
5	Partai Buruh	4.596
6	Partai Katolik	4.519
7	P3RI	3.704
8	PSI	3.673
9	PRI	3.047
10	PSII	2.587

Sumber; “Asil-asile Sawetara Waktu Pilihan Konstituante Sadjrone Kutha Gede Surabaya Saben Partai lan Perseorangan”, Suara Rakjat, Rabu, 21 Desember Tahun 1955

Dari hasil-hasil pemilihan anggota Konstituante yang diberitakan oleh Suara Rakjat menunjukkan dominasi PKI di Surabaya dengan meraup suara melebihi 100.000 suara kemudian disusul oleh Nahdlatul Ulama yang memperoleh suara lebih dari 60.000 suara hampir setengah dari jumlah suara yang diperoleh PKI, menyusul kemudian PNI dengan perolehan suara 50.868, Masjumi yang mendapat suara kurang dari 20.000 suara dan PSII yang pada tahun-tahun sebelumnya getol dalam berkampanye duduk di posisi ke 10 hanya mendapatkan suara di Konstituante sejumlah 2.587 suara, sangat timpang daengan jumlah-jumlah yang dihasilkan partai-partai besar lain yang mendapatkan jumlah suara diatas 10.000 suara

Kemudian pada pemilihan anggota DPR yang dilangsungkan pada 15 Desember 1955 hasil yang mengecewakan juga diperoleh PSII. Berikut ini adalah jumlah suara yang masuk kedalam PPS Kota Surabaya.

Tabel 3.5 Jumlah Perolehan Partai dan Perseorangan pada pemilihan DPR di Surabaya tahun 1955

No	Partai	Jumlah
1	PKI	124.128
2	NU	59.410



3	PNI	40.506
4	Masjumi	16.588
5	Parkindo	7.305
6	Baperki	6.352
7	PRI	5.926
8	Partai Katolik	4.808
9	PSI	4.414
10	P3RI	4.128
11	Kusadi Paulus Maria	4.118
12	PSII	2.945

Sumber, “Asil-asile Sawetara Waktu Pilihan Konstituante

Sadjrone Kutha Gede Surabaya Saben Partai lan

Perseorangan ”, Suara Rakjat, Rabu, 21 Desember Tahun 1955

Kemudian pada pemilihan anggota DPR di kota Surabaya, PSII kembali menelah pil pahit, PSII menduduki urutan ke dua belas dalam pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. PKI kembali mendominasi setelah mereka unggul pada pemilihan Konstituante pada pemungutan suara pada dua bulan sebelumnya dengan perolehan suara sebanyak 124.128 ribu, kemudian pada urutan-urutan selanjutnya tidak ada untuk peringkat empat besar posisi yang diperoleh masing-masing partai tidak berubah, yang mengejutkan adalah organisasi

perseorangan Kusadi Paulus Maria mendapatkan perbandingan jumlah hampir setengah yang diperoleh PSII, dengan jumlah sebanyak 4.118 suara, dan PSII hanya mendapatkan suara sebanyak 2.945.

Tab el 3.6 Ha sil Peroleh an Suara untuk Pa rlem en da n Konsitit uan te  
Provinsi Ja wa Timur t ahun 1 955

Partai	Parlemen	Konstituante	Perbedaan
PNI	2.251.069	2.329.991	78.992
Masyumi	1.109.742	1.119.595	9.853
NU	3.370.554	3.260.392	110.162
PKI	2.299.602	2.266.801	32.80
PSII	43.357	43.458	5.50

Sumber: Herbert Feith, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta:  
Kepustakaan Populer Gramedia, 1999 hlm 95.

Kemudian pada lingkup provinsi, sebagai pembanding dapat diperoleh hasil pemungutan suara yang menunjukkan perolehan suara empat partai besar beserta PSII yang menjadi pembanding dari keempat partai besar. suara PSII di JawaTimur mengecewakan karena hanya mendapatkan jumlah suara yang sangat sedikit dibandingkan lawan-lawan politiknya. Hal ini menandakan bahwa apa yang sudah diusahakan selama ini terkesan tidak memuaskan, disamping karena PSII merupakan partai menengah, maka tidak heran hasil yang didapat di wilayah Jawa Timur suaranya kurang dari 50.000 suara.

Dapat disimpulkan dari data yang diperoleh bahwa Jawa Timur bukan merupakan basis pendukung dari PSII, merujuk pada hasil yang diperoleh di tingkat lokal khususnya Surabaya, hasil yang diperoleh juga dibawah target yang dicanangkan oleh pimpinan PSII saat itu. selain itu karena adanya kedekatan historis dengan Tjokroaminoto tidak mempengaruhi hasil perolehan suara PSII di lingkup lokal maupun provinsi.

Secara nasional telah diadakan penghitungan suara, setelah melalui berbagai proses, dari mulai kampanye, hingga pemungutan suara di berbagai tempat di Indonesia. hasil yang diperoleh secara nasional adalah PSII menempati urutan kelima setelah PNI, Masyumi, N.U, dan PKI. Dibandingkan dengan jumlah suara empat partai besar, suara yang diperoleh PSII terbilang sangat kecil dan hanya mendapatkan jumlah suara sebanyak 1.091.610 (2,89%) sedikit lebih banyak dari Partai Kristen Indonesia yang sama-sama memegang jumlah lebih dari satu juta suara.

Hasil yang diperoleh ini sangatlah kecil, bila dibandingkan hasil yang diperoleh partai-partai lain, yang masa berdirinya jauh dibawah PSII. Hal ini membuktikan bahwa langkah-langkah yang diambil PSII dari tingkat lokal hingga tingkat nasional belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Namun ada beberapa provinsi yang menjadi basis suara dari PSII diantaranya adalah di Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah Tenggara. Uniknya daerah-daerah tersebut adalah kantong-kantong pemberontakan dan merupakan daerah basis dari gerakan Darul Islam. Di Jawa Barat sendiri PSII mendapatkan jumlah total suara 62,4%.

Berikut ini adalah hasil perolehan suara keseluruhan dari partai-partai peserta pemilu 1955 secara nasional.

Tabel 3.7 Perolehan Jumlah Suara Partai Peserta Pemilihan Umum  
1955 di Seluruh Indonesia

Partai	Suara	%	Kurs i
PNI	8.434.653	22,32	57
Masyumi	7.903.886	20,92	57
NU	6.955.141	18,41	45
PKI	6.176.914	16,36	39
PSII	1.091.160	2,89	8
Parkindo	1.003.325	2,66	8
Partai Katholik	770.740	2,04	6
PSI	753.191	1,99	5
IPKI	539.824	1,43	4
PERTI	483.014	1,28	4
PRN	242.125	0,64	2
Partai Buruh	224.167	0,59	2
GPPS	219.985	0,58	2
PRI	206.261	0,55	2
P3RI	200.419	0,53	2
Partai Murba	199.588	0,53	2
Baperki	178.887	0,47	1
PIR	178.481	0,47	1
Wongsonegoro			
Grinda	154.792	0,41	1
Permai	149.287	0,40	1
Persatuan Daya	146.054	0,39	1
PIR Hazairin	114.644	0,30	1
PPTI	85.131	0,22	1
AKUI	81.532	0,21	1
PRD	77.919	0,21	1
PRIM	72.532	0,19	1
Acoma	64.514	0,17	1
R. Soedjono Prawirisoedarso	53.036	0,14	1
Organisasi Lain-lain	1.002.433	2,71	-



Jumlah	37.785.29 9	100	257
--------	----------------	-----	-----

Sumber: Biro Humas KPU, dalam buku Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004, (Surabaya, Pustaka Eureka, 2006), hlm.72.)

Sedikitnya suara yang diperoleh PSII disebabkan oleh berbagai hal diantaranya strategi yang diterapkan pada masa sebelumnya dimana PSII tidak dapat memaksimalkan perolehan suara yang dilaksanakan pada pemilihan perwakilan DPRDS di Surabaya. Sebab-sebab kekalahan ini membuat pamor dari PSII menurun hingga berlanjut pada pemilihan umum selanjutnya pada masa Orde Baru.

Ada beberapa sebab yang mempengaruhi suara yang diperoleh PSII sangat sedikit, dibandingkan dengan partai-partai besar yang bersaing dalam pemilihan umum 1955 di Surabaya, yang pertama adalah karena kurangnya unsur-unsur yang dilibatkan khususnya pengerahan massa yang massif padahal pada tahun-tahun sebelum pemilihan umum dilangsungkan, PSII Surabaya dapat menjadi penggerak bersama partai-partai besar lain diantaranya Partai Nasionalis Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, Masyumi serta Partai Sosialis Indonesia.

Dari keempat partai besar tersebut yang paling mendominasi adalah suara yang diperoleh dari Partai Komunis Indonesia, dimana suara yang diperoleh oleh Partai Komunis Indonesia mendominasi di hampir seluruh bilik suara yang tersebar di Kota Besar Surabaya. Sedangkan partai lain yang mengikutinya adalah

Nahdlatul Ulama, PNI, Masyumi, serta PSI.<sup>48</sup> PSII mendapatkan suara yang sangat kecil pada pemungutan suara di Surabaya, dibandingkan partai-partai lain, PSII berada di urutan ke 10 dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan umum.<sup>49</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa PKI merupakan partai yang mengandalkan jumlah massa yang besar, dimana di setiap langkahnya selalu mengerahkan massa dengan jumlah yang massif. Salah satu hal yang menyebabkan PKI dapat memobilisasi massa adalah karena PKI berhasil menggerakkan unsur-unsur buruh dan tani, dengan pendekatan pada organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI dan menggunakannya sebagai isu yang dapat mengagitasi masyarakat Surabaya yang sebagian besar bekerja sebagai buruh dan tani.

Isu-isu tersebut diantaranya adalah mengenai permasalahan tanah yang menjadi persoalan yang berkepanjangan dan tiada habisnya. Selain itu kultur masyarakat Surabaya yang juga menyebabkan berhasilnya pergerakan PKI di kawasan Surabaya, selain itu strategi yang digunakan PKI mengangkat isu-isu kecil menjadi sebuah gerakan untuk memobilisasi rakyat. Cara ini sangat ampuh dan terbukti berhasil dengan unggulnya suara PKI pada pemilihan umum di Kota Besar Surabaya.

---

<sup>48</sup> Purnawan Basundoro, "Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulatan Partai Komunis Indonesia di Kota Surabaya 1955-1965, dalam Sri Margana dan M. Nursam (ed), Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial, (Yogyakarta; Penerbit Ombak, 2010), hlm. 272.

<sup>49</sup> "Asil-asile Sawetara Waktu Pilihan Konstituante Sadjrone Kutha Gede Surabaya Saben Partai lan Perseorangan", Suara Rakjat, Rabu, 21 Desember Tahun 1955.

Pada Pemilu 1955 di kota Surabaya PKI hampir meraih suara hampir setengah dari jumlah pemilih di kota Surabaya. Hal ini mengejutkan karena secara kultural masyarakat Surabaya lebih dekat dengan kultur Nahdlatul Ulama.<sup>50</sup> Ini terbukti dengan hasil yang diperoleh oleh Nahdlatul Ulama dengan menduduki peringkat dua setelah PKI. Kultur Islam tradisional telah tertanam sejak lama pada masyarakat Surabaya. Pengaruh Nahdlatul Ulama merasuk ke sendi-sendi masyarakat lokal Surabaya,

Masyumi berhasil mendapatkan suara dari kaum-kaum modernis Islam, Masyumi berhasil mendapatkan pengaruh yang besar walaupun terjadi perebutan ruang kekuasaan dengan PKI dan sering menimbulkan gesekan-gesekan antara kedua partai tersebut.

Selain karena terkotak-kotaknya pemilih di Surabaya, faktor lain yang mempengaruhi adalah karena adanya ancaman yang diberikan oleh petugas-petugas partai, agar memilih partai tertentu. Jika warga masyarakat tidak menurut, maka hal yang buruk akan terjadi.

Seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dimana suara yang diperoleh PSII sangat minor, dilaporkan terjadi tindakan intimidatif terhadap pemilih. Tindakan tersebut berupa ancaman verbal ataupun kekerasan secara fisik. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu menurunnya popularitas PSII dikalangan pemilih di Surabaya. Hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab menurunnya jumlah suara yang diperoleh PSII pada pemilihan umum 1955 di Surabaya. Sehingga menyebabkan suara yang diperoleh di tingkat

---

<sup>50</sup> op, cit, hlm. 272.

lokal berpengaruh juga terhadap suara yang diperoleh secara nasional sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.

Faktor utama yang menjadi pemicu adalah dari dalam tubuh PSII sendiri, terutama mengenai masalah kaderisasi yang lambat yang dilaksanakan PSII, seperti yang diketahui proses kaderisasi merupakan faktor utama dalam memperoleh bibit baru yang segar, seandainya pemimpin yang lama diharuskan lengser karena berbagai sebab.

Kaderisasi membutuhkan proses tidak secara instan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena menurunnya idealisme partai diantara para kader-kader PSII yang berujung pada suatu krisis moral yang menghinggapai setiap kader PSII yang bergabung. Setiap kader mempunyai keinginan praktis dan ekonomis yang membawa kepada perilaku negatif pada partai.<sup>51</sup> Anggapannya bahwa jika ingin bergabung dalam politik, harus mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikorbankan.

Dengan adanya masalah ini output kader berkualitas yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para elite pimpinan partai. Proses kaderisasi PSII memegang peranan penting jauh sebelum kemerdekaan Indonesia terjadi. Yaitu pada masa kepemimpinan Tjokroaminoto, pada masa itu Tjokroaminoto yang merupakan orator ulung berkeliling daerah untuk menuangkan aspirasi politiknya sekaligus mendapatkan simpatisan bagi organisasi Sarekat Islam.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Valina Singka Subekti, op cit, hlm. 50.

<sup>52</sup> Deliar Noer, op.cit, hlm.40.



Jika menilik kebelakang, sebenarnya organisasi-organisasi yang berada dibawah naungan PSII diantaranya adalah SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia), SEPMI (Serikat Pelajar Muslim Indonesia), Pemuda Muslim, GERTASI (Gerakan Tani Syarikat Islam) serta GOBSI (Gerakan Organisasi Buruh Sarekat Islam).<sup>53</sup> Khusus untuk GERTASI dan GOBSI sebenarnya kedua organisasi tersebut yang menaungi komunitas buruh dan tani dapat dimanfaatkan dalam mendulang banyak suara di Surabaya, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Surabaya merupakan masyarakat yang didominasi buruh yang berhasil dikelola dengan baik oleh organisasi-organisasi onderbouw PKI. Apabila organisasi naungan PSII tersebut dikelola dengan benar, kemungkinan yang akan terjadi adalah suara mayoritas dapat diperoleh dengan sedikit berimbang dengan partai-partai lain.

Kemudian setelah berakhirnya pemilu yang dilaksanakan serentak di Indonesia pada tahun 1955, kota Surabaya melaksanakan pemilihan lokal pada tanggal 26 Juli 1957 dimana terdapat perwakilan dari 13 partai dan organisasi yang berpartisipasi dalam pemilihan diantara partai tersebut adalah Masjumi, Poesoera, PKI, Gadio Atmosantoso, Murba, Parkindo, Partai Buruh, Partai Katolik, P3RI, PERMAI, Partai Buruh, serta PSII<sup>54</sup>, sesuai dengan UU No.19 tahun 1956 mengenai Pemilihan Anggota-anggota DPRD di Surabaya, namun dari pemilihan yang diselenggarakan pada tahun 1957 ini sempat diprotes dikarenakan warga masyarakat Surabaya menganggap telah terjadi berbagai kecurangan,

---

<sup>53</sup> Valina, op, cit, hlm. 10..

<sup>54</sup> Partai2 jg.ikut pemilihan DPRD Kotapradja Surabaya”, Soeara Rakjat, 15 Juni 1957.

sehingga dilakukanlah pemilu ulangan yang diselenggarakan tanggal 25 Februari tahun 1958 dimana hasil akhir yang didapat adalah PKI mendapatkan suara terbanyak disusul NU, PNI, Masyumi, serta Baperki, sedangkan PSII tidak mendapatkan kursi di DPRD kota Surabaya pada pemilu lokal tahun 1958.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Bilqis Luciana Zunita, Dari DPRDS Kota Besar Surabaya Hingga DPRD Tk II Kotamadya Surabaya (1950-1971), Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Unair, 2016, hlm. 81.

## BAB IV

## KESIMPULAN

Proses demokrasi di suatu negara, dapat diukur dari tingkat partisipasi politik warga negara tersebut, seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1955. Sepuluh tahun setelah mendapatkan kemerdekaan dari Belanda dan Jepang, pemerintah Indonesia, merumuskan rencana agar pemilihan umum nasional segera dilaksanakan yang dimulai pada tahun 1948 banyak wacana bergulir agar pemilihan umum segera dilaksanakan. Kemudian setelah proses yang begitu panjang, dengan berbagai kejadian yang terjadi selama masa-masa tersebut, Pemilu 1955 akhirnya dapat terlaksana. Dan untuk pertama kalinya Indonesia sukses dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama di bulan September kemudian berlanjut pada bulan Desember. Pemilu 1955 ini menjadi salah satu pemilihan umum yang paling demokratis dalam sejarah Indonesia, karena melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia pada saat itu.

Suasana pemilihan umum sendiri di Surabaya cukup kondusif, dengan kondisi masyarakat saat itu dimana warga masyarakat Surabaya kebanyakan adalah sebagai buruh, mengingat Surabaya merupakan kota industri dan perdagangan, serta daerah pertanian yang terletak di pinggiran kota. Sehingga buruh dan petani memegang peranan penting dalam jalannya perpolitikan. Serikat-serikat buruh dibawah organisasi-organisasi kepartaian memanfaatkan potensi tersebut, dimana banyak sekali organisasi buruh yang berafiliasi kedalam partai-partai politik saat itu,

diantaranya adalah SOBSI (PKI), Sarbumusi (Nahdlatul Ulama), KBKI (PNI), SBSII (Masyumi), SBKI (Parkindo), serta GOBSI (PSII).

Pemilihan umum tidak akan terjadi apabila tidak adanya minat masyarakat untuk terjun di dunia politik, salah satu langkah termudah adalah dengan menjadi anggota suatu partai. Masyarakat Surabaya sendiri dalam rangka menyambut pemilihan umum sangat tinggi, dimana banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan antusiasme, semisal terdapat beberapa hal yang terjadi di tempat-tempat pemungutan suara yang ada di Surabaya diantaranya adalah orang-orang yang sakit berusaha agar dia dapat mencoblos tanda gambar yang disediakan oleh panitia, selain itu tempat pemungutan suara membludak oleh masyarakat yang sekedar ingin melihat maupun yang sudah cukup umur dan terdaftar sebagai peserta pemilihan umum.

Tidak hanya orang-orang yang baik secara fisik namun orang-orang cacat juga diperbolehkan dalam memilih calon anggota DPR maupun Konstituante. Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan presiden Soekarno ingin membuat suasana pemilihan menjadi riuh sehingga kemeriahan pemilihan umum dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

Kemunculan partai-partai politik di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa kolonial, dengan adanya berbagai organisasi yang ada pada saat itu. Seperti yang kita ketahui bahwa Sarekat Islam yang kemudian berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia pada 1930 merupakan salah satu organisasi yang tidak



hanya menaungi kepentingan bumiputera tapi juga ikut andil dalam dunia perpolitikan dibawah kepemimpinan Tjokroaminoto.

Setelah Indonesia merdeka, PSII menjadi salah satu partai yang masih bertahan hingga pemilihan umum 1955 bergulir. Pada pemilu 1955 terdapat 35 perwakilan partai dari berbagai ideologi diantaranya adalah agama, nasionalis serta komunis.. PSII menjadi salah satu dari beberapa partai yang mengusung Islam sebagai ideology dasar kepartaian.

PSII sendiri sejak awal dibentuk merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi, serta keagamaan yang bertujuan membela kepentingan rakyat bumiputera. Hal ini mengacu dengan dua pokok pikiran utama kepartaian dengan adanya Program Asas dan Program Tandhim yang menuangkan ide-ide pokok kepartaian mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia. Kedua program ini harus dipegang teguh oleh setiap kader-kader PSII yang akan diterjunkan ke dalam masyarakat.

Pada pemilu lokal yang diadakan di Surabaya pada tahun 1950, PSII menduduki satu kursi di DPRDS Kota Besar Surabaya, dengan Dahlan Kahar sebagai wakil PSII pada saat itu, sampai dengan tahun-tahun berikutnya menjelang pemilu 1955, kegiatan politik terfokus pada wacana mengenai diadakannya pemilihan umum nasional. Selain karena kondisi politik di Jakarta sedang tidak stabil pasca bergantinya pimpinan kabinet yang secara tidak langsung berpengaruh juga dalam kancah perpolitikan di Surabaya. Namun dengan adanya wacana mengenai pemilu serentak,

maka dari masing-masing partai mulai mengadakan rapat-rapat raksasa yang dihadiri oleh ribuan kader dan simpatisan partai, PSII sebenarnya cukup menonjol, dimana Dahlan Kahar beberapa kali menjadi speaker didalam berlangsungnya rapat tersebut.

Hasil yang diperoleh PSII pada pemilu lokal di Surabaya tampaknya kurang memuaskan bagi PSII, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar anggota serta lemahnya proses pengkaderan anggota yang dilakukan semenjak Tjokroaminoto wafat menyebabkan hasil yang mengecewakan bagi PSII. Hal tersebut berlanjut pada hasil Pemilu 1955 di Surabaya, PSII tidak dapat memaksimalkan perolehan suara yang didapatnya dengan jumlah suara yang sangat minor. Dibandingkan dengan partai-partai Islam lainnya yang dapat memaksimalkan hasil perolehan suara baik itu pada lingkup kabupaten maupun di secara nasional. Persaingan yang dilakukan oleh partai-partai peserta pemilu tampak timpang dengan selisih suara yang sangat besar. Suara-suara tersebut didominasi oleh partai golongan nasionalis kemudian Islam dan yang mengejutkan adalah kehadiran PKI yang berhasil meraup peringkat 4 dalam perolehan jumlah suara nasional.

Kehadiran PSII sebagai salah satu partai yang mengusung Islam sebagai ideology tidak banyak membantu dikarenakan perpecahan dalam penyatuan ideologi Islam yang bercabang yaitu antara Masyumi serta Nahdlatul Ulama,. Kedua partai tersebut berhasil meraih suara mayoritas di lingkup nasional. Begitupun juga pada pemilu lokal di lingkup kota Surabaya. Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia menjadi salah satu titik panas dalam persaingan perpolitikan nasional

dimana sebagai kota urban yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tidak dapat berbuat banyak karena organisasi buruh sebagian besar lebih memilih berafiliasi dengan ideology komunis. Sebenarnya PSII mempunyai sayap keanggotaan dengan dibentuknya GOBSI (Gabungan Organisasi Buruh Sarekat Islam) yang jika dimaksimalkan dapat berperan penting dalam mendapatkan suara pada masyarakat Surabaya. Seperti yang berhasil dilakukan oleh PKI, dimana mereka dapat memaksimalkan organisasi buruh yang berafiliasi ke PKI.

Hal-hal yang berpengaruh besar selain karena adanya faktor buruh, hal lain yang mempengaruhi jatuhnya PSII adalah terpecahnya suara umat Islam di Surabaya, mayoritas umat Islam di Surabaya lebih memilih NU dan Masyumi daripada PSII, selain itu mereka lebih memilih ideology lain daripada memilih PSII. Kalangan tradisional lebih memilih NU sedangkan Moderat lebih memilih Masyumi, yang membuat PSII semakin tenggelam dari partai-partai lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Arsip:

Arsip KBS, Kumpulan Foto dalam “Pemilu 1955 di Jawa Timur” Koleksi Djawatan Penerangan, (Surabaya: Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2003)

Arsip KBS, Daftar nama dan alamat anggota partai dan organisasi di Surabaya tahun 1955, (Surabaya: Arsip Kota Surabaya, 1955)

Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 tentang Undang-Undang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Penjelasan Tambahan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 517, (Surabaya: Arsip Kota Surabaya, 1954)

### Sumber Surat Kabar dan Majalah:

Haluan, edisi 7 Oktober 1955, Rabu 26 Oktober 1955.

Harian Umum, 1 Oktober 1955, 3 Oktober 1955.

Indonesia Berjuang, 1 Oktober 1955.

Indonesia Raya, Selasa 22 November 1955.

Merdeka, 1 Oktober 1955.

Soeara PSII, Ladjnah Tanfidziyyah PSII, November 1937.

PDM, 5 Mei 1955.

Perdamaian, 1 Oktober 1955.

Terompet Masyarakat, 10 Januari 1955. Senin 28 Februari 1955, Kamis 5 Mei 1955, Kamis 12 Mei 1955, Sabtu 14 Mei 1955, Rabu 1 Juni 1955.

Surabaya Post, 26 November 1953.

Suara Rakyat, Rabu, 21 Desember Tahun 1955.



Sumber Buku: .

Arni Muhammad, 2009, Komunikasi Organisasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Badri Yatim, 2002, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Barlan Setiadijaya, 1991, 10 November 45: Gelora Kepahlawanan Indonesia, Jakarta: Yayasan Dwiwarna.

Bibit Suprpto, 1998, Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Boland, B.J. 1985, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972, Jakarta: Grafiti Pers.

Deliar Noer, 1979, Gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942), Jakarta: LP3ES.

Fajlurrahman Jurdi, 2009, Aib Politik Islam: Perselingkuhan Binal Partai-partai Islam Memenuhi Hasrat Kekuasaan, Yogyakarta: antonyLib-Indonesia.

Fatkhurrohman, 2010, Pembubaran Partai Politik di Indonesia: Tinjauan Historis Normatif Pembubaran PARPOL Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi, Malang: SETARA Press.

Feith, Herbert, 1999, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Howard Dick, 2002, Surabaya City of Work: A Socio Economic History 1900-2000, Athens: Ohio University Press.

Imam Suhadi, 1981, Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977, Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.

Kansil, C.S.T. , Drs, S.H, 1970, Inti Pengetahuan Pemilihan Umum, (Jakarta: Pradnja Paramita,

Kuntowijoyo, 1996, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Bentang

M.A. Gani, 1984, Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam, Jakarta: Bulan Bintang.

Miriam Budiarjo, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka.

- \_\_\_\_\_. 1994, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Masyhur Amin, 1996, Syarikat Islam: Obor Kebangkitan Nasional 1905-1942). Yogyakarta; Al Amin Press.
- Mohammad Iskandar dkk, 2000, Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, Jakarta; Putra Prima.
- M. Rusli Karim, 1983 Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut, Jakarta: CV. Rajawali.
- Nasihin, 2012, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1942, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purnawan Basundoro, 2010, Memerahkan Kota Pahlawan: Pergulatan Partai Komunis Indonesia di Kota Surabaya (1955-1965), Yogyakarta; Penerbit Ombak.
- \_\_\_\_\_. 2012, Sejarah Pemerintahan Kota Surabaya; Sejak Masa Kolonial sampai Masa Reformasi (1906-2012) (Solo: Elmatara Publishing.
- Ramlan Surbakti, 2010. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo.
- Ricklefs, M.C. 1991, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Rumidan Rabi'ah, 2009, Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 1975, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Simanjuntak, P.N.H. 2003, Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan.
- Sjamsju Koesmen dan Pangestu B.W, Kota Besar Surabaya, (Surabaya: Djawatan Penerangan, 1957.
- Sri Margarana dan M. Nursam (ed), 2010, Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial, Yogyakarta: Ombak.

- Sukarno, 1964, Di Bawah Bendera Revolusi, Djilid Pertama, Jakarta; Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi
- Valina Singka Subekti, 2014, Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.,
- Wilopo, 1978, Zaman Pemerintahan Partai -Partai dan Kelemahan-Kelemahannya, Jakarta: Yayasan Idayu, cetakan ke II.


Sumber Skripsi:

- Bilqis Luciana Zunita, Dari DPRDS Kota Besar Surabaya Hingga DPRD Tk II Kotamadya Surabaya (1950-1971), Surabaya: Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2016.
- Dony Fahamsyah Setia Budi, 2012, Dinamika Sarekat Islam Surabaya (1912-1921), Surabaya: Skripsi Fakultas Ilmu Budaya
- Endang Muryanti, 2009, Sarekat Islam Semarang Tahun 1913-1920, (Semarang: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Muhammad Muhibin, 2009, “Politik Hijrah” Perjuangan Partai Sarekat Islam Indonesia Dalam Melawan Pemerintah Belanda 1923-1940 M Yogyakarta: Skripsi Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rendy Radyatma, 2014, Skripsi Pertarungan Kampanye PKI, Nahdlatul Ulama, Dan Masyumi Menjelang Pemilu 1955 Di Surabaya, (Surabaya; Universitas Airlangga..

Sumber Internet

[http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian\\_Elections/Indo-pemilu99/17psii.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu99/17psii.htm)

#### DATA INFORMAN



Nama : Djarot

Umur : 58 tahun

Status : Ketua Cabang Sarekat Islam ranting Surabaya periode 2015-2017

Alamat : Jl. Padmosusastro No. 23 Surabaya

Nama : Bey Arifin

Umur : 70 tahun

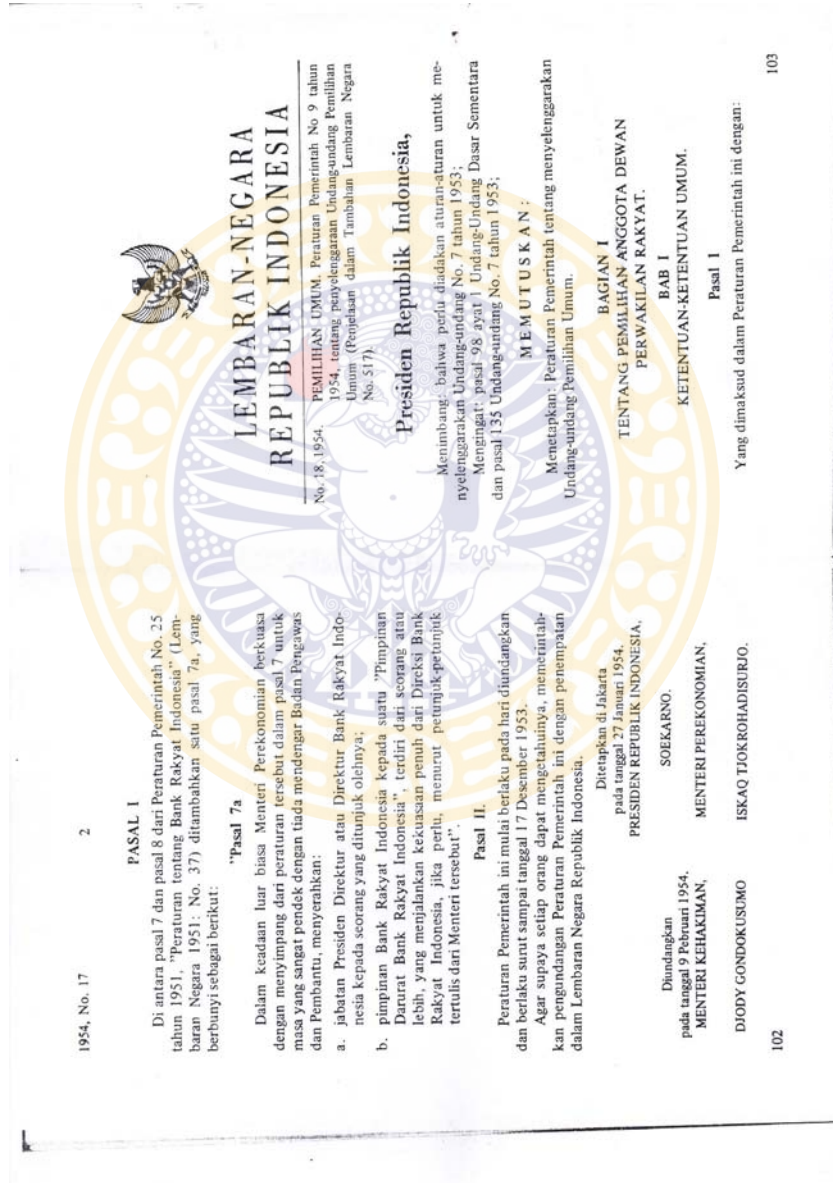
Status : Anggota organisasi Sarekat Islam Surabaya Periode 1970

Alamat : Jl. Embong Malang Surabaya

## LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

Lembaran Negara Republik Indonesia mengenai disahkannya peraturan Pemilu 1955





- Undang-undang ialah Undang-undang Pemilihan Umum;
- Pendafar ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang Pemilihan Umum;
- Partai ialah partai politik atau organisasi lain ataupun suatu kumpulan pemilih yang memakai nama;
- asrama ialah perumahan tempat tinggal anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi, yang tata-tertibnya diatur dan dipertanggung jawabkan kepada seorang Komandan; dalam pengertian asrama termasuk kapal perang Republik Indonesia;
- kesatuan ialah:

1. bagi Angkatan Perang: Batalyon atau Kesatuan yang sederajat dengan itu dan Kompi atau Kesatuan yang sederajat dengan itu yang terpisah;

1. Kompi Mobiele Brigade Polisi dan
2. Kepolisian Wilayah atau yang sederajat dengan itu.

Apabila suatu tanggal yang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka tanggal itu diundurkan sampai tanggal hari kerja berikutnya.

Yang dimaksud dengan hari libur ialah hari kantor Pemerintah di Daerah yang bersangkutan ditutup.

Pemerintah dapat merubah tanggal-tanggal yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa tindakan-tindakan dalam pemilihan diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah ini.

Perubahan-perubahan ini hanya berlaku untuk satu pemilihan.

Panitia Pemilihan Indonesia memberi petunjuk-petunjuk seperlunya kepada penyelenggara-penyelenggara pemilihan, supaya penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik dalam waktu yang ditentukan.

Segala surat menyurat dan tulisan dilakukan dengan huruf Latin.

**BAB II**  
**TENTANG DAFTAR**

## § 1. TENTANG PENDAFTARAN PEMILIH.

(1) Pada waktu yang diumumkan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih pendatang mendatang rumah-rumah penduduk untuk mencatat dari penghuni rumah-rumah itu nama-nama pemilik serta keterangan-keterangan lain yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang.

(2) Keterangan-keterangan termaksud dalam ayat (1) didapatnya dari yang bersangkutan sendiri.

Seorang pemilih yang tidak dijumpai di rumahnya oleh pendaftar, dapat mendaftarkan diri pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.

- (3) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) Panitia Pemungutan Suara dapat menentukan, bahwa berhubung dengan keadaan setempat dan mengingat kelancaran pendaftaran pemilih dalam suatu desa seluruhnya atau dalam suatu bagian desa, pendaftaran pemilih dilakukan pada tempat yang ditunjuk oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan Kabupaten atas kuasa Panitia Pemilihan

1954, No. 18

4

mengawasi supaya Panitia Pemungutan Suara melakukan kekuasaannya ini sebagai satu pengecualian.

#### Pasal 7

(1) Selain dari bahan-bahan tersebut dalam pasal 6 pendaftaran mencatat juga jumlah jiwa penduduk warganegara dari tiap-tiap keluarga. Jumlah ini diperoleh dari kepala keluarga, atau, jika tidak dapat diperoleh dari kepala keluarga, dari salah seorang anggota keluarga itu.

(2) Jika ada keragu-raguan, pendafatar meminta bantuan penduduk desa yang dianggap mengetahuinya; dalam keragu-raguan ini Panitia Pendaftaran Pemilih menentukan terakhir.

#### Pasal 8

Permulaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk daerah-pemilihan masing-masing dengan mengingat bahwa pada tanggal 1 April pendaftaran pemilih harus sudah selesai.

#### Pasal 9

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memimpin pendaftaran pemilih dan mengusahakan supaya tugas Panitia Pendaftaran Pemilih dikerjakan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan.

### § 2. TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.

#### Pasal 10

(1) Panitia Pendaftaran Pemilih selambat-lambatnya pada tanggal 15 April harus sudah menyusun daftar pemilih sementara.

(2) Daftar pemilih sementara disusun menurut bentuk seperti ditetapkan dalam lampiran model A.

106

1954, No. 18

5

(3) Seorang pemilih didaftarkan dengan nama selengkapinya yang disusun menurut abjad. Cara menulis nama pemilih adalah sebagai berikut:

- a. nama keluarga, marga, suku, gelar dan sebagainya yang dirangkaikan dengan nama pemilih, ditulis dahulu, demikian juga apabila seorang pemilih mempunyai nama dewasa dan nama kecil, maka nama dewasa itu ditulis lebih dahulu; nama panggilan, jika ada, ditulis paling belakang;
- b. wanita yang bersuami, atau janda yang masih memakai nama almarhum suaminya, nama suaminya ditulis lebih dahulu dan nama wanita janda itu sendiri ditulis di belakang nama suami tadi.

#### Pasal 11

(1) Schelai daftar pemilih sementara termaksud dalam pasal 10 mulai tanggal 16 April oleh Panitia Pendaftaran Pemilih diumumkan dalam Kantor Kepala Desa atau ruangan lain yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.

(2) Dalam waktu sampai tanggal 17 Mei penduduk dapat mengajukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih usul-usul perubahan terhadap isi daftar pemilih sementara. Dalam waktu itu pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri ke-pada Panitia Pendaftaran Pemilih.

Panitia Pendaftaran Pemilih segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Berhubung dengan keputusan itu daftar pemilih sementara diperbaiki seperlunya.

(3) Perbaikan daftar pemilih sementara tersebut dalam ayat (2) oleh ketua Panitia Pendaftaran Pemilih berangsur-angsur diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaya perbaikan-perbaikan itu diadakan juga pada daftar pemilih sementara yang sudah dikirimkan kepadanya.

107

1954, No. 18

6

7

1954, No. 18

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih bertindak sedemikian juga terhadap pengaduan-pengaduan yang dimintakan keputusan dari Panitia Pemungutan Suara.

### § 3. TENTANG DAFTAR PEMILIH.

#### Pasal 12

(1) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana termaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggap sebagai daftar pemilih.

(2) Panitia Pemungutan Suara segera memberi keputusan atas pengaduan-pengaduan tersebut dalam pasal 11 ayat (3). Selambat-lambatnya tanggal 1 Juni Panitia Pemungutan Suara sudah mengesahkan daftar pemilih dengan mengingat keputusan atas pengaduan-pengaduan tadi.

(3) Segera sesudah itu Ketua Panitia Pemungutan Suara mengirimkan sehelai turunan daftar pemilih yang sudah disahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa yang bersangkutan.

Sehelai daftar pemilih itu disimpan di kantor Panitia Pemungutan Suara.

### § 4. TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.

#### Pasal 13

(1) Mulai tanggal 1 Juni hingga 7 Juni diberikan kesempatan kepada diri dalam suatu daftar pemilih tambahan.

(2) Selambat-lambatnya tanggal 15 Juni Panitia Pendaftaran Pemilih sudah menyusun daftar pemilih tambahan menurut bentuk dan cara seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3).

Selekas mungkin sehelai daftar pemilih tambahan itu oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

108

#### Pasal 14

Ketua Panitia Pemungutan Suara segera mengirimkan sehelai turunan daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa yang bersangkutan, untuk dibubuhkan pada daftar pemilih dari desa itu.

### § 5. TENTANG PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH.

#### Pasal 15

(1) Sampai 30 hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara memelihara daftar pemilih/daftar pemilih tambahan, yang sudah disahkan, dengan mengadakan perubahan yang diperlukan, berhubungan dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang pemilih yang telah terdaftar.

Perubahan itu diadakan atas keterangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan atau, apabila Panitia Pendaftaran Pemilih sudah dibubarkan, dari Kepala Desa yang bersangkutan.

(2) Seorang yang dicalonkan, sedang namanya belum tercatat dalam daftar pemilih atau dalam daftar pemilih tambahan, harus mendaftarkan diri untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan, sehingga hari penutupan pencalonan.

(3) Segala perubahan daftar pemilih atau daftar pemilih tambahan tersebut dalam ayat (1) dan (2) diberitahukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih/Kepala Desa untuk dimuat juga dalam daftar yang bersangkutan.

#### Pasal 16

(1) Setelah Panitia Pemungutan Suara dibubarkan, daftar pemilih serta daftar pemilih tambahan termaksud dalam pasal 13, disimpan dan dipelihara oleh Camat.

109



1954, No. 18

8

- (2) Setelah Panitia Pendaftaran memilih dibubarkan, turunan daftar memilih/daftar memilih tambahan diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipelihara seperlunya.
- (3) Dalam daerah-daerah yang dalam menjalankan Undang-undang dibentuk sebagai kecamatan/desa berdasarkan pasal 130 Undang-undang, penyimpanan dan pemeliharaan (turunan) daftar memilih serta daftar memilih tambahan diatur oleh Kepala Daerah, yang wilayahnya melingkupi daerah yang dibentuk sebagai Kecamatan/Desa itu.

## § 6. TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS.

### I. Mengenai Angkatan Perang dan Polisi.

#### Pasal 17

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 berlaku seluruhnya terhadap pendaftaran anggota Angkatan Perang dan Polisi dengan pengecualian di bawah ini:

- (1) bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang bertempat tinggal dalam asrama, keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dan keterangan-keterangan tentang jumlah jiwa dari keluarganya masing-masing, yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, boleh ditetapkan oleh Panitia Pendaftaran memilih dari daftar administrasi ketentaraan/kepolisian;
- (2) bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang bertempat tinggal dalam asrama, penyusunan daftar memilih tambahan yang dimaksud dalam pasal 13, boleh dilakukan oleh Panitia Pendaftaran memilih atas keterangan Komandan, yang bertanggung jawab atas asrama itu;
- (3) bagi anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang tidak bertempat tinggal dalam asrama, tetapi pada masa pendaftaran memilih mengikuti kesatuannya melakukan tugas di luar tem-

110

9

1954, No. 18

pat kediamannya, berlaku ketentuan-ketentuan termasuk sub (1) dan (2) dengan pengertian, bahwa yang memberi keterangan-keterangan ialah Komandan Kesatuannya.

#### Pasal 18

Komandan Kesatuan yang bersangkutan mendapat dari Ketua Panitia Pemungutan Suara kutipan daftar memilih/daftar memilih tambahan mengenai masing-masing anggota Angkatan Perang dan Polisi dari kesatuannya.

### II. Mengenai tahanan dan tawanan

#### Pasal 19

(1) Memilih yang sedang berada dalam tahanan/tawanan didaftarkan dalam rumah tahanan atau kamp tawanan oleh pendaftaran dari desa dimana rumah tahanan/kamp tawanan itu berada.

Keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan/atau keterangan tentang jumlah jiwa keluarga memilih itu masing-masing diperoleh dari Kepala rumah tahanan atau dari Komandan Kamp tawanan yang bersangkutan.

(2) Memilih yang setelah didaftarkan, dikeluarkan dari tahanan/tawanan dapat meminta kutipan daftar memilih kepada Panitia Pendaftaran memilih yang bersangkutan untuk dimasukkannya ke dalam daftar memilih dari tempat tinggalnya.

(3) Sororan tahanan/tawanan yang sudah didaftarkan sebelum masuk rumah tahanan/kamp tawanan, dapat meminta kutipan daftar memilih mengenai dirinya dari tempat tinggalnya untuk dipergunakan pada pemungutan suara. Permintaan itu dimajukan dengan perantaraan Kepala rumah tahanan/Komandan kamp tawanan, yang meneruskan permintaan itu kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dari tempatnya.

Dalam hal tersebut diadakan catatan dalam daftar memilih

111

1954, No. 18	10	11	1954, No. 18
yang bersangkutan, bahwa pemilih termaksud tidak akan memberikan suara pada tempat pemberian suara dimana dia didaftarkan itu, catatan nama dihapuskan pada saat pemilih yang bersangkutan mengembalikan kutipan itu.			
<b>III. Mengenai pemilih di luar Negeri.</b>			
<b>Pasal 20</b>			
(1) Pemilih-pemilih yang berada di luar Negeri mendaftarkan diri pada Panitia Pemilih Luar Negeri dari daerah dimana ia berada dengan membawa surat-surat bukti yang diperlukan.			(3) Selambat-lambatnya tanggal 10 Mei Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerahnya kepada Panitia Pemilihan dari daerah pemilihan yang melingkungi daerah kabupaten itu. Dalam batas waktu itu juga Menteri Luar Negeri harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warganegara Indonesia yang berada di Luar Negeri kepada Panitia Pemilihan Jakarta Raya.
Dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 6 ayat (2) kalimat kesatu dan pasal 7 ayat (1).			
Pengumuman dan pemeliharaan daftar pemilih/daftar pemilih tambahan diadakan atas keterangan pemilih sendiri.			
(2) Jika di dalam kantor Perwakilan Luar Negeri sudah sedia daftar warga negara RI yang berada di lingkungan kantor Perwakilan itu, maka kutipan daftar tersebut dapat merupakan daftar pemilih.			(4) Selambat-lambatnya pada tanggal 15 Mei Ketua Panitia Pemilihan harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah pilihannya kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
<b>BAB III.</b>			
<b>TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA.</b>			
<b>Pasal 21</b>			
(1) Selambat-lambatnya pada tanggal 16 April Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warga negara Indonesia dalam desanya kepada Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan.			(5) Selambat-lambatnya pada tanggal 20 Mei Panitia Pemilihan Indonesia harus sudah mengadakan rapat termaksud pasal 34 ayat (1) Undang-undang dan harus berusaha supaya selambat-lambatnya tanggal 1 Juli Panitia-penitia Pemungutan Suara sudah dapat mengemukakan dalam daerahnya jumlah anggota yang boleh dipilih untuk seluruh negara dan dalam masing-masing daerah pemilihan.
(2) Selambat-lambatnya tanggal 1 Mei Ketua Panitia Pemungutan Suara harus sudah memberitahukan jumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten yang daerahnya meliputi daerah pemungutan suara itu.			
<b>Pasal 22</b>			
Jika pada pembagian jumlah kekurangan anggota di antara daerah-daerah pemilihan yang memperoleh jumlah anggota ter sedikit sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 32 ayat 2 kalimat 3 Undang-undang, ternyata ada dua daerah pemilihan atau lebih, yang memperoleh jumlah anggota sama banyaknya, sedang jumlah kekurangan anggota tidak cukup untuk dibagikan di antara daerah-daerah pemilihan yang jumlah warganegara lebih besar.			
Dalam keadaan sama jumlah penduduknya itu, maka diadakan undian.			



## LAMPIRAN 2

## Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai dan Organisasi di Surabaya

No.	N a m a	Alamat	Party/ Organisasi	No. Telpun Kantor
1.	Abdoel Hadie H.	Keliasin No.127	Masjumi	KBS.p 47 S. 5009
2.	Achmad Sjaichu	Kedungterukan V/24	"	S. 1098
3.	Angka Nitiasastro Dr.	Djl.Ambengan 20	P.N.I.	U. 451 S. 405
4.	Anwar Zain M.	Lawang Seketeng III/26	Masjumi	S. 3033
5.	Bessalah S.H.	Djl. Perak 95	P.N.I.	U. 1993
6.	Damenhoeri R.	Kedungsroko VI/6	Masjumi	
7.	Djojohadhiredjo	Djl.Tjiliwung 65	S.B.I.I.	KBS. p 79 S. 3295
8.	Hasanlahdji	Njemplungen XI/4	Masjumi	U. 1239
9.	Kouthoofd, J.Th.	Djl.R.A.Kartini No.129	P.I.N.	S. 4781 p.48
10.	Kwee Mo Liang	Djl.Slamet 10	Party Katholik	S. 2240
11.	Machmoed	Tambaksari 99	P.N.I.	S. 907
12.	Makmoer, R.P.A.	Djl.Rengkah Besar No.1	P.S.I.	KBS. p.14 S. 4816
13.	Gadio Atmosantoso	Djl.Djokodolok 25	P.S.I.I.	S. 2146
14.	Sumidjan Wignjo- wardojo	Djl.Asahan 3	Masjumi	S. 2220
15.	Misbach H.	Djl.Trunodjojo 74	Masjumi	S. 4848
16.	Mohamad Saleh Had1	Keliasin I/2	Masjumi	S. 2319
17.	Nadjamudin- R.Zakijah Nj.	Djl.Tjiliwung 65	Masjumi	S. 1610
18.	Oesman Muttacien	Pantiidjedjar 7	Masjumi	U. 964
19.	Pesik, J.R.	Djl.Pahlawan 100	P.R.I.	S. 246
20.	Poejer, Nj. R.A.	Ondomohen 84	P.N.I.	KBS. p.47 S. 3777
21.	Prajitno, S.D.	Djl.Diponegoro 8	P.N.I.	S. 4240
22.	Redjemin Nasution	Taman Rengkah 3	Parindra	U. 3090
23.	Resjid Padmo- soediro, R.	Djl.Kutei 41	Parkindo	S. 4632
24.	Sanoesi, R.	Djl.Raya Dr.Su- tomo No.37	P.I.R.	S. 1252 S. 755
25.	Soedarmo	Pulo Wonokromo No.219	P.S.I.	S. 823
26.	Soedigdo, R.K.H.	Djl.Welirang 4	P.N.I.	KBS. p.82 S. 3487
27.	Soegiman, M.	Gubeng Kling- singen II/7	Party Murba	U. 2042
28.	Soendjoto	Djl. Panti Dermo 26	P.N.I.	U. 2377 S. 2023
29.	Soeprapto, R.	Djl.Widjajakusuma No.29	Masjumi	S. 4384
30.	Soeripto, Mr.Dr. R.M.	Djl.Musi 29/31	P.N.I.	S. 4560 S. 4950

BADAN ARSIP KOTA SURABAYA  
TGL. REPRO: 2/9/5

## LAMPIRAN 3

## Apakah KONSTITUANTE itu?

Halaman 2 Indon

## djakarta sehari-hari

### APAKAH KONSTITUANTE ITU?

**Djakarta, Minggu (18).**

Pemungutan suara pada tgl. 29 September 1955 yang baru lalu adalah untuk memilih anggota-anggota DPR. Pemungutan suara pada tgl. 15 Desember 1955 nanti adalah untuk memilih anggota2 Konstituante.

Konstituante atau dalam bahasa Indonesia dinamakan Sidang Pembuat Undang-undang Dasar adalah suatu Dewan Tertinggi yang bertugas membuat/menetapkan Undang-undang Dasar atau Konstitusi.

Undang2 Dasar yang dibuat ditetapkan oleh Konstituante itulah nanti yg akan menggantikan Undang2 Dasar Sementara RI yang ada sekarang ini.

Konstituante ini adalah keputusan politik yang tertinggi. Konstituante atau Undang2 Dasar menurut paham modern adalah memuat ketentuan-ketentuan dasar dari tjarak politik dan susunan suatu negara. Yang merupakan dasar daripada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang-undang Dasar merupakan bahan yang berwujud peraturan tertulis yang terpenting yang memuat dasar-dasar dan asas-asas dari tetapan dan tata-susunan negara.

Pokok persoalan yg ditetapkannya dalam Konstituante.

Didalam Konstituante atau Sidang Pembuat Undang2 Dasar nanti pokok-persoalan utama lain ialah mengenai:

1. Bentuk Negara dan Kebudayan.
2. Bentuk Pemerintahan.
3. Daerah Negara.
4. Kewarganegaraan dan penduduk negara.
5. Sistem Pemerintahan.
6. Hak Perundang-Undangan.
7. Peradilan.
8. Hubungan Luar Negeri.
9. Perbatasan Negara.
10. Keuangan Negara (Staatsfinancien).
11. Pemerintahan Daerah (desentralisasi).

Sikap kita akan melahirkan Undang2 Dasar nanti hendaknya rakyat waspada dan bijak serta didalam memilih anggota2 Konstituante itu.

Inilah bahwa memilih berarti memberikan kepercayaan, kepercayaan atau daya sedikit. Karena itu berikanlah kepercayaan saudara itu kepada orang-orang yang menurut kejakinan saudara mempunyai kepribadian yang tinggi, tjakap, bijaksana dan berbudhi luhur, sehingga Undang-undang Dasar yang dilahirkan nanti adalah baik dan bermutu tinggi dan meletakkan dasar-dasar keadilan dan kemajuan negara.

Djanganlah saudara enggan untuk

**Dua Orang Anggota Polisi Ditahan**

**Djakarta, Senin.**

Dua orang anggota polisi dikota ini Djum'at 11 telah ditahan oleh Reserse Kriminal Kepolisian Djakarta Raya, yang kini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap dari kedua orang itu.

Menurut keterangan yang diperoleh

**Pembatasan Pemakaian Telpun**

**Djakarta, Senin.**

Guna kepentingan pemilihan umum konstituante, ketua Koordinasi Komando Daerah Meringkap Komando dan Komando Militer Kotabesar Djakarta Raya, letnan kolonel Sambas, minta kepada para pemakai telpun diwilayah kota besar Djakarta Raya dan sekitarnya supaya selama mulai dari tanggal 13/12-55 jam 08.00 sampai dengan tanggal 13/12-55 jam 12.00 membatasi pemakaian dan pembatasan dari pelayat telpunnya.

Berapapun jam tidak mengijinkan penggunaan ini dapat diambil tindakan seperti ini, demikian perintah.

**SPSI Tidak Jadi Mogok**

**Djakarta, Senin (18).**

SPSI dalam suratnya menyatakan bahwa aksi pemogokan yang akan diorganisir oleh SPSI pada tanggal 12 Desember 1955 ditunda sampai waktu yg akan ditentukan lagi. Ditjelaskan bahwa tuntutan SPSI akan tindakan ke mahalan dinaikkan sebesar 15% dan upah brute sebulan dengan berlaku surut mulai 1 Februari 1955 kepada direktur Peln telah mendapat perhatian dari PPUst, dengan akan dipaparkan penitit erquite. Lebih lanjut ditjelaskan bahwa direktur Peln telah membatalkan dan memperhatikan tuntutan, dan direktur akan memberikan jawaban hari Sabtu tentang tuntutan tersebut.



## LAMPIRAN 4

## Cara-cara Pemungutan Suara dalam Pemilu di KBS

Maret 6, Sept 1955

## BERITA<sup>2</sup> DJAWA TIMUR

### Tjara<sup>2</sup> pemungutan suara didalam pemilihan umum dikota besar Surabaya

Pemerintah telah menetapkan, bahwa pemungutan suara untuk memilih anggota<sup>2</sup> DPR. (Parlemen-Dewan Perwakilan Rakyat) pada tgl. 29 September 1955 dan untuk memilih anggota<sup>2</sup> Konstituante pada tgl. 15 Desember 1955.

**SEBELUM TGL. 29 SEPTEMBER 1955**

1. Tiga hari sebelumnya, sebelum tgl. 29 September '55 Ketua Panitia Pemungutan Suara (P3S) sudah mengumumkan tempat dan waktu pemberian suara, dan memilih yang harus datang ditempat itu.
2. Disamping itu kepada tiap2 pemilih disampaikan surat pemberitahuan tertulis, tentang pemungutan suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang memuat nama pemilih, nomor pemilih, tempat pemberian suara dan waktu pemberian suara, pukul 08.00 sampai pukul 14.00.

Dengan pengumuman itu nanti dapatlah tiap2 pemilih mengetahui kemana atau ketempat suara mana, ia dapat memberikan suaranya ketempat pemberian suara.

**PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA**

1. Pemungutan suara akan dilakukan dalam satu hari, dari jam 08.00 sampai 14.00.
2. Sebelum Saudara dibolehkan masuk kedalam ruangan tempat duduk pemilih, terlebih dahulu Saudara diharuskan oleh anggota Panitia Penyelenggara (PS) tentang nomor dan nama Saudara, selaku pemilih. Untuk memudahkan pemeriksaan, bawalah surat pemberitahuan yang saudara terima.
3. Setelah melalui pemeriksaan, saudara dipersilahkan untuk kedalam ruangan tempat duduk pemilih.

Peringatan siapapun juga yang berada didalam ruangan pemungutan suara tidak diperbolehkan membawa sesuatu sendjata.

4. Tepat pada jam 08.00 pemungutan suara dimulai.

Ketua Saudara<sup>2</sup>, oleh Ketua Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (P3S) diperlihatkan kotak suara utk dapat sama2 disaksikan, bahwa kotak suara masih kosong sama sekali.

Kemudian oleh Ketua kotak suara ditutup, dikunci dan dicatetkan di depan meja Panitia Penyelenggara (P3S).

Sesudahnya, kepada Saudara<sup>2</sup> oleh Ketua diperlihatkan pula sebuah bungkusan, yang masih dalam keadaan utuh artinya bungkusannya belum dirobek. Bungkusan ini berisi surat2-suara. Setelah ini sama2 kita saksikan, maka Ketua merobek bungkusannya,

menghitung surat suara dan mengumumkan hasil penghitungan.

Inilah yang perlu saudara ketahui, sebelum saudara dipersilahkan memberikan suara saudara.

### III. Bagaimana tjara<sup>2</sup> Saudara memberikan suara?

1. Kemudian Saudara dipersilahkan memberikan suara, sebelumnya, Saudara harus menyebutkan nama atau saudara dan nomor saudara dalam daftar pemilih, atau memperlihatkan surat pemberitahuan kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (P3S).
2. Seterusnya saudara menuju anggota P3S, yang akan memberikan nomor surat-suara.

**Bagaimana surat-suara itu?**

Surat suara adalah dalam keadaan berlipat, dengan tanda gambar dalam ruangan sebelah dalam.

Disebelah luar surat (sebelum diberikan kepada saudara) harus terlebih dahulu dibubuhi tanda tangan oleh 3 (tiga) anggota P3S (Ketua dan dua orang anggotanya).

Periksalah dengan sampai saudara menerima surat yang telah berlipat atau yang kotor.

3. Setelah menerima surat suara, Saudara segera menuju ke bilik pemungutan suara.

**Bagaimana keadaan bilik pemungutan suara?**

Dalam tiap2 bilik pemungutan suara, ditempelkan daftar-talon-tetap: disediakan meja, pensil (Pencil), alat penusuk dan bantalan (menjerupai bantalan yang diperbuat dari kain dan diisi dengan pasir kering yang berukuran 12 x 12 cm, dan tebalnya 2-5 cm).

**Memberikan suara ditentukan dua tjara**

- Pertama: memberikan suara dengan menusuk salah satu tanda gambar, yang ada dalam surat suara.
- Kedua: memberikan suara kepada seorang talon dengan menulis (talon Letin), nomor-daftar-talon, No. talon dan nama talon.

**Tjara pertama.**

Kalau Saudara ingin memberikan suara dengan tjara ini, maka tanda gambar, tjara<sup>2</sup> adalah sebagai berikut:

Bukalah surat suara itu dan bentangkanlah selebar-lebarnya (djangan berlipat).

Setelah Saudara melihat tanda gambar, yang saudara ingin tusuk, letakkanlah surat suara dengan tangan kanan yang sudah terlatih diatas bantalan. Ambil alat penusuk, dan tusuklah tanda gambar itu sampai tembus. Kalau ini telah saudara lakukan, selesailah saudara memberikan suara.

**Peringatan:** Saudara hanya boleh menusuk satu tanda gambar, dan tidak boleh lagi memberikan suara dengan tjara menuliskan.

**Tjara kedua.**

Kalau Saudara ingin memberikan suara dengan menulis, Saudara perhatikan nama<sup>2</sup> tjalon yang terdapat dalam daftartalon tetap. Setelah nama yang

## LAMPIRAN 5

## Partai-partai Islam Supaja Bergabung Saja

**Andjuran Sjah Suleman Arrasoly :  
Partai<sup>2</sup> Islam supaja berga-  
bung sadja**

Bukittinggi, (Antara):  
Sjah Suleman Arrasoly di-  
jandura, seorang ulama tertua  
Tengah telah mengemukakan an-  
duran supaja partai-partai Is-  
lam yang kecil-kecil tidak masu-  
kut wali-walinya akan terpih-  
kiespotent, supaja bergabung  
saja dengan partai-partai Islam  
lainnya akan sekurangnya dapat  
mendukung kepada anggota-  
nya untuk dapat menjadi salah  
satu (salin partai) Islam yang  
banjak mendapat dukungan.

Anduran ini dikemukakan ber-  
hubung dengan akan dilangsun-  
kan pemuatan dalam buku kon-  
stitusi yang tanggal 15 De-  
seMBER 1955.

Perimbangan yang dikemukakan  
ini telah diterima secara umum  
oleh ulama di daerah tersebut  
pertama, dan bila diperinci-  
kan, maka jelas ini adalah wa-  
dibukutannya. Diandjurkan

Abd. Gafur sebagai pemimpin  
Kopond, kita belum dapat me-  
nyatakan dengan kepastian  
apakah mana baik mukim di  
Mekkah atau di Djeddah. Se-  
dang berturut-turut dengan ke-  
siden, sudah berhitung terus te-  
ras sebagai berhitung. Sehingga  
terkumpul adanya. Sehingga sudah  
mereka di Tengah Hedjaz sudah  
terkumpul lagi. Sehingga tidak  
perlu pejadi<sup>2</sup> kita yang ada di  
Mekkah yang sudah mempunyai  
nisan menanti ilmu pengetahuan  
sudah tidak lalu merubah lebih  
meningkatkan penerbitan men-  
jadi "hadis" oleh di Mekkah.  
Kesimpulan dari semua ini  
kesimpulan apa yang dibuat  
oleh Hedjaz itu ialah:

1. Tambahan devizen tentang  
keimanan yang dari kelangka-  
an di Indonesia dengan di-  
lah yang sekiranya hidup un-  
tuk hidup di Hedjaz.
2. Penghargaan Pemerintah ter-  
hadap para mukim yang me-  
negakkan Republik Indonesia  
dengan "de facto" dan "de  
jure".
3. Sekolah untuk perguruan  
"Darul Ulum" yang mereka  
dirikan serta madrasah<sup>2</sup> la-  
nya untuk kaum mukim di  
Tengah Hedjaz.

Madrasah apa yang saja tula  
diatas semuanya ini mendapat  
tidak banyak perhatian. Teru-  
tu dari Kagi dan Kem. Lusa  
surut.

**TULUNGAGUNG :  
I.P.P.I. MENGADAKAN  
REORGANISASI**

Pada tgl. 23 Okt. I.P.P.I.  
Tjab. Tulungagung telah  
mengadakan reorganisasi.  
Susunan pengurus baru  
terdiri dari ketua: sdr. Ali  
Wk. ketua: sdr. Sukarna-  
ni, sekretaris I: sdr. Ma-  
kamto, sekretaris II: sdr.  
L.J. Supeno, bendahara I:  
sdr. Chomsatun dan benda-  
hara II: sdr. Sukarno.

**HARAPAN PANEN  
TIPIS**

Sedjak tgl. 23 Okt. jl. su-  
ngai Rawa telah memuntah-  
kan, airnya sehingga meng-  
akibatkan banjir didesa  
dan sawah yang ada dise-  
kitarnya.

Menurut keterangan pa-  
ra petani, mulai awal tahun  
1955, telah 6 kali mengalami  
banjir. Sawah ladangnya  
menupakan rawa tak dapat  
ditanami. Baru sesudah bu-  
lan Agustus jbl. sawahnya  
dapat dikedirakan. Tetapi  
harapan panen tipis, padi-  
nya sebagian tenggelam da-  
lam air. Diterangkan pula,  
kalau dalam 7 hari air tidak  
surut, maka...

**MANOEUVRE BERSA-  
MA NEGARA-2 SE-  
ATO.**

Didekat Singapura  
Singapura. (Ant-UP):  
Komando kesatuan ang-  
katan laut Inggris di Timur  
Djauh mengumumkan pada  
hari Rabu, bahwa kesatu-  
an angkatan laut Pakistan,  
Inggris dan Amerika Seri-  
kat pada pertemuan bulan  
depan ini akan mengadakan  
latihan perang<sup>2</sup> bersama  
didekat Singapura.

**Kediri :**  
MELANGGAR PERATURAN  
AN Kekuasaan MILITER  
No. 01/h. 1955.  
Kediri (TM).  
Pihak resmi di Kediri men-  
gatakan kepada Pers. bahwa  
mengenal penangkapan<sup>2</sup> terha-  
dap anggota FRR yang  
masuk<sup>2</sup> bernama Rjono sebagai  
Lis FRR dan Slamet sebagai  
Sersan Mayor FRR yang di-  
kudat oleh pihak CPM pada  
tanggal 7 Oktober lalu ini  
adalah karena mereka dituntut  
telah melanggar Peraturan Ke-  
kuasaan Militer No. 01/h. 1955,  
lagi melanggar larangan<sup>2</sup> ten-  
tang orang<sup>2</sup> yang berpakaian  
seragam militer. Sementara  
anak Polisi.

Anggota FRR yang kini  
ditahan oleh yang berwajib itu  
memakai pakaian seragam ter-  
tentu, yaitu hidayah<sup>2</sup>  
koberet merah, tanda pangkat  
yang merupakan tanda dengan  
dasar merah dan band lengan  
FRR merah.

**Andjuran Sjah Suleman Arrasoly :  
Partai<sup>2</sup> Islam supaja berga-  
bung sadja**

Bukittinggi, (Antara):  
Sjah Suleman Arrasoly di-  
jandura, seorang ulama tertua  
Tengah telah mengemukakan an-  
duran supaja partai-partai Is-  
lam yang kecil-kecil tidak masu-  
kut wali-walinya akan terpih-  
kiespotent, supaja bergabung  
saja dengan partai-partai Islam  
lainnya akan sekurangnya dapat  
mendukung kepada anggota-  
nya untuk dapat menjadi salah  
satu (salin partai) Islam yang  
banjak mendapat dukungan.

Anduran ini dikemukakan ber-  
hubung dengan akan dilangsun-  
kan pemuatan dalam buku kon-  
stitusi yang tanggal 15 De-  
seMBER 1955.

Perimbangan yang dikemukakan  
ini telah diterima secara umum  
oleh ulama di daerah tersebut  
pertama, dan bila diperinci-  
kan, maka jelas ini adalah wa-  
dibukutannya. Diandjurkan

Abd. Gafur sebagai pemimpin  
Kopond, kita belum dapat me-  
nyatakan dengan kepastian  
apakah mana baik mukim di  
Mekkah atau di Djeddah. Se-  
dang berturut-turut dengan ke-  
siden, sudah berhitung terus te-  
ras sebagai berhitung. Sehingga  
terkumpul adanya. Sehingga sudah  
mereka di Tengah Hedjaz sudah  
terkumpul lagi. Sehingga tidak  
perlu pejadi<sup>2</sup> kita yang ada di  
Mekkah yang sudah mempunyai  
nisan menanti ilmu pengetahuan  
sudah tidak lalu merubah lebih  
meningkatkan penerbitan men-  
jadi "hadis" oleh di Mekkah.  
Kesimpulan dari semua ini  
kesimpulan apa yang dibuat  
oleh Hedjaz itu ialah:

1. Tambahan devizen tentang  
keimanan yang dari kelangka-  
an di Indonesia dengan di-  
lah yang sekiranya hidup un-  
tuk hidup di Hedjaz.
2. Penghargaan Pemerintah ter-  
hadap para mukim yang me-  
negakkan Republik Indonesia  
dengan "de facto" dan "de  
jure".
3. Sekolah untuk perguruan  
"Darul Ulum" yang mereka  
dirikan serta madrasah<sup>2</sup> la-  
nya untuk kaum mukim di  
Tengah Hedjaz.

Madrasah apa yang saja tula  
diatas semuanya ini mendapat  
tidak banyak perhatian. Teru-  
tu dari Kagi dan Kem. Lusa  
surut.

**TULUNGAGUNG :  
I.P.P.I. MENGADAKAN  
REORGANISASI**

Pada tgl. 23 Okt. I.P.P.I.  
Tjab. Tulungagung telah  
mengadakan reorganisasi.  
Susunan pengurus baru  
terdiri dari ketua: sdr. Ali  
Wk. ketua: sdr. Sukarna-  
ni, sekretaris I: sdr. Ma-  
kamto, sekretaris II: sdr.  
L.J. Supeno, bendahara I:  
sdr. Chomsatun dan benda-  
hara II: sdr. Sukarno.

**HARAPAN PANEN  
TIPIS**

Sedjak tgl. 23 Okt. jl. su-  
ngai Rawa telah memuntah-  
kan, airnya sehingga meng-  
akibatkan banjir didesa  
dan sawah yang ada dise-  
kitarnya.

Menurut keterangan pa-  
ra petani, mulai awal tahun  
1955, telah 6 kali mengalami  
banjir. Sawah ladangnya  
menupakan rawa tak dapat  
ditanami. Baru sesudah bu-  
lan Agustus jbl. sawahnya  
dapat dikedirakan. Tetapi  
harapan panen tipis, padi-  
nya sebagian tenggelam da-  
lam air. Diterangkan pula,  
kalau dalam 7 hari air tidak  
surut, maka...



## LAMPIRAN 6

## Desas-desus ditundanya Pemilihan Umum

**arajat**

**EGALA PENGARUH**  
Etjeran Rp. 0.75

Nj. Sutrasno :

**PNI dapat menerima program Kabinet B.H.**

"Surabaya, (Ant.)  
Didalam suatu resepsi dengan wakil partai, insani serta masyarakat digedung Marhaenis di Sumenep malam Minggu, Nj. Sutrasno dari Dewan Partai Pusat PNI menjelaskan pendirian partainya bahwa PNI dapat menerima program pemerintah Burhanuddin Harahap karena didalamnya tersimpul masalah penyelesaian pemilihan umum dan pengembalian Irian Barat.

Dikatakan bahwa pemerintah akan selalu mendapat bantuan PNI selama bekerja dan berusaha kearah tertijapnya program itu. PNI sekarang berdiri sebagai partai oposisi analah sebagai suatu kelaziman dari satu partai yang berdiri diluar pemerintah jaitu sebagai pengawas dan pengoreksi tindakan pemerintah.

Tetapi, dalam pada itu, dikatakan oleh Nj. Sutrasno, bahwa PNI mendjanlenkan oposisi bukanlah asal oposisi belaka.

**RESES PARLEMEN DIPERPAN DJANG**

Djakarta, 24 Agustus (TM) :  
RABO pagi ini menurut rentjana Parlemen akan mengadakan sidang plmo untuk membicarakan usul diperpanjang reses Parlemen jg. semula ditetapkan dari 25 Agustus sampai 25 September mendjadi 25 Agustus sampai 2 Oktober. Apa maksud memperpanjang reses itu tidak dijelaskan.

**Hendak minum kopi, 3 dari 4 orang anaknya tewas**

Bari Selatan (Italia), (Ant.Reuter).  
Ketika Vito Santamato (28 tahun) menjalankan korek api hendak memasang komponjnya untuk memakak korp timad terjdadi ledakan dalam dapurjnya. Ledakan itu mengakibatkan 3 dari 4 orang anaknya tewas seketika itu. Sedangkan jg ke-4 serta dia sendiri mendapat luka parah.

Tentany itu polisi menerangkan

**Desas-desus sekitar ditundanya Pemilihan Umum**

Kabar2 yang bersimpang-siur tentang akan ditundanya Pemilihan Umum makin hari makin hangat. Dalam hubungan ini Trompet Masjarakat belum dapat memastikan apakah kabar2 ini mempunyai dasar kebenaran. Akan tetapi dari gejala2 yang terdapat pada hari2 yang terakhir ini, orang dengan mudah dapat menghubungkan keadaan negara dan pemerintahan dewasa ini dengan „kabar angin“ tentang ditundanya Pemilihan Umum tadi.

Setjara terus terang Trompet Masjarakat masih menjangsikan apakah Pemilihan Umum dapat terlaksana, tidak berdasarkan sikap Kabinet Burhanudin, seperti yang dilanseer oleh sementara surat2kabar di iukota. Seperti beberapa bulan yang lalu telah ditulis dihalaman ini, djustru anggota2 DPR dewasa ini, yang masuknya Parlemen hanya berkat KMB dan sistem konfjo, jaitu orang2 yang dalam zaman normal tak akan „masuk buku“ untuk mewakili rakyat dan dalam Pemilihan Umum jad. tidak ada kemungkinan untuk dipilih lagi, yang akan merasa girang bahwa Pemilihan Umum ditunda, sebab ini berarti pengoloran waktu mereka hidup mewah.

Tetapi berhubung sekarang ada kabar2 bahwa susunan PPI akan mengalami reorganisasi, karena tak ada sesuatu partai bekas KSO duduk didalamnya, maka Trompet Masjarakat khawatir, bahwa bukan tak mungkin reorganisasi ini akan menimbulkan sedikit kelambatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum nanti. Dalam pada itu sebaliknya djangan dilupakn, bahwa belum tentu kalau seandainya PPI yang sekarang boleh terus bekerdja Pemilihan Umum dapat 100% dilaksanakan pada tg. 29 September yang akan datang.

Kadaan sekarang sudah cukup memusingkan kepala. Dulu setelah PM Ali mengembalikan mandasjnya, maka olehnya dilakukan peninjauan di Pertjetakan Negara dan katanja semua beres. Sekarang ada sementara suara2 yang menginginkan supaya susunan PPI dirobah dan Kabinet Burhanudin sendiri memutuskan untuk mengadakan satu „momentopname“ untuk meniadjau keberesan sesuatu.

Oleh karena hal2 yang tertera diatas tadi, maka Trompet Masjarakat dengan ini mengusulkan supaya kalau Kabinet Burhanudin hendak benar2 menghalaukan segala iduduan2, maka harus dibentuk satu **Panitia Khusus dari orang2 yang tak berpartai** untuk mengepalai momentopname tadi, sebab djika pekerjaan penilaian persiapan2 untuk Pemilihan Umum ini dilakukan hanya oleh para Menteri dan PPI sadja, sukar untuk menghilangkan kesan yang tak baik terhadap Kabinet Burhanudin. Tugas Panitia khusus ini ialah semata-mata „mengawasi“ dan memberikan laporan yang bebas dari „pilih kasih“ untuk sesuatu fibak.

Trompet Masjarakat berani mengusulkan ini, oleh karena pengalaman sewaktu Kabinet A-A menghadapi Angkatan Darat, djuga dibentuk satu Panitia Adhoc yang terdiri dari Menteri2, tetapi tak ada orang luar yang duduk didalamnya. Alhasil pekerjaan Panitia tadi kurang bermfaat. Sekianlah pemandangan Trompet Masjarakat tentang masalah ini.

G. P. A.

**Sekitar pembekuan pengangkatan<sup>2</sup> di Kemlu**

**Muis temui Menteri Anak Agung**  
Oleh: Wartawan T.M. Sendiri.

Djakarta, 23 Agustus:  
KABAR2 yang tersiar bahwa Menteri Luar Negeri Anak Agung Gde Agung akan mengambil cadakan2 untuk membekukan pengangkatan2 yg pernah dilakukan oleh bekas Menteri Luar Negeri Sumario sewaktu denisisionerjnya Kabinet Ali-Arlin atas beberapa orang pendjabat di Kemlu,

## LAMPIRAN 7

## Menjalarnya Amerikanisme pada Kampanye Pemilihan Umum

tut tetap  
H I A3  
aja sesial  
a. Kernen  
dan Maret  
gihan dari  
trans B-I

AN FOTO  
C. Camera  
dibawah  
Kian. Bie  
ini menges-  
dipamer-  
ng di foto  
an 17. Pa-  
a untuk

apat ter-  
jang di

h didiri  
an Jung  
Pengemu  
mungan"  
diketnal  
Salin Sia

TING

ij. Tula  
laungang  
uk Ran  
Djanti.  
Tjpkose

IAT DI  
SIK.

prahu  
bernama  
"jektjok  
dapa te-  
kawan2  
seka-

di Seko  
paka ig  
sadikan  
jang da

Djajus-

55.

0  
sta"  
149/  
Fun-  
lath  
ang

ing"  
No.

"...pembayaran Rp. 8.50 dan untuk Langganan baru Rp. 10-  
dimana peraturan biasa kalau di tagih tambah Rp. 0.50 tetap  
berlaku. begitupun kondisi yang di tetapkan oleh Agen & S.  
Agen untuk khriman di luar batas tiap kota tetap berjalan  
sebagaimana biasa.

Bagi Agen dan S. Agen yang langsung di hantui oleh Kan-  
tor Pusat di wadibikan tiap malam belajar Rp. 6.50 dan  
Rp. 7.- bagi mereka yang sudah lunaskan pembayaran Dju-  
ni, sedang perhitungan untuk Langganan Baru Rp. 7.75 dan  
Rp. 8.25 selembarnya sebulan.

Sekalinya kepada Para Pembaca yang terpaksa mening-  
galkan Trempe Masyarakat dan berurusan kepada Agen & S.  
Agen diharap sika memberitahukan pembertentannya sebe-  
lum tanggal 30 hi. agar lebih di jauh Agen dan S. Agen dapat  
memberitahukan kepada Kantor Tata Usaha selambatnya  
tanggal 30 hi. begitupun langganan per pos agar selanjutnya  
yang lebih berhenti memberitahukannya !

Untuk perhatian di haturkan terima kasih !

G. P. A.

### Amerikanisme mendjalar sampai dlm kampanye pemilihan umum

Sistem kampanye pemilihan umum, dimana didalam ra-  
pat2 raksasa pentolan partai politik saling tjiuji maki dan  
saling menelakangi pribadi lawannya. Bukan merupakan  
tjonto baik untuk tradisi pemilihan umum di Indonesia. Tja-  
ra praktek demikian sampai digua dibawa ke dalam DPR. hai  
mana merupakan satu "misbrul" dari hak ingkar para ang-  
gota Parlemen.

Praktek2 sedemikian mengingatkan kita pada sistem kam-  
pagne pemilihan umum di Amerika Serikat. Oleh karena ini  
banyak orang bertanya pada diri sendiri, apakah ini bukan  
akibat dari dikirimnya banyak orang kenegara Uncle Sam un-  
tuk mempelajari soal2 partai politik dan pemilihan umum  
di sana.

Heberapa waktu ji telah kita signaleer akan bahajanya  
terlalu banyak orang2 kita dikirim ke Amerika Serikat. oleh  
karena diudara beberapa tjonto disana tak dapat diidipki be-  
gitu radju dan dipergunakan di Indonesia. Dlm hubungan ini,  
kalau mau mempelajari tentang partai2 politik dan pemilih-  
an umum, sebaiknya orang2 kita dikirim ke Inggris. Di Ing-  
gris orang tak suka saling tjiuji maki dihadapan umum, oleh  
karena ini dianggap merendahkan kehadjiran dan norma2  
masyarakat. Dimana kedua partai politik yang berhadapan ma-  
sing2 mempunyai satu program untuk disajikan dalam pemil-  
ihan umum. Sifat2 program ini, meskipun saling bertentangan,  
tak berisi unsur2 saling tjiuji maki.

Kita hanya hendak memperingatkan kepada pemimpin2  
kita, bahwa masyarakat dan kebudayaan kita telah banyak di-  
infiltreer oleh anasir2 Amerikanisme, dari filmnya. tjara hi-  
dup mewah sampai Coca Cola ! Djanganlah hendaknya kita  
terus terdjurus dalam djurang "the American way of  
life" !

G. H. G.

### Perkenalkan pemain<sup>2</sup> kes Salzburg

Sebagai diketahui panti puda  
tgi. 28 Djuni ini akan tiba di  
Djakarta kesebelasan dari Aus-  
tria, yang dalam negerinya ter-  
masuk kelas utama.

Kesebelasan Austria — Sai-  
zburg itu datang dalam rom-  
bongan 20 orang dan pemain2  
tjaja yang terkenal adalah:  
Birkoviz (kiri luar), usia 27  
tahun, asal Jugoslavia dan pe-  
main internasional dalam "Kese-  
belasan Jugoslavia B".  
Jedinek (back kanan) usia 28  
tahun. 14 kali sebagai pemain  
terpilih.

las utama.

Seterusnya diperkuat oleh pe-  
main2:

Hockmer usia 19 tahun, bebe-  
rapa kali terpilih dalam kesebe-  
lasan nasional muda Austria  
dan sebagai pemain internasio-  
nal.

Baumgartner usia 23 tahun,  
3 kali sebagai pemain terpilih  
kelas utama.

Vondrica (Kanan luar) usia  
27 tahun, dulu pemain "Vienna  
Wien" dan 6 kali sudah terpilih  
sebagai pemain kelas utama.

### MEMBAWA SUARA

SABTU 25 JUNI 1955

## "Panglima Besar"

### Rentjana Kahar ui pemilihan umum

Malasar. (Antara):  
Pada pertengahan bulan ini pihak mi-  
berhasil menangkap Mardjono Lakandjo  
Divisi Infanteri Peladjar DI-TII seor-  
pangkat Djenderal Major". Sekarang ia  
dijinakan disuatu tempat Restoran 25.  
Pengakuan tertulis yang diberikan p-  
hut kepada pihak berwadib, njatakan  
ada rentjana Kahar Muzakar untuk ka-  
pemilihan umum, menedeki seluruh Sul-  
djurikan semua satuan2 yang bertjdja  
dan TII seperti TKR dan Amaten.

Mengenal rentjana pengatja-  
an pemilihan umum, Kahar pa-  
da fase pemilihan akan han-  
tjuriat perhubungan seluruh  
Sulawesi Selatan, jaitu antara  
Makassar — Madjene, Makassar  
— Bonthain dan seterusnya ke  
Sindjai, Balanipa. Menurut ren-  
tjana itu, pada Agustus 1955  
yang akan datang sudah harus  
menduduki ketjamatan yang di-  
isolir disekeliling Sulawesi Sela-  
tan dan pengekoperan pemerinta-  
han militer TII kepada peme-  
rintahan sipil TII sudah harus  
selesai Sept. 1955. Okt. sampai  
dengan Nop. katanja keadaan  
akan vacuum dan pada Des.  
1955 dimulailah penyerangan  
terhadap kabupatent2 seluruh  
Sulawesi Selatan. Tindakan ini  
katanja selaku langkah perta-  
ma untuk mengoperkan peme-  
rintah Republik Indonesia kepa-  
da pemerintah Republik Islam  
Indonesia.

Dalam usaha ini dikatakan  
pemerintah pusat Republik Is-  
lam akan kirim bantuan 200 pe-  
rahu paukan lengkap dengan  
kapasitet satu regu dalam ma-  
sing2 perahu. Sebagai pendahu-  
luan akan mendarat 40 perahu  
didua tempat disekeliling Madjene  
dan pantai Palopo. Untuk ini di-  
siapkan tempat pendaratan an-  
tara pantai Mamudju, Madjene  
dan Palopo. Sebelum pendar-  
tan 40 perahu itu, maka telah  
akan mendarat lebih dulu tiga  
perahu dari Djawa Barat di  
Madjene dengan dua regu NI  
GO, yang terdiri dari orang2  
Belanda totok.

Oleh Kahar akan diadakan  
usaha2 agar TKR membalik ke  
TII dan kalau usaha-ini tak-  
mungkin-  
rangan  
Sec  
DIKEI  
Makassar  
Warta  
pat kete  
ini terjd  
penggela-  
nur Prop  
perakono-  
dijumlah  
diadakan  
pegawain  
nesia kot  
Dari ko-  
mi di kar-  
si, jang e-  
tawan ki-  
penipuan  
Sei  
sun  
Pada m-  
lan Djuni  
gawai kar-  
ekonomia  
lah diwad-  
jat memb-  
Rp. 230.00  
kan. Uang  
pembelian  
ladinja le-  
ngan pada  
Tetapi d-  
nja menjel-  
sajda pada  
tanda seto-  
jang kek-  
Suat —

### Mr. J. Wibisono jelaskan nja soal nasionalisasi

Djakarta. (Antara) :  
Pengusul mosj mengenai na-  
sionalisasi tanah2 partikeli-  
Mr. Jusuf Wibisono dihadapan  
sifatang Perkenen kemarin mem-  
berikan penjelasaan2 tentang  
usul mosja itu

jang berpu-  
tidak kuran  
untungan se-  
rens mereki  
dak punja,  
bertjinta, se-  
sistat wala-



## LAMPIRAN 8

## Rakjat djangan djadi korban agitasi politik!

**rakjat**

**GALA PENGARUH**  
Etjeran Rp. 0.75

**ITANGKAP**

angunsarkoro

an harus dengan  
n jang tjermat

ini jang dimaksudkan untuk memberan-  
i PNI atas pertanjaan bagaimana sikap  
sahwa diwaktu kabinet Ali telah chusus  
n jang tugasnja ditudjukan kepada pem-

Selain oleh aiat2 negara jang chusus,  
djuga berhasilnja pemberantasan ko-  
rupsi ini harus dengan bantuan serent-  
tak dari seluruh rakjat dengan dasar  
undang2. Djika hanya berdasarkan "ge-  
lora semangat" sewaktu-waktu sadia  
akan mudah dihindangi bahaya "mem-  
berantas korupsi untuk menimbulkan  
korupsi".

Selanjutnja diterangkan, bahwa den-  
ngan kabinet jang dibentuk atas da-  
sar "kehandel" pemberantasan korupsi  
itu tidak akan menjapai hasil jang  
sebaik-baiknja dan jang dapat diha-  
rapkan menjapai hasil sebaik-baiknja  
itu ialah pemerintah jang dibentuk  
atas hasil pemilihan umum nanti, ka-  
rena akan terdiri dari partai2 besar  
jang akan dibantu oleh anggota2nja.

**Mr. Iskaq undur berang  
katnja**

Keberangkatan Mr. Iskaq Tjokrosji  
surjo kembali ke Indonesia diundur-  
kan. Pihak Komisariat Agung tidak ber-  
sedia menerangkan lebih djauh apa se-  
babnja. Demikian berita singkat jang  
diperoleh "Antara" Amsterdam.

**Perintah Harian Wk. KSAD**

**Lenjapkan adanya perasaan go-  
longan ia menaga dan ia kalah**

**Rakjat djangan djadi korban  
agitasi politik !**

Kurang dari sebulan lagi Pemilihan Umum akan dimulai. Mata dunia  
kali ini seluruhnja difudjukan pada Indonesia, dimana untuk pertama  
kalinja rakjat dengan bebas memilih pemimpin2nja. Oleh karena itu ada-  
lah kewajiban setiap warganegara Indonesia untuk ikut mendjundjung  
tinggi prestise tanah airnja diforum internasional.

Trompet Masjarakat untuk sekalian kalinja dengan ini hendak men-  
signalkeer adanya perkembangan2 tak sehat dalam negara kita ini, dimara  
prinsip2 demokrasi disalahgunakan. Jang kita maksudkan ialah adanya  
kekutajauan pikiran dikalangan masjarakat ramai, bahwa sistim kepartaian  
terutama perlunya digunakan untuk memetjah masjarakat kita dalam be-  
berapa front, jang saling bertentangan satu dengan lainnja.

Tjelakanja diustru rakjat djelata banjak terkena agitasi politik jang  
salah ini. Ekses2 dari perdjjoangan politik partai2 mendjelang Pemilihan  
Umum terutama kelihatan ditempat2 ketijil didaerah pedalaman. Disana  
masing2 anggota2 partai sangai fanatik dalam mempropagandakan partai-  
nja, sehingga sering terdjadi pertjktjjoan dikalangan rakjat desa. Ge-  
djala ini sangat berbahaya mengingat dengan begini timbul kemungkinan,  
bahwa "tradisi kekeluargaan" jang mendjadi "sokoguru" dari kehidupan  
desa akan hantjur sama sekali. Dan ini sekali-kali bukan maksud dari  
para pemimpin kita jang djujur jang memasukkan unsur2 demokrasi  
dalam kehidupan masjarakat Indonesia.

Sangat disayangkan oleh Trompet Masjarakat, bahwa pemimpin2  
partai2 politik jang kurang rasa tanggung djawabnja telah begitu sampai  
hati untuk "membakar fiati rakjat" dan menjebarkan biot pertjdjrahan di-  
kalangan mereka. Sembojan2 jang bermakna: "Partai saja paling sem-  
purna!" mengakibatkan orang sama berfikir, bahwa seorang jang tidak  
masuk partainya dengan sendiri merupakan "musuh". Ini bukan tudjuaan  
azas2 demokrasi jang terkandung dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

Trompet Masjarakat kembali hendak memperingatkan, bahwa rakjat  
harus waspada terhadap pemimpin2nja. Sebab, banjak diantara mereka  
merupakan "pemimpin2 gadungan" jang "lempar batu sembunyi tangan".  
Tjoba pikirank diwaktu ada pertemuan Halal Bihalal dll. para pemim-  
pin2 ini meskipun ideologinja bertentangan dan dalam rapat2 saling tjur-  
tji maki, dapat berdjabatan tangan dan makan-minum bersama-sama dgn.  
muka manis, sebaliknya diadesa2 rakjat pada saling musuh-memusuhi. Ke-  
adaan jang tak sehat ini harus berhenti sampai disini sadja!

G. P. A.

**Gerilja Aldjazair menjusup**

Tunis, (Ant-Reuters).  
Pembesar2 Perantjis di Tunis menga-  
mumkan Senin ini, bahwa di dekat Gat-  
sa, ialah di Tunisia barat kira2 30 mil  
sebelah timur tapalbatas Aldjazairiah,  
telah berkobar pertempuran selama 3  
hari antara pasukan Legiun Asiriz Pe-  
rantjis dan infantri Tunisia disaat di-  
hak melawan kira2 500 gerilja Aldjazai-  
riah jang menasup ke Tunisia dipihak  
lainnja.

Menurut pihak Perantjis, sekurangnya  
12 orang Aldjazairiah telah  
tewas, dan "mungkin 30 orang Aldjazai-  
riah lainnja telah tewas pula", sedang-

kan 9 serdadu pihak Perantjis tewas  
dan 11 luka2.

Dalam pertempuran sensit ini pihak  
gerilja Aldjazairiah mempergunakan mi-  
traljur ringan, senapan (sebagian bun-  
tan Perantjis) dan sejumlah besar gra-  
nat; sehingga timbul pertempuran se-  
orang lawan seorang.

Menurut dugaan pihak Perantjis, ang-  
gota2 gerilja Aldjazairiah tadi berusaha  
mendapatkan makanan dan tenaga pe-  
rtjjuang baru.

**ISTIQBAL SETUDJU DUDUK DLM.  
PEMERINTAHAN MAROKKO SETE-  
LAH SULTAN BEN YUSSEF  
KEMBALI**

Paris, (Ant-Reuters).  
Partai Istiqbal, yaitu partai nasional  
Marokko, beredia untuk ikut serta  
dalam pemerintahan Marokko, banja  
setelah sultan benyusef dipindahkan  
dari Marokko ke Perantjis dan se-  
telah ia setjara resmi menjajawab  
setudjuaannya bahwa partai tadi ikut  
serta dalam pemerintahan.

## LAMPIRAN 9

## Kursus Rakyat Mencoblos Tanda Gambar





## LAMPIRAN 10

## PSII Menghendaki adanya penghapusan KMB

diingat bahwa ada k danara yang men eguk dan pendorong a orang2 seama ita maka dapatlah i beapa merusak nani. bahwa gra aud itu celanja k elagid gerakan RM

### ingkatnya asing

IAN PELAKSANA RRT

ah menjatakan ti uar Negeri Sunario RRT kusa menjel p, sedang kan peme si 17 Agustus 1945 iu hajak orang n ketus umum. Ba Mehan kemarin — djuang/kan peratu- jian RI—RRT itu orang asing, artinja egera RI tetap ting

dalam negeri. i dalam negeri u Glok Tihon me samian lak dan hak lainja sari warg- jonesia tiruan aing i dengan warganega-

soal ini ditakannya, nsp kewarganegara- ternya modern me- uha peraturan na- (kewarganegara) u tjara untuk me- openting sa dari ranja.

lenitikan katanja, pe son kewarganegara p tidak boleh diwak- an digunakan untuk ul perbaikan ke- b minoriteit, dalam minoriteit keturman

nja pula menurut sha memperbalik go noriteit adalah seba- tidak dapat dipi- ri usaha2 kepenti- ta warganegara. Ke- i ini, dikatakannya i keawatan yang ber- sama jain.

jang keterangannya a belum ada kesatu- ka timbullah „pro- s“, sebaliknja, sema- r—proses penutaran kin erat hubungan ehingga semakin ter- eastian kepentingan i warganegara itu,

gan yang merupa- an ini dapat diper- an djalan memperje- ntuhan baru model ri (developing of apital); sehingga de- nonesia dapat me- an tjapat keadaan- n ini, dan djanja itu

dan Indonesia) (C. Hendichap) (C. Hendichap)

NIT pernah pegang peranan penting? dalam Pemerintah han.

Dapat ditunduk sekarang beberapa dianfanja, pada siapa sekarang pihak berwa djb mengulurkan perhatian sepenuhnya.

Orang2 ini, demikian Insp. Lengkoong achinja, sama se kali tak dapat lagi melena kan dirinja dari genggaman susana pendadjahan. Tetapi Insp. Lengkoong belum bersedia mentundukkan stepa2 orang jang dimaksudkannya itu.

Ada gerakan illegal "Red Devil"?

Menjangkut dengan pembo ritaan diatas ini, "Marhaen" achinja dapat mengabarkan, bahwa baru2 ini telah diketahu adanya gerakan jang mun tji ditatah Minahasa, bernya "Red Devil" (Hantu Ma- rah), jang katanja merupa kan pendorong kepada terben- uknja matu apa jang diha- maikan "pasukan Federal".

Masih menjadi penjeli- kan jang berwadib, apakah "Red Devil" itu hanya perbu- tan "banaliteit" (kenakaban) sadja, ataulah memang be- lut2 mengandung unsur2 poli- tik jang tertentu.

Gerombola2 hakekat- nja tidak bergaja.

"Pikiran Rakyat" Menado mengabarkan pula, bahwa di- bandingin dengan beberapa tahun jang lalu maka gerom- bolan di Minahasa sekarang ini pada hakekatnja tidak ber- gaja, karena imansifaja alat2 negara mengedjar mere- ka. (Marhaen).

ARUDJI KARTAWINATA

## PSII menghendaki hapusnya KMB setjara unilateral

Palembang, (Antara) :

Presiden Ladjah Tandjiljah Partai Serikat Islam Indone- sia, Arudji Kartawinata, da- lam pidato jang diujarkannya di rapat umum jang diadakan oleh partai tersebut ditahan ia jang pidato jang diujarkannya di rapat umum jang diadakan oleh partai tersebut ditahan ia jang pidato jang diujarkannya di rapat umum jang diadakan oleh partai tersebut ditahan ia

Mengenai oposisi Arudji kati- kan bahwa dalam melakukan ketjeman2 kaum oposisi seba- runja juga mengemukakan konsepsinja bagaimana harus memperbalik sesuatu jang di- setjara itu dan tidak seperti se- hana ini dilakukannja jang ber- sifat anarkistis dan "tan" itu.

Berlittja tentang KMB Aru- dji tegaskan, bahwa partainya menghendaki perdjandjian KMB harus dihapus setjara uni- lateral, karena akibat KMB- lah puluhan milyar rupiah di- kekuk modal asing dari Indone- sia jang timbulkan keketjauan ekonomi dan keuangan. Setiap partai mengutuk KMB, baik Masjumi, PSI maupun PNI, ta- pi mereka kula tidak dapat menertidkan persatuan guna

besar jang dibela oleh 5 pe- bela, belum pernah terjadi di Indonesia. Menjaln pada perkara Oe Oen Tjeng mi su- dja. Beberapa pengatjara pem- bela Oe Oen Tjeng, antara nja Mr. Tan Po Gwan, selama dua bulan jang akhir ini sudah 2 kali berkunjung ke Ban- djarmasin, untuk menemul Oe Oen Tjeng. Jang hingga kini masih ditahan dipenda- ra Teluk Dalam begitu juga untuk persapa2 berhubung dengan pemeriksaan jang akan dilakukan.

## Ada tanda2 soal ganti kera- gian perang selesai Sept. jad

MENTHUT MENTERI LUAR NEGERI SUNARIO

DIKARFA, (ANTARA) : MENTERI LUAR NEGERI MR. SUNARIO MENERANG- KAN, ADA TANDA2 BAHWA PENDIRIAN INDONESIA DAN DJEPANG DALAM SOAL GANTI KERUGIAN PE- RANG BISA BERTEMU DAN SERELUM BULAN SEPTEMBER JAD, MASALAH GANTI KERUGIAN PERANG ITU DAPAT DISELESAIKAN.

Menteri Sunario menjatakan perasaan optimisme berdasar- kan berbagai faktor, jaitu per- sena adanya kemundikan jg makin nyata jang dapat diket- hui dari perdjandjian Djepang dengan Bima dan kemundi- nan jang akan ditjapai oleh Djepang dengan Filipina, se- hingga tujutan Indonesia itu dapatlah dianggap riell.

Kedua, adanya pendisat- unan dikalangan anggota- ta Parlemen, bahwa penyelesaian masalah ganti kerugian perang

menperlembat semangat tenta- ra sadja.

Pemerintah Ngo Diah Diam mengemukakan seferentja beh- wa seorang djenderal Hoä Hao, bernama Lam Thanh Nguyen telah menjatakan dirinja memi- hak penerintah, dua orang ut- ran Lam jang mengedap PM Ngo Niam Selaga ini menga- kan bahwa dibawah Lam ber- diri 8.999 orang, tapi sumber2 lain menjatakan bahwa djun- lah mereka hanya kira2 3.990 orang. Sedangkan djenderal Lam sendiri kini sedang memi-

menperlembat semangat tenta- ra sadja.

MENTHUT MENTERI LUAR NEGERI SUNARIO

DIKARFA, (ANTARA) :

MENTERI LUAR NEGERI MR. SUNARIO MENERANG- KAN, ADA TANDA2 BAHWA PENDIRIAN INDONESIA DAN DJEPANG DALAM SOAL GANTI KERUGIAN PE- RANG BISA BERTEMU DAN SERELUM BULAN SEPTEMBER JAD, MASALAH GANTI KERUGIAN PERANG ITU DAPAT DISELESAIKAN.

Menteri Sunario menjatakan perasaan optimisme berdasar- kan berbagai faktor, jaitu per- sena adanya kemundikan jg makin nyata jang dapat diket- hui dari perdjandjian Djepang dengan Bima dan kemundi- nan jang akan ditjapai oleh Djepang dengan Filipina, se- hingga tujutan Indonesia itu dapatlah dianggap riell.

Kedua, adanya pendisat- unan dikalangan anggota- ta Parlemen, bahwa penyelesaian masalah ganti kerugian perang

Menteri Sunario tidak men- rangkan bagaimana perintjan tuntutan Indonesia dan sampai seberapa djauh Djepang berse- dia membajar kepada Indone- sia. Ia hanya mengatakan, bah- wa sikap Indonesia adalah di- basarkan pada situasi interna- sional dan mengingat politik te- tangga baik dan tjita2 politik Asia dan Afrika.

Dikatakannya, bahwa salah- sedjak lama soal ganti kerugi- an perang ini diusahakan pe- njelesannya jaitu dengan an- tara lain tertjapinja perdjand- jian mengenai pengangkutan kapal2 jang tenggelam. Seba- gaimana diketahui, ranjangan undang2 tentang pengangkutan kapal2 jg tenggelam dgn. Djepang ini sedang ditjajarkan dalam parlemen.

Achinja Menteri Sunario me- nerangkan bahwa tuntutan In- donesia adalah pantas dan praletis, jaitu tidak terfala be- rat bagi Djepang, tapi djuga tidak terfala ketil. Saja juga beresang hati, apabila seba- lun September jang akan da- tang masalah ganti kerugian perang ini sudah dapat selesai, jaitu sebelum saja berangkat ke Amerika untuk memimpin delegasi Indonesia dalam si- dang umum PBB tahun ini. De- mikian Menteri Sunario.

Menteri Sunario tidak men- rangkan bagaimana perintjan tuntutan Indonesia dan sampai seberapa djauh Djepang berse- dia membajar kepada Indone- sia. Ia hanya mengatakan, bah- wa sikap Indonesia adalah di- basarkan pada situasi interna- sional dan mengingat politik te- tangga baik dan tjita2 politik Asia dan Afrika.

Dikatakannya, bahwa salah- sedjak lama soal ganti kerugi- an perang ini diusahakan pe- njelesannya jaitu dengan an- tara lain tertjapinja perdjand- jian mengenai pengangkutan kapal2 jang tenggelam. Seba- gaimana diketahui, ranjangan undang2 tentang pengangkutan kapal2 jg tenggelam dgn. Djepang ini sedang ditjajarkan dalam parlemen.

Achinja Menteri Sunario me- nerangkan bahwa tuntutan In- donesia adalah pantas dan praletis, jaitu tidak terfala be- rat bagi Djepang, tapi djuga tidak terfala ketil. Saja juga beresang hati, apabila seba- lun September jang akan da- tang masalah ganti kerugian perang ini sudah dapat selesai, jaitu sebelum saja berangkat ke Amerika untuk memimpin delegasi Indonesia dalam si- dang umum PBB tahun ini. De- mikian Menteri Sunario.

Menteri Sunario tidak men- rangkan bagaimana perintjan tuntutan Indonesia dan sampai seberapa djauh Djepang berse- dia membajar kepada Indone- sia. Ia hanya mengatakan, bah- wa sikap Indonesia adalah di- basarkan pada situasi interna- sional dan mengingat politik te- tangga baik dan tjita2 politik Asia dan Afrika.

Dikatakannya, bahwa salah- sedjak lama soal ganti kerugi- an perang ini diusahakan pe- njelesannya jaitu dengan an- tara lain tertjapinja perdjand- jian mengenai pengangkutan kapal2 jang tenggelam. Seba- gaimana diketahui, ranjangan undang2 tentang pengangkutan kapal2 jg tenggelam dgn. Djepang ini sedang ditjajarkan dalam parlemen.

Achinja Menteri Sunario me- nerangkan bahwa tuntutan In- donesia adalah pantas dan praletis, jaitu tidak terfala be- rat bagi Djepang, tapi djuga tidak terfala ketil. Saja juga beresang hati, apabila seba- lun September jang akan da- tang masalah ganti kerugian perang ini sudah dapat selesai, jaitu sebelum saja berangkat ke Amerika untuk memimpin delegasi Indonesia dalam si- dang umum PBB tahun ini. De- mikian Menteri Sunario.

Menteri Sunario tidak men- rangkan bagaimana perintjan tuntutan Indonesia dan sampai seberapa djauh Djepang berse- dia membajar kepada Indone- sia. Ia hanya mengatakan, bah- wa sikap Indonesia adalah di- basarkan pada situasi interna- sional dan mengingat politik te- tangga baik dan tjita2 politik Asia dan Afrika.

Dikatakannya, bahwa salah- sedjak lama soal ganti kerugi- an perang ini diusahakan pe- njelesannya jaitu dengan an- tara lain tertjapinja perdjand- jian mengenai pengangkutan kapal2 jang tenggelam. Seba- gaimana diketahui, ranjangan undang2 tentang pengangkutan kapal2 jg tenggelam dgn. Djepang ini sedang ditjajarkan dalam parlemen.

Achinja Menteri Sunario me- nerangkan bahwa tuntutan In- donesia adalah pantas dan praletis, jaitu tidak terfala be- rat bagi Djepang, tapi djuga tidak terfala ketil. Saja juga beresang hati, apabila seba- lun September jang akan da- tang masalah ganti kerugian perang ini sudah dapat selesai, jaitu sebelum saja berangkat ke Amerika untuk memimpin delegasi Indonesia dalam si- dang umum PBB tahun ini. De- mikian Menteri Sunario.

kapi

Guna leby memperluas jha R.I., di- diklatkan i- terbang jrt- acbir talus- mulaan tal- bang2 Indo- nempuh pe- ri akan da- takan pui- pesawat2 I- sehingga A- pat mengo- dakan pene-

OPERA PI

PDB

Paris, (An

Matian2 petang bar- gai portum opera Peak petoleh su- baik pada- Senen jbl.

P. M. Ali

di

P. M. Ali

serta romb- mengadala- ma 10 ha- lakjak Tio- 10-25 telah pangad teri- ngan pesaw- wa dari GI- genap Masi- nen Saigon militer, Coi-

Pesawat

bawa romb- lak kemari- dengan dlu- marjarak- singgah di I- ini PM Ali- but oleh G- di, Dari Ho- bang ke Dja-

Setibanja

Kemajoran, kan perjat- bahwa dula- ngan petik- tertutana de- Lal telah te- berama mi- pelikeanag- perensi Asi- lah dibijori- diluas Indon- di penutari- an antara R- ka Serikat, diteritja bu-

Achinja

njaannja- bahwa kuni- itu telah m- li guna seli- ra Indone- kok baru de- hormat dan- urunan dal-

Denitken

pernyataan



## LAMPIRAN 11

## "PSII punya pendirian sendiri

an Sekretaris Jenderal. Ke-  
menangan Perhubungan dan  
dan pembuktian perimbangan  
an ljin baru GIA Djakarta-  
Makassar-Ambon, menerang-  
kan, bahwa keadaan pulau  
Ambon dewasa ini sangat  
aman dan tentram.

Mengenal apa yang disebut  
gerombolan RMS, oleh Wali  
kota Sudiro — berdasarkan  
keterangan yang didapatnya  
dari pejabat resmi di Am-  
bon — dikatakan, bahwa si-  
sa2 gerombolan tsb. jeng su-  
dah tidak begitu ada artinya  
lagi, memang masih terda-  
pat, jalta ditengali2 hutan  
bagian pulau Cerai.

**Pidato Luns**  
Dalam pidatonya Luns me-  
nyatakan, bahwa keinginan  
pemerintah Indonesia untuk  
memperbaiki hubungan di  
antara kedua negeri, menda-  
patkan sambutan yang baik di  
Nederlands.

Isam pidatonya pada upatja  
ra pembukaan perundingan itu  
Luns telah menjangkau soal  
tahanan Belanda di Indonesia.  
Ia menyatakan, bahwa "delega-  
si Belanda perijaja, bahwa  
pemerintah Indonesia dalam ba-  
has2 jeng dapat diharapkan da-  
ri padanya akan berbint segala  
sesuatu untuk mendapatkan pe-  
njelesaian dalam soal, jeng se-  
perti tsb2 telah ketahut sa-  
ngat membangkitkan perasaan  
keadilan rakyat Nederland, jeng  
pada kesempatan ini tidak akan  
saja uraian lebih lanjut."

**HAMPIR SELURUH DAERAH  
PEMILIHAN. AKAN LAJU  
KAN PEMUNGUTAN SUARA  
PADA TGL 15 DESEMBER**  
Kata ketua PPI S. H. di-  
katakan,

Djakarta, (Antara):—  
"Atas perjanjian "Antara"  
tentang sampai mana persi-  
apan2 jeng telah dilakukan  
mendjelang pemilihan umum  
untuk anggota2 konstituante.  
ketua PPI S. Hadikusumo ka-  
takan, bahwa persiapan2  
teknis untuk pemungutan  
suara jad itu diarah lebih  
madju daripada pemungut-  
an suara jeng lalu.

Djuga dikatakan, bahwa  
"hampir seluruh daerah pe-  
milihan akan melakukan pe-  
mungutan suara serentak  
pada tgl 15 Desember jad."

tidak terhadap sekretaris segala  
yang diangkat langsung oleh Gu-  
bernur Inggris yang merupakan  
seorang anggota resmi dari pene-  
rintah.

**ABDUL RACHMAN BERI  
ULTIMATUM**

Pada Chin Peng.  
Kuala Lumpur, (Ant-UP).  
Kepala menteri Malaja, Teng-  
ku Abdul Rahman, telah membe-  
ri ultimatum kepada penem-  
pin partai Komunis Malaja, Chin  
Peng, supaya menjawab usulnya  
untuk mengadakan pertemuan  
pada tgl 30 Desember atau harus  
menjawab "konsekuensi2-nya"

Eden tsb, demikian kalangan ta-  
dang jeng dijanjikan mengatakan  
bahwa pemerintah negara2-Arab  
telah memutuskan untuk membe-  
rituhkan loggers sejepat mung-  
kin melalui saluran diplomatik  
bahwa tidak perlu lagi diberikan  
jawaban terakhir dari negara2  
Arab tentang usul Eden pada  
saat ini karena usul itu telah di-  
tolak laras.

dengan pidatonya. Lebih baik  
lagi jika mereka tidak menjebu-  
njebut soal2 pertentangan.

Pembesar2 tinggi lainnya dari  
har negeri, seperti maresial Ti-  
to dari Yugoslavia dan Sir An-  
thony Eden dari Inggris pernah  
datang berkunjung di India, te-  
tapi mereka ini tidak mengemu-  
kakan soal2 pertentangan. Dem-  
ikian Charterjee.

demikian, maka kini berlawanan  
dengan keinginan rakyat dan pe-  
merintah India, telah muncul se-  
buah pangkalan militer AS di-  
wilayah India.

Menyeri luar negeri Portu-  
gal, Paulo Cunha, pada hari  
Minggu menjatakan di New  
York, bahwa pemerintahnya

## Mengenai Irian Barat

## PSII punya pendirian sendiri

Djakarta, (Antara) :

Arudi Kartawinata dari PSII  
yang telah diangkat menjadi  
anggota delegasi Anak Agung  
Kopernandjungan dengan Neder-  
land, hari ini bersama Menteri  
Sosial Sudibjo telah menemui  
Perdana Menteri Burhanudin  
Harahap di Kantor Dewan Men-  
teri Peljambon untuk membi-  
jakan soal2 disekitar perun-  
dangan Indonesia-Nederlands dan  
pengangkatan Arudi Kartawina  
sebagai anggota delegasi Indo-  
nesia.

Setelah selesai pertemuan itu  
Arudi Kartawinata atas perta-  
niaan pers dengan sangat "ge-  
revereerd" menyatakan, bahwa  
soal keberangkatannya ke Ne-  
derland bukan soal, dan sampai  
pada waktu ini (Senin pagi) ti-  
dak ada sesuatu jeng mengun-  
jang-halangi keberangkatannya.

Kabun dijad ija akan be-  
rangkat tanggal 16 Desember jg  
akan datang, demikian kata  
Arudi Kartawinata, jeng telah  
ditjaja menerangkan, bahwa  
semalam Dewan Pimpinan PSII  
telah mengadakan rapat dan ke-  
nadanya telah dibenarkan anasat  
untuk merumuskan dasar2 per-  
undingan, didalam perundingan,  
antara lain mengenai batas2 mi-  
nimum dan maximum.

Ketika ditjaja, bagaimana-  
kah pendirian partai ini meng-  
nai pembatasan2 terdapat Irian  
Barat dalam perundingan Indo-

nesia-Belanda dengan tidak me-  
njangkung masalah kedaulatan  
daerah tersebut, Arudi mene-  
rangkan, bahwa dalam hal ini  
partainya (PSII) mempunyai  
pendirian sendiri. Tapi, Arudi  
tidak bersedia membejarkan kete-  
rangan tentang pendirian PSII  
itu, ketjuali mendjandjikan  
akan mengerankannya kelak,  
apadla ts dijad berangkat.

Dalam hubungan ini dapat di-  
tambahkan, bahwa dalam inter-  
pungja kepada Antara tanggal  
1 Desember jeng lalu, Arudi  
menyatakan, bahwa partainya  
telah menentukan dasar2 po-  
litik perundingan dengan pihak

Nederlands jeng pokoknya seba-  
gai berikut :

1. Tjajuan utama dari pada  
perundingan ialah melaksana-  
kan dengan jalan damai bubar-  
kan ikatan Uni Indonesia-Neder-  
lands dengan tjaja bersyarat.
2. Menjadjau kembali dan  
menghapuskan segala perseu-  
djuan hasil KMB jeng mengun-  
dikan Indonesia dan diganti de-  
ngan persetujuan internasional  
biasa.
3. Penjelesaian sejijara damai  
mengikut Irian Barat atas dasar  
pengakuan kedaulatan Republik  
Indonesia atas Irian Barat dan  
mengembalikan ke dalam ke-  
kuasaannya.

## Dewan Keamanan PBB

Belum dapat ambil  
Tentang masalah keanggotaan

**PBB, (Ant-UP):**  
Meskipun telah berdebat tidak  
kurang dari 5½ jam lamanya,  
namun Dewan Keamanan PBB  
dalam sidangnja pada hari Sabtu  
belum djaja berhasil untuk me-  
ndapatkan suatu djalan guna me-  
nembus djalan buntu mengenai  
soal keanggotaan, jaitu soal jeng  
berkaitan disekitar penerimaan 18  
negara sebagai anggota baru PBB  
sejijara sekaligus.

Atas usul ketua sidang, Sir  
Leslie Munro dari New Zealand,  
akhirnja Dewan memutuskan un-  
tuk menunda sidangnja sampai  
Selasa hari ini, dimana akan di-  
ambil ketjeraan mengenai usul2  
jeng telah diadjukan.

**Usul Soviet Uni.**  
Dalam sidang itu Soviet Uni  
menuntut djaman2 jeng pasti  
terhadap kemungkinan terjadinya  
"surprise" 2 atau insiden2 baik di  
Dewan Keamanan maupun disu-  
dang lengkap Majelis Umum  
PBB jeng akan menghilangi di-  
serimanya 18 negara tersebut se-  
luruhnja menjadi anggota baru  
PBB. Dalam rangka tuntutanja  
tersebut Soviet Uni mengusulkan,  
supaja Dewan Keamanan dan  
Majelis Umum jeng beranggota  
60 negara itu bersidang pada  
waktu jeng bersamaan untuk  
memberikan persetujuan sejijara  
menurut djaja mereka terhadap per-

mintaan keanggotaan 18 negara  
tjalon tersebut.

**Usul Barat.**  
Negara2 Barat sebaliknya djaja  
menuntut djaman2 didalam  
Dewan Keamanan, bahwa semua  
13 negara tjalon jeng disokong  
oleh Barat dan 5 negara tjalon  
jeng disokong oleh Soviet Uni

## Kuomintang dari

**Taipei, (Ant-UP):**  
Kakapad2 Kuomintang menga-  
ngin-angikan dengan kuat bahwa  
mereka mungkin akan keluar  
dari PBB untuk memisahkan pe-  
nolakannya terhadap permintaan  
Mongolia menjadi anggota PBB.  
Berita2 pers di Taipei menjaka-  
kan bahwa kalangan2 pemerintah  
Taiwan kini sedang memperdjari  
akibat2-nya jika mereka men-  
pergunakan hak veto terhadap  
Mongolia itu.

Harian berbahasa Inggris  
"Chin News" mengatakan ada  
perasaan jeng makin lama makin  
kuat bahwa akan menjadi lebih  
baik untuk Kuomintang dijaja  
mendjajarkan diri dari PBB dis-